

**AKUNTANSI SYARI'AH :
REFLEKSI AKUNTANSI BERORIENTASI SOSIAL DAN
PERTANGGUNGJAWABAN**



Oleh :

**Drs. M U H A M A D
NIM : 970001**

T E S I S :

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 1999**

ABSTRAK

AKUNTANSI SYARI'AH : REFLEKSI AKUNTANSI BERORIENTASI SOSIAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DRS. MUHAMAD
NIM : 970001

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan kepada umat manusia, apabila melakukan kegiatan transaksi jual-beli secara tunai ataupun kredit dan melakukan transaksi utang-piutang, maka perlu dilakukan pencatatan. Berangkat dari perintah ini, setiap kali membicarakan sistem ekonomi Islam (syari'ah) – termasuk di dalamnya pembicaraan sistem manajemen, akuntansi – dan sistem yang lainnya dalam kerangka modēren, tidak lepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, di dalam Islam telah lama mengajarkan proses akuntansi.

Akuntansi syari'ah dengan bentuk humanis dan sarat nilai ini, tentu saja memuat nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh ilmu lain, misalnya nilai sosial dan pertanggungjawaban. Berangkat dari pemikiran di atas, maka problematika tesis ini adalah (1) Bagaimanakah hakekat akuntansi syari'ah dilihat dari perspektif akuntansi sosial dan pertanggungjawaban? (2) Apakah akuntansi itu merupakan suatu bentuk pengetahuan dan praktik yang banyak ditentukan oleh lingkungannya (*non value-free*), dengan kata lain akuntansi adalah "anak" yang lahir dari budaya setempat (lokal)?

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akuntansi konvensional menunjukkan ada sejumlah persoalan penting yang perlu dicatat. Beberapa diantaranya adalah (1) persoalan kepemihakan, (2) asumsi atau *basic concept*, (3) efek dari persoalan *basic concept* tentu saja merembes ke tingkat standar, atau bahkan metode akuntansi yang dipilih. Berdasarkan tiga persoalan dasar tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak semua asumsi, postulat, kaidah, dan prinsip-prinsip dalam akuntansi Barat dapat diterapkan untuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Sebab lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga atau perusahaan Barat. Dengan demikian implikasi dari tiga persoalan dasar yang melekat dalam sistem akuntansi Barat jelas sangat berbeda. Sebagai contoh, kepemihakan dalam Islam adalah kepemihakan pelaporan kepada seluruh pihak yang terlibat dan terkena dampak perusahaan.

Dari hasil analisis ditemukan : (1) Pada tataran praktis akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi syari'ah dapat menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sekaligus menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teologikal*. Oleh karena itu, konsep dasar akuntansi syari'ah adalah bersifat *zakat* dan *amanah oriented*; (2) Perkembangan lebih lanjut akuntansi bukan sekedar dianggap sebagai ilmu (*science*) dan teknologi universal yang bebas nilai. Akan tetapi, akuntansi adalah produk sejarah yang merefleksikan budaya di tempat akuntansi dilaksanakan. Dengan kata lain, akuntansi syari'ah adalah ilmu dan teknologi universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, baik sosial, ekonomi, politik, peraturan perundangan, kultur, persepsi dan nilai [masyarakat] tempat akuntansi syari'ah diterapkan; dan (3) Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara "tambal sulam" terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur'an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Oleh karena itu, secara substantif akuntansi syari'ah bersifat *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teologikal*.



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Akuntansi Syari'ah : Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan
Pertanggungjawaban

Ditulis : Drs. Muhamad

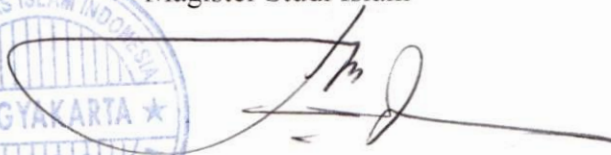
NIM : 970001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Agama Islam

Yogyakarta, 06 APR 2001

Ketua Program
Magister Studi Islam




Dr. Imam Syafi'ie, MA.



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

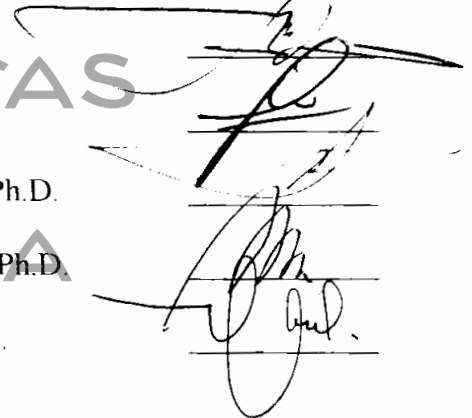
Nama : Drs. Muhamad
NIM : 970001
Judul : Akuntansi Syariah : Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan
Pertanggungjawaban



Nama 

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Imam Syafiqie, MA.
Sekretaris Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag.
Pembimbing : Drs. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak. Ph.D.
Penguji : 1. Drs. Ahmad Sobirin, MBA, Ak., Ph.D.
2. Drs. Akhmad Minhaji, MA., Ph.D.



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1999

Pukul 09.15 sampai dengan 10.45 WIB.

Hasil/Nilai : Lulus/ B

Predikat : Sangat Memuaskan



Program Pascasarjana
MAGISTER STUDI ISLAM
Universitas Islam Indonesia

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Akuntansi Syari'ah : Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban yang ditulis oleh Drs. Muhamad, telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam.



Yogyakarta, 30 Maret 1999

Pembimbing

Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., Ak., Ph.D.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN MOTTO

Landasan syari'ah adalah kebijaksanaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan manusia ini terletak dalam keadilan, kasih sayang, kelayakan dan kebijaksanaan. Apapun yang bergeser dari keadilan ke penindasan, dari kasih sayang ke kebencian, dari kesejahteraan ke kesengsaraan dan dari kebijaksanaan ke kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syari'ah.



Ibn al-Qayyim

UNIVERSITAS

Tujuan syari'ah yang paling dasar adalah memajukan kesejahteraan manusia yang terletak dalam jaminan keyakinan mereka, kehidupan mereka, intelektual mereka, masa depan mereka dan harta milik mereka. Apapun yang dapat menjamin kelima hal tersebut Mencerminkan kepentingan umum, Dan tentunya dikehendaki

Al-Ghazali

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya tesis yang berjudul **Akuntansi Syari'ah : Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis sengaja mengangkat judul ini dengan maksud mengungkap perkembangan dan hakikat akuntansi dalam perspektif Islam. Dengan harapan hasil temuan ini dapat dijadikan rujukan bagi penemuan dasar filosofis pengembangan bangun akuntansi syari'ah, yang dapat diterapkan pada lembaga-lembaga atau organisasi keuangan Islam.

Tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, MA, selaku rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti jenjang pendidikan Pascasarjana Magister Studi Islam.
2. Bapak Dr. Imam Syafi'ie, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., Ak. Ph.D. atas segala bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
4. Istri dan anakku Aisar Muhammad Akram yang telah melapangkan dada mengorbankan waktu selama penulis menempuh program Magister Studi Islam.
5. Bapak Yulianto Pudjiwinarno dan rekan-rekan di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal baiknya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 4 Januari 1999

Penulis



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Metode Penelitian	9
1. Tahap Penelitian	10
2. Metode Pengumpulan Data	16
3. Bahan yang Dipakai	17
4. Alat-alat Perlengkapan yang Digunakan	17
5. Teknik dan Model Analisis	18
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AL-QUR'AN DAN AL-MUHASABAH (AKUNTANSI)	21
A. Pendahuluan	21
B. Akuntansi dalam Kehidupan Manusia sebagai Khalifah	21

	C. Hisab atau Muhasabah	27
	D. Nash-nash al-Qur'an tentang Hisab atau Muhasabah	31
	E. Implikasi Nash-nash al-Qur'an dalam Akuntansi	38
BAB III	SEKILAS TENTANG AKUNTANSI BARAT	42
	A. Pendahuluan	42
	B. Perkembangan akuntansi Barat	42
	C. Akuntansi sebagai Teknologi Universal	52
	D. Aliran-aliran Akuntansi Barat	54
	E. Implikasi Teori dan Praktek Akuntansi dalam Laporan Keuangan	63
	F. Persoalan-persoalan dalam Akuntansi Barat	74
BAB IV	AKUNTANSI SYARI'AH : REFLEKSI AKUNTANSI SOSIAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN	76
	A. Pendahuluan	76
	B. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam	77
	C. Sistem Ekonomi Islam	89
	1. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam	98
	2. Sistematika Nilai Ekonomi Islam	101
	3. Filsafat Ekonomi Islam	104
	4. Nilai Dasar Ekonomi Islam	109
	5. Nilai Instrumental Ekonomi Islam	116
	6. Kata Akhir	127
	D. Teori Akuntansi Syari'ah	129
	E. Praktek Akuntansi Syari'ah	138
	F. Akuntansi Syari'ah : Akuntansi Berkiaskan (<i>metafora</i>) Zakat	142
	G. Bentuk Akuntansi Zakat	147
	1. Karakteristik Zakat	148
	2. Batasan-batasan (<i>nishab</i>) Zakat	150
	3. Penilaian Perhitungan Zakat dalam Akuntansi	152

	H. Akuntansi Berorientasi Sosial	159
	I. Akuntansi Pertanggungjawaban	166
BAB V	KESIMPULAN	170
	A. Kesimpulan	170
	B. Rekomendasi	171
	C. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan	172
	DAFTAR PUSTAKA	173



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Laporan Pendapatan Perusahaan XX	67
Tabel 2 :	Laporan Nilai Tambah Perusahaan XXX	158



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :	Model Analisis Data	19
Gambar 2 :	Sejarah Perkembangan Peradaban Manusia	45
Gambar 3 :	Tahap-tahap Pengambilan Keputusan	69
Gambar 4 :	Tahap Pengolahan Data	71
Gambar 5 :	Siklus Sistem Akuntansi Pokok	72
Gambar 6 :	Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialis, Islam dan Kapitalis	91
Gambar 7 :	Segitiga Hubungan antara Alam, Manusia dan Tuhan	103



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah cukup lama umat Islam secara umum, termasuk umat Islam Indonesia mengalami penyakit dualisme ekonomi-syari'ah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat ketidakmampuan umat (Islam) untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan syari'ah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan [melengkapi].¹ Kondisi tersebut terlihat, di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan pelaku bisnis yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama, karena memang tidak menguasai syari'ah, terlebih lagi menguasai fiqh muamalah secara mendalam. Di pihak lain kita menemukan, para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep *fiqh*, *ushul fiqh*, *ulumul qur'an*, dan disiplin ilmu Islam lainnya, tetapi mereka kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejala bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akibat keadaan ini, akhirnya terjadi semacam tendensi “biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka urusan dunia”.² Padahal Islam adalah agama dan risalah yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu memadukan dan mengendalikan urusan dunia dan akhirat sekaligus.

¹M. Syafi'i Antonio, "Faktor-faktor Determinasi Pembangunan Ekonomi Menurut Islam", *Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam*, Syari'ah Banking Institute, tanggal 5 Januari 1996, di Yogyakarta. 1996, Hal. 1.

²Muhamad, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah : Petunjuk Teoritis dan Praktis bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah, BMI, BPRS & BMT*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 1998, Hal. 1.

Khusus di Indonesia, pada awal tahun sembilan puluhan, keadaan telah menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik. Perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan syari'ah telah menunjukkan kecenderungan yang cukup menggembirakan. Sehingga pola bisnis yang diterapkan di masa-masa yang akan datang dimungkinkan lebih mengarah pada penerapan etika bisnis yang pernah terjadi di masa Rasulullah.

Dalam tradisi Islam, seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis, dibangun atas dasar Syari'ah. Syari'ah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.³ Bagi umat Islam, kegiatan bisnis (termasuk bisnis perbankan) tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika Syari'ah.

Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan bila, misalnya, bank Islam beroperasi berdasarkan pada nilai etika Syari'ah. Bahkan secara formal bank Islam membentuk suatu badan khusus dalam organisasinya. Badan ini bertugas memberikan pandangan dasar-dasar etika (atau pengawasan) Syari'ah bagi manajemen dalam menjalankan operasi bank [termasuk pencatatan dan pelaporan akuntansinya]. Badan tersebut dinamakan Dewan Pengawas Syari'ah yang berdiri secara tidak tergantung pada bagian bank lainnya (*independent*) di dalam organisasi bank.⁴

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, keberadaan dan kehadiran

³Iwan Triyuwono, "Organisasi, Akuntansi, dan Spiritualisme Islam", *Makalah Stadium General Mahasiswa Syari'ah Banking Institute Yogyakarta*, tanggal 28 September 1996, Hal. 10.

⁴*Ibid*, 1996, Hal. 11.

lembaga bisnis, seperti lembaga keuangan syariah adalah mutlak adanya. Sebab perbankan bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara unit penawaran (*supply*) dengan unit permintaan (*demand*). Disinilah diperlukan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di unit bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai (relevan). Sehubungan dengan itu, perlu pula adanya proses akuntansi. Proses akuntansi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga organisasi yang bersangkutan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap bentuk akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi adalah sebuah keutuhan (entitas [*entity*]) informasi yang tidak bebas nilai.

Sehubungan dengan hal di atas, Baswir menyatakan bahwa :

... munculnya kesan bahwa akuntansi juga memiliki kaitan dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan akuntansi seperti yang saat ini diajarkan pada jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia, ternyata sangat kuat dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh kapitalisme itu terutama tampak sangat nyata pada kuatnya pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan pendapatannya.⁵

Pendapat di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai, sistem dan filsafat ilmu akan turut menentukan model ilmu yang berkembang di suatu negara. Apabila suatu

⁵Revrison Baswir, "Akuntansi dan Ideologi", *Kertas Kerja pada Seminar Nasional Harteknas*, Yogyakarta tanggal 27 Desember 1996, Hal. 9.

negara menganut sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, apabila suatu negara mengikuti sistem ekonomi Islam maka upaya yang harus dikembangkan adalah sistem akuntansi Islam (Syari'ah).

Disadari bahwa anggapan terhadap keberadaan akuntansi Syari'ah (Islam) masih banyak dipertanyakan orang. Sama halnya pada saat orang mempertanyakan keberadaan sistem Ekonomi Islam. Lahirnya akuntansi Syari'ah adalah setelah adanya anggapan kurang yakin terhadap keberadaan akuntansi konvensional sebagai ilmu pengetahuan dan pelaksanaannya dalam kaitannya dengan persoalan nilai dalam akuntansi.

Anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai (*value-free*) pada akhir tahun 1970-an sudah mulai digoyang keberadaannya.⁶ Anggapan tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi. Ciri utama dari era informasi dan globalisasi adalah adanya kecenderungan untuk melakukan harmonisasi sesuatu. Misalnya, dalam hal pengetahuan dan praktik akuntansi, maka upaya harmonisasi praktik-praktik akuntansi dijalankan. Hal ini berarti adanya kehendak untuk memberlakukan praktik-praktik tertentu, termasuk praktik akuntansi secara seragam.

Mempelajari dan menerapkan akuntansi Syari'ah – atau pada akuntansi pada umumnya -- pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip

⁶Triuwono Iwan, *Opcit*, 1996, Hal. 12.

keseimbangan (*balance*) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi sosio-ekonomi, serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Triyuwono menyatakan bahwa akuntansi syari'ah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan sarat nilai.⁷ Lebih rinci Triyuwono dan Gaffikin menyatakan, bahwa :

*... The fundamental aim of the shari'ate accounting knowledge is not only to reflect ethical reality in an "accurate" manner, but also to guide the creation of reality which is based on the Shari'ate values. This sort of reality is unique as it is the one which binds individuals to divine networks" (divine social laws) which also brings about self-consciousness of the individuals to worship only God through obeying or living harmoniously with the divine networks. This means that the Shari'ate accounting knowledge consists of value which attempt to emancipate individuals from a false reality, that is the reality which may enslave the individuals or may make them far from their real nature as vicegerent of God on earth (khalifatullah fil ardh) whose duty is to disseminate mercy for all creatures in the form of worship.*⁸

Fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Oleh karena itu, seluruh upaya yang dilakukan oleh manusia harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau harus berorientasi sosial. Demikian pula upaya kita untuk mengembangkan akuntansi syari'ah. Akuntansi harus berkembang dengan menjawab kebutuhan masyarakat.⁹ Lebih lanjut Gilling menjelaskan situasi akuntansi yang

⁷ *Ibid*, 1996, Hal. 10.

⁸Iwan Triyuwono and M.J.R. Gaffikin, 1996, "Shari'ate Accounting : An Ethical Construction of Accounting Knowledge" *The Fourth Critical Perspectives on Accounting Symposium*, 26-28 April 1996, New York City, 1996, Hal. 20.

⁹Clark E. Chastain, "Accounting and Society : A Behavioral View," *International Journal of Accounting, Education and Research*, Vol. 8, No. 2 (Spring 1973), 1993, Hal. 1.

intinya sebagai berikut :

Dari suatu alat mekanis yang [dulunya] diterapkan pada kegiatan bisnis, akuntansi berkembang menjadi media yang sangat penting untuk mengungkapkan fakta-fakta penting tentang [keadaan] masyarakat modern yang serba kompleks di mana kita hidup. [Akhirnya] akuntansi merupakan upaya pencatatan dan pelaporan informasi yang digunakan oleh pemilik dan pemegang saham, investor [sebagai alat] pengawasan, sebab pihak-pihak tersebut tidak secara langsung mengetahui kondisi dan kegiatan perusahaan.¹⁰

Kutipan di atas bermakna bahwa tujuan dari akuntansi tidak lagi membuat pertanggungjawaban yang jelas bagi pemilik perusahaan tetapi juga untuk menjadikan perusahaan tetap hidup (*survive*). Di pihak lain akuntansi telah menjadi alat ukur untuk mengetahui keuntungan perusahaan yang berbeda dari keuntungan sosial. Sementara, Chastin menyatakan, bahwa "masyarakat mengharapkan agar perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM), bahan, dan dana untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikan hasilnya kepada para penyumbang modal".¹¹ Namun, sampai saat ini belum dikembangkan metode pelaporan kemajuan masyarakat secara utuh dan sesuai dengan syari'ah.

Islam melalui al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis atau pembuatan laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282. Disamping itu, akuntansi Syari'ah harus berorientasi sosial. Hal ini berarti, bahwa akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk

¹⁰D.M. Gilling, "Accounting and Social Change," *International Journal of Accounting, Education and Research*, Vol. 1, No.2 (Spring 1976), 1996, Hal. 59.

¹¹Clark E. Chastain, *Opcit*, 1993, Hal. 2.

menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode untuk menjelaskan tentang bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat [Islam].

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah, bahwa pada akhir tahun 1970-an telah mengalami perubahan-perubahan besar terhadap keberadaan ilmu akuntansi menuju proses harmonisasi penerapan akuntansi. Islam sebagai suatu agama yang memiliki ajaran menyeluruh, tentu saja tidak tinggal diam dalam membangun paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Disamping itu, di dalam unit bisnis aspek yang cukup penting perannya adalah akuntansi. Mengapa? Sebab akuntansi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga organisasi yang bersangkutan.

Di sisi lain, keberadaan akuntansi di dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap bentuk akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi adalah sebuah keutuhan (entitas [*entity*]) informasi yang tidak bebas nilai.

Dengan demikian, lahirnya sistem ekonomi Islam secara langsung akan mempengaruhi bentuk dan bangun sistem akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, apakah akuntansi itu merupakan pengetahuan dan praktik

yang banyak ditentukan oleh lingkungannya? Atau apakah akuntansi adalah “anak” yang lahir dari budaya setempat (lokal)? Benarkah sistem ekonomi Islam akan mengantarkan lahirnya sistem akuntansi Islam atau akuntansi syari’ah? Jika akan melahirkan akuntansi syari’ah, apakah hakekat akuntansi syari’ah dilihat dari perspektif sosialnya dan pertanggungjawabannya; bagaimanakan bangun model akuntansi syari’ah yang sesuai dengan karakter masyarakat pada umumnya? Jika tidak melahirkan akuntansi syari’ah, apakah sistem akuntansi yang selama ini berlaku (akuntansi konvensional) dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Dan masih banyak lagi pertanyaan mendasar lainnya yang akan muncul.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka pokok masalah penelitian ini dibatasi pada : (1) Hakikat akuntansi syari’ah ditinjau dari aspek atau perspektif akuntansi sosial dan pertanggungjawaban; (2) Lingkungan mana yang mempengaruhi lahirnya bangunan pengetahuan dan praktik akuntansi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka problematikan tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hakekat akuntansi syari'ah dilihat dari perspektif akuntansi sosial dan pertanggungjawaban ?
2. Apakah akuntansi itu merupakan suatu bentuk pengetahuan dan praktik yang banyak ditentukan oleh lingkungannya (*non value-free*), atau dengan kata lain,

apakah akuntansi adalah "anak" yang lahir dari budaya setempat (lokal) ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji :

1. Hakekat akuntansi syari'ah dilihat dari perspektif akuntansi sosial dan pertanggungjawaban.
2. Akuntansi sebagai suatu bentuk pengetahuan dan praktik yang banyak ditentukan oleh lingkungannya (*non value-free*), atau dengan kata lain akuntansi merupakan "anak" yang lahir dari budaya setempat (lokal).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka nilai kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki implikasi untuk :

1. Menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya dan pelaku bisnis Islami dalam melakukan pencatatan transaksi yang telah dilakukan selama menjalankan kegiatan bisnis.
2. Menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan kias (*metafora*) akuntansi yang sesuai dengan karakter masyarakat Islam.

G. Metode Penelitian

Berpijak pada urgensi dan kegunaan penelitian ini, maka upaya rasional, penentuan kebenaran hakikat dan eksistensi akuntansi tersebut perlu diteliti dengan

metode penelitian yang tepat. Ketepatan metode penelitian tersebut akan tercermin pada tahap-tahap penelitian yang dilalui.

1. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan rasionalitas dan kebenaran hakikat, pengetahuan dan praktik akuntansi, maka kajian teori kritis akan digunakan, yang penerapannya dilakukan melalui dua tahapan, yaitu : tahap deskriptif dan tahap evaluatif/kritik. Kedua tahap kajian ini masing-masing menggunakan metode yang berbeda, sesuai dengan esensi permasalahan penelitian ini.

a) Tahap Deskriptif

Tahap deskriptif adalah tahap penyajian data yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Tahap deskriptif adalah tahap untuk mengetahui hakikat sesuatu. Untuk itu, kajian selanjutnya akan dikombinasikan dengan kerangka dasar filsafat ilmu. Pendekatan fenomenologi yang dikemukakan oleh Husserl (1859) menyatakan, bahwa tujuan fenomenologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, tidak dengan cara induksi melainkan dengan melalui intuisi, yaitu mengarahkan perhatian pada fenomena yang ada dalam kesadaran.¹² Selanjutnya Husserl berpendapat,

untuk menemukan hakekat sesuatu peneliti harus menyingkirkan prasangka, selanjutnya melakukan *ideation* atau membuat ide yang disebut reduksi, tetapi tidak lagi fenomenologis melainkan *eidethis*, yaitu penyaringan untuk mendapatkan hakikat sesuatu. Selanjutnya reduksi transendental, yaitu penerapan metode fenomenologi pada subyeknya sendiri, yang akhirnya bersifat idealisme transendental, yaitu pengakuan akan adanya kesadaran transendental yang mengatasi kesadaran individual.¹³

¹²Dalam Endang Daruni Asdi dan A. Husnan Aksa, *Filsuf-filsuf Dunia dalam Gambar*. (Yogyakarta : Karya Kencana), 1982, Hal. 117.

¹³*Ibid*, 1982, Hal. 118

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan esensi istilah-istilah dalam mengungkapkan konsep akuntansi dalam al-Qur'an secara obyektif. Pada tahap reduksi penulis mengarahkan pada pokok-pokok masalah yang telah diajukan dengan menggunakan kerangka dasar filsafat ilmu. Berpijak dari filsafat ilmu inilah, maka kerangka bangun hakekat akuntansi syariah dapat dilihat dari sisi : ontologi; epistemologi, metodologi dan aksiologi, sehingga sasaran dan orientasi bangun akuntansi syariah dapat terwujud. Dimaksud dengan bangun akuntansi syariah tersebut diantaranya adalah bangun akuntansi yang merefleksikan dimensi sosial dan pertanggungjawaban.

Ontologi menyangkut tentang hakekat apa yang dikaji atau *science of being qua being*.¹⁴ Epistemologi adalah berkaitan dengan bagaimana cara ilmu pengetahuan melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya atau studi filsafat yang membahas ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan.¹⁵ Metodologi digunakan untuk menguji metode-metode yang digunakan atau yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang valid.¹⁶ Sementara aksiologi adalah tiang penyangga filsafat ilmu yang berkaitan dengan kegunaan ilmu yang telah tersusun itu dipergunakan atau *theory of value*.¹⁷

¹⁴Ervin Laszlo, *Introduction to System Philosophy*. (New York : Sciece Publishers, Inc), 1971, Hal. 143.

¹⁵Dalam Iman Syafi'ie, "Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik). **Desertasi**. (Yogyakarta : PPS. IAIN Sunan Kalijaga), 1998, Hal. .

¹⁶M.J.R. Gaffikin, *Accounting Methodology and The Work of R.J. Chambers*. (New York : Garland Publishing, Inc.), 1998, Hal. 2.

¹⁷Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy*. (New Jersey : Littlefield, Adams & Co.), 1976, Hal. 32.

Berdasarkan tiga sisi tersebut selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap esensi ilmu pengetahuan. Walaupun harus disadari bahwa sebagai bahan untuk mengkaji Akuntansi Syari'ah (Islam) maka jalan terbaik yang ditempuh adalah mempelajari Akuntansi Barat yang sudah demikian mapan dan berkembang, bahkan telah dianut baik oleh masyarakat Barat maupun masyarakat muslim.¹⁸

Suatu badan usaha/organisasi/lembaga baik yang bertujuan mencari laba maupun nirlaba (*non-profit*) membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Pada sisi inilah akuntansi berperan. Akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya. Akuntansi akan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu : Perencanaan; Pengorganisasian; Pengarahan; dan Pengawasan.¹⁹

Fungsi-fungsi tersebut merupakan fenomena yang akan menjadi kajian keilmuan, terutama yang berkaitan dengan hakekat dari sudut pandang syari'ah Islam. Kesesuaian antara fenomena yang terjadi dengan apa yang telah digariskan dalam sistem-Nya, yaitu ayat-ayat al-Qur'an. Dari sinilah akan dapat ditemukan hakikat ilmu yang sebenarnya, baik dari sisi pengertian, cara memperoleh dan kegunaan bagi masyarakat Islam pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Hadjisarosa menyatakan "sesuatu [ekonomi/akuntansi] menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syari'ah setelah dikenali secara benar dan utuh, dengan catatan, benar dan utuh menurut Hukum-hukum Ketetapan-Nya

¹⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara), 1997, Hal. 24.

¹⁹*Ibid*, Hal. 25.

(*sunatullah*).²⁰

b) Tahap Evaluatif

Metode yang digunakan pada tahap evaluatif adalah metode analitik kritis-rasional. Metode ini diterapkan mengingat pada tahap ini dilakukan upaya membandingkan konsep Akuntansi Barat dengan konsep Akuntansi Syari'ah. Seperti halnya dalam upaya mengkaji atau membangun teori sosial, termasuk teori akuntansi, maka proses berfikir analisis : kritis dan rasional sangat dituntut. Dalam penelitian akuntansi, pendekatan kritis (*critical studies*) merupakan salah satu pendekatan yang disarankan untuk diterapkan. Banyak istilah yang disarankan, sebagaimana diungkapkan oleh Lodh, bahwa : “*There are many labels for ‘critical accounting’ or ‘critical studies in accounting research’*”.²¹ Sebagai contoh, MacIntosh menggunakan istilah *critical accounting movement*²², Cooper & Hopper menggunakan istilah *critical accounting*²³ walaupun sebelumnya mereka menggunakan istilah *critical studies*. Sementara Neimark and Tinker memakai istilah *critical accounting literature*²⁴. Kemudian Laughlin menggunakan istilah *critical theory*²⁵ yang

²⁰Hadjisarosa, Poernomosidi, 1997, "Nasakah Ringkas mengenai : Mengenali Ekonomi Syari'ah dengan Menempuh Pendekatan Sistem (Bagian Pertama) dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah yang Semestinya Berlangsung di Indonesia (Bagian Kedua)", **Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah**, Yogyakarta, tanggal 18 - 21 Agustus 1997, Hal. 4.

²¹Sudhir C. Lodh, “Critical Studies in Accounting Research, Rationality and Habermas : A Methodological Reflection”, **Paper** to be Presented at the Fourth CPA Conference. New York City, 26-28 April 1996, Hal. 3.

²²N.B. MacIntosh, “Deconstructionism and Critical Accounting”. **Paper** Presented at The Second Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference at the University of Manchester (July 1988), Hal. .

²³dalam Sudhir C. Lodh, *Opcit*, 1996, Hal. 3.

digunakan untuk memaknai istilah *critical sosial theory* khususnya teori kritis yang berasal dari German.

Istilah-istilah yang disampaikan di atas, mengandung perbedaan terminologi jika akan diterapkan pada kajian teori akuntansi dan penelitian akuntansi. *Critical studies is used as the general umbrella concept of this research school, it is possible to question the ultimate concern of critical studies in accounting.*²⁶ Jenis inilah yang menentang epistemologi aliran positivistik, sehingga Cooper dan Hopper beragumen, bahwa :

... *it is a concern with accessing the significance of accounting as a set of everyday practices and as a series of theoretical discourses central to studies in accounting*".²⁷

Akan tetapi apabila peneliti akan memahami praktek dan teori akuntansi, maka istilah yang digunakan adalah *critical studies in accounting*.²⁸ Menurut Laughlin, Hopper dan Miller menyatakan bahwa *critical study* ini digunakan : "*to identify the document the role that sectional interests play in accounting*".²⁹ Lebih jauh dalam mengantarkan antologi *critical papers*, Cooper dan Hopper menyatakan :

... *critical accounting arose both as an expression of attempts by scholars*

²⁴M. Neimark and Tinker, *The Social Construction of Management Control System*. New York : Prentice-Hall. 1996, Hal.

²⁵R.CLaughlin, *Accounting System in Organization Theory : A Case for Critical Theory, Accounting, Organization and Society*, 1987, Hal. 235.

²⁶Sudhir C. Lodh, *Loc.Cit*, 1996, Hal. 3.

²⁷D.J. Cooper dan T.M. Hopper, "Critical Studies in Accounting", *Accounting Organization and Society*. (New York : Prentice-Hall International, Inc.), 1987, Hal. 411.

²⁸Sudhir C. Lodh, *Op.Cit*, 1996, Hal. 3.

²⁹R.C. Laughlin, , T. Hopper & P. Miller. 1989. "Contextual Studies of Accounting and Auditing : An Introduction", *Accounting, Auditing and Accountability. Journal*, 1989, Hal. 4.

*within accounting to apply fresh, typically nonfunctionalist, theoretical insights into the effects of accounting within organisations and society”.*³⁰

Sehubungan dengan perkembangan sistem ekonomi baru, yaitu sistem ekonomi Islam, tentu saja kondisi ini menuntut relevansi seluruh instrumen, model, sistem dan paradigma akuntansi. Dengan kata lain, kondisi ini harus dibarengi dengan munculnya keterbukaan dan kesadaran para ilmuwan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu baru yang sesuai dengan disiplin yang ada. Oleh karena itu, Cooper dan Hopper menyatakan bahwa :

*... critical accounting is critical of conventional accounting theory and practice and, through critical social science theory, it seeks to explain how the current state of accounting has come about”.*³¹

Pernyataan ini menandakan betapa pentingnya *critical theory* dalam rangka membangun suatu teori baru yang sesuai (relevan) dengan perkembangan masyarakat. Bagaimana kerangka kerja yang akan ditempuh apabila kita menggunakan pendekatan *critical theory*? Pada tataran lebih luas, menurut Lodh disarankan, bahwa :

*... an accounting researcher can ask : what, how and why accounting rationale has become purposive, is being used, is to be used, and what are the means for doing so in a particular context?*³²

Melalui pendekatan *critical theory* kita akan melihat suatu teori itu bukan saja terletak pada upaya menempatkan ideologi sebagai ‘bentuk pemikiran’ akan tetapi juga akan mencoba mengkaji tentang bagaimana kondisi sosial, seperti sistem akuntansi yang dikembangkan oleh kaum kapitalis, terpenuhinya kepuasan kebutuhan

³⁰D.J. Cooper dan T.M. Hopper, *Loc.Cit.*, 1990, Hal. 1

³¹*Ibid*, 1990, Hal. 2

³²Sudhir C. Lodh, *Loc.Cit.*, 1996, Hal. 7.

hidup, dan kebebasan diri dari kondisi sosial masyarakat yang rentan.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui pendekatan *critical theory* ini akan mampu menemukan kerangka rasional hakikat dan penerapan teori akuntansi yang lebih sesuai dengan budaya lokal Islam, yang sarat dengan nilai. Dengan kata lain, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini harus dimapankan sebagai : *a process which can be used for analysing and changing the nature of any accounting system, and its social context, of any particular organisation*".³⁴ Artinya, suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengubah hakikat sistem akuntansi dalam hubungannya dengan kondisi sosial atau organisasi tertentu.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah berupa pernyataan-pernyataan ahli yang relevan. Dengan demikian teknik pengambilan sampel data adalah dengan *purposive sampling/data*, yang selanjutnya didukung dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini menurut Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip Syafi'ie dimaksudkan untuk pengambilan sampel internal (*internal sampling*).³⁵ *Internal sampling* yaitu keputusan yang diambil, begitu peneliti memiliki suatu pikiran umum tentang jumlah dokumen serta macamnya yang akan dikaji, dengan siapa akan berbicara,

³³M. Alvesson, *Organization Theory and Technocratic Consciousness : Rationality, Ideology and Quality of Work*. (New York : De Gruyter), 1987, Hal. 150.

³⁴R.C. Laughlin, *Accounting System in Organization Theory : A Case for Critical Theory, Accounting, Organization and Society*., 1987, Hal. 489.

dan kapan akan melakukan observasi.

Penggalian data primer mula-mula dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan istilah perhitungan (*hisab*), keseimbangan, pertanggungjawaban, kemudian membuat *outline* dalam rangka menentukan ayat-ayat yang secara langsung berkaitan dengan ayat-ayat yang tidak secara langsung mengungkap tentang hisab, yang dalam penggaliannya menggunakan teknik dokumentasi murni. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan mencari pokok-pokok pikiran yang ditulis oleh para pemikir atau ilmuwan yang telah ditulis dalam buku-buku terutama yang berkaitan dengan tema sentral yang telah diajukan, dalam rangka menemukan esensi tentang konsep akuntansi.

3. Bahan yang Dipakai

Bahan pokok yang dipakai untuk menemukan data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Qur'an yang telah diterbitkan oleh penerbit tertentu yang telah disahkan oleh yang berwenang dan dapat dipertanggung-jawabkan baik secara hukum maupun kesahihannya. Sedangkan bahan yang digunakan untuk menemukan data sekunder adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan tema yang telah dipilih.

4. Alat-alat Perlengkapan yang Digunakan

Untuk melacak istilah-istilah al-Qur'an yang berkaitan dengan akuntansi syari'ah digunakan buku Indeks al-Qur'an dan komputer al-Qur'an. Dengan alat ini

³⁵Imam Syafi'ie, *Loc. Cit*, 1998. Hal. 26.

diharapkan dapat ditemukan dengan cepat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini.

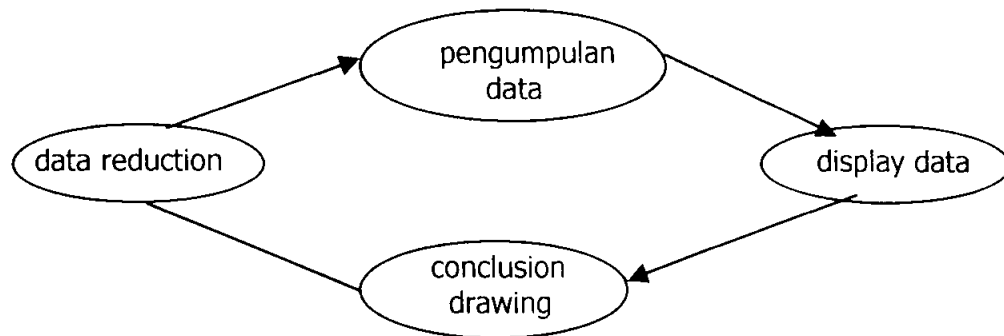
5. Teknik dan Model Analisis

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya ada tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti, yaitu : data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing* (Miles & Huberman, 1984; Sutopo, 1988).³⁶ Tiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling mendukung. Sehubungan dengan permasalahan akuntansi maka Gaffikin menyarankan empat tahapan yang harus dilalui oleh peneliti dalam menerapkan metodologi analisis. Keempat tahapan tersebut adalah : *Logical, Environmental, Ideological dan Linguistic*.³⁷ Masing-masing tahapan tersebut saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keberhasilan konstruksi teori ini akan menemukan kecocokan kriteria pada semua bidang.

Hubungan tiga komponen tersebut menunjukkan siklus yang berkaitan atau berinteraksi. Untuk lebih jelasnya model hubungan atau interaksi komponen adalah sebagai berikut :

³⁶ *Ibid*, 1998, Hal. 28.

³⁷ M.J.R. Gaffikin, *Accounting Methodology and The Work of R.J. Chambers*. (New York : Garland Publishing, Inc.), 1989, Hal. 119.



Gambar 2 : Model Analisis Data

Model di atas berarti, bahwa data (berupa konsep, dan teori) yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dipilih dan dikumpulkan, kemudian dipaparkan menjadi rumusan baru. Pemaparan atas teori yang relevan, kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan teori baru.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dikembangkan ke dalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, membahas pendahuluan. Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang timbulnya masalah penelitian, Identifikasi masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya. Sebab dari bab pertama ini telah ditemukan permasalahan-permasalahan pokok dalam penelitian. Hubungan bab pertama dengan bab kedua adalah sebagai pijakan untuk memasuki kajian istilah al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah akuntansi.

Bab Kedua, adalah Al-Qur'an dan Al-Muhasabah (Akuntansi). Di dalam bab kedua ini dibahas mengenai : Pendahuluan; Akuntansi dalam Kehidupan Manusia sebagai Khalifah; Hisab atau Muhasabah; Nash-nash al-Qur'an tentang Hisab atau Muhasabah; Implikasi Nash-

nash al-Qur'an dalam Akuntansi. Kaitan antara bab kedua dengan bab berikutnya adalah bahwa di dalam al-Qur'an telah disuratkan perintah menjalankan akuntansi dan kehidupan manusia pada hakikatnya adalah suatu proses akuntansi.

Bab Ketiga, adalah Gambaran Sekilas tentang Akuntansi Barat. Bab ini mengupas tentang : Pendahuluan; Perkembangan akuntansi; Akuntansi sebagai Teknologi Universal; Aliran-aliran Akuntansi Barat; Implikasi Teori dan Praktek Akuntansi dalam Laporan Keuangan; Persoalan-persoalan dalam Akuntansi Barat; Kaitan bab ketiga dengan bab berikutnya adalah bahwa di dalam perkembangannya, akuntansi barat menghadapi persoalan dalam perkembangannya. Terlebih lagi jika ajaran agama menjadi bagian penting dalam proses bangun suatu teori. Dengan demikian, perlu adanya upaya refleksi atas teori akuntansi barat menuju akuntansi syari'ah.

Bab Keempat, adalah Akuntansi Syari'ah : Refleksi Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban. Bab ini membahas : Pendahuluan; Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam; Sistem Ekonomi Islam; Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam; Sistematika Nilai Ekonomi Islam; Filsafat Ekonomi Islam; Nilai Dasar Ekonomi Islam; Nilai Instrumental Ekonomi Islam; Teori Akuntansi Syari'ah; Praktek Akuntansi Syari'ah; Akuntansi Berorientasi Sosial; Akuntansi Pertanggungjawaban. Berangkat dari uraian bab keempat ini kemudian dibuat kesimpulan kajian masalah tesis ini.

Bab Kelima, adalah Kesimpulan. Bab ini membahas tentang : Kesimpulan; Saran dan Rekomendasi. Demikian sistematika pembahasan tesis ini, pembahasan untuk bab-bab berikutnya dikembangkan dari kerangka sistematika di atas.

BAB II

AL-QUR'AN DAN AL-MUHASABAH (AKUNTANSI)

A. Pendahuluan

Bab ini menguraikan nash-nash al-Qur'an yang berkaitan dengan perlakuan hisab (*muhasabah*) Allah kepada seluruh umat manusia. Hisab (*muhasabah*) sebagai suatu wujud perhitungan (proses akuntansi) Allah mengenai amal perbuatan manusia. Keadaan ini menggambarkan, bahwa didalam kehidupan manusia selalu berlaku proses akuntansi. Dengan demikian, tujuan dan peran bab ini merupakan upaya rasionalisasi nash-nash al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip yang mendasari praktek akuntansi syari'ah.

Untuk mencapai tujuan di atas, bab ini akan membahas topik-topik sebagai berikut : Akuntansi dalam Kehidupan Manusia sebagai Khalifah; Hisab atau *Muhasabah*; Nash-nash al-Qur'an tentang Hisab dan *Muhasabah*; dan Implikasi Nash-nash al-Qur'an dalam Akuntansi.

B. Akuntansi dalam Kehidupan Manusia sebagai Khalifah

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang telah menjadi sumber hukum dalam mengatur kehidupan umat manusia. Al-Qur'an adalah sumber nilai. Agama pada umumnya, dan Islam pada khususnya, adalah sebuah konstruksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut kemudian disusun oleh para ulama dari waktu ke waktu, yang kemudian dijadikan pedoman perilaku kehidupan. Menurut Rahardjo, "pelaksanaan agama tersebut, secara disengaja atau tidak, membentuk dan mempengaruhi perkembangan Islam sebagai

masyarakat, kebudayaan dan peradaban”.¹ Berkenaan dengan ini, maka upaya untuk menafsirkan al-Qur’an terhadap perkembangan dunia dan masyarakat sangat diperlukan.

Rancang bangun masa depan kaum Muslimin dapat diraih melalui penafsiran terhadap al-Qur’an yang senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Kaum Muslimin berkeyakinan bahwa al-Qur’an, sebagai wahyu Allah itu merupakan rahmat dan petunjuk bagi segenap bangsa yang berlaku sepanjang waktu dan di semua tempat. Apabila dewasa ini kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Muslim telah berubah, maka nilai-nilai potensial al-Qur’an yang sejalan dengan fitrah manusia akan selalu relevan dengan perubahan masyarakat. Dengan demikian seluruh permasalahan hidup manusia akan dapat dijawab oleh nilai-nilai al-Qur’an.

Oleh karena itu, kajian terhadap berbagai bidang kehidupan harus dirujuk kepada nilai-nilai yang ada dalam al-Qur’an. Baik itu bidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, termasuk di dalamnya adalah instrumen-instrumen bidang tersebut, seperti : manajemen, akuntansi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat rancang bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjisarosa bahwa "sesuatu [ekonomi/akuntansi] menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syari'ah setelah dikenali secara benar dan utuh, dengan catatan, benar dan utuh menurut Hukum-hukum Ketetapan-Nya (*sunatullah*)”.² Dengan demikian, bangunan akuntansi syari'ah

¹M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta : Paramadina), 1996, Hal. 3.

²Poernomosidi Hadjisarosa, "Nasakah Ringkas mengenai : Mengenal Ekonomi Syari'ah dengan Menempuh Pendekatan Sistem (Bagian Pertama) dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah yang Semestinya Berlangsung di Indonesia (Bagian Kedua)", *Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah*, Yogyakarta, tanggal 18 - 21 Agustus 1997, Hal. 4.

dapat terwujud apabila, kita sebagai umat Islam mampu mengkaji al-Qur'an dan menurunkannya ke dalam praktek keseharian.

Sehubungan dengan hal di atas, bahwa hidup manusia berada dalam dua posisi perilaku, yaitu : pasif dan aktif. Pasif berarti bahwa manusia akan selalu menerima kodrat apa yang telah digariskan oleh Allah. Sedangkan aktif berarti bahwa manusia harus selalu berikhtiar dalam menjalani hidup untuk mencapai kemenangan (*falah*) di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tatkala kita hidup di alam rahim, sama sekali kita tidak berfikir dan melakukan usaha untuk mencari sekaligus mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Sebab, hidup di dunia ini merupakan nasib pemberian Allah. Walaupun begitu, kita diwajibkan untuk berikhtiar sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah, yaitu melalui ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini penting, sebab nasib hidup manusia sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Nasib hidup di dunia harus diupayakan, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di akhirat yang kekal abadi. Kita semua diberikan hak dan kesempatan untuk mencapainya. Hal ini dapat dicapai apabila manusia mengikuti petunjuk-Nya, namun sebaliknya apabila manusia ingkar kepada-Nya, maka siksa Allah yang ditimpakan kepada manusia lebih pedih.

Berkaitan dengan persoalan nasib hidup di dunia maupun pencapaian kesejahteraan hidup di akhirat yang kekal abadi, Allah telah mengingatkan kepada seluruh umat manusia, sebagaimana tersebut dalam firman Allah sebagai berikut :

*“Dan carilah (usaha untuk mencapai kesejahteraan) di akhirat dengan kesejahteraan yang telah diberikan Allah kepadamu, tetapi jangan melupakan (usaha untuk menerima) nasib baikmu di dunia. Dan berbuatlah kebaikan, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu, serta janganlah mencari (berbuat) kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan”.*³

³QS. Al-Qashash (28) : 77

Selanjutnya firman Allah menyatakan sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam (dengan mematuhi semua tuntunan Islam dan menjauhi semua larangan-Nya) secara utuh⁴, karena sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata”.*⁵

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat harus dicapai sesuai dengan petunjuk Allah yang disebut Agama Islam. Hal itu, karena semua anugerah maupun semua tindakan kita pasti dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁶ Hal ini berarti, orang yang berbuat sesuai petunjuk Allah akan mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebaliknya orang yang berbuat dosa atau dhalim akan mendapatkan hukuman dari Allah. Seluruh pahala maupun dosa adalah hasil perbuatan manusia, sebab Allah tidak mungkin berbuat dhalim, tetapi manusia sendirilah yang sering berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain bahkan dhalim kepada Allah. Oleh karena itu mau tidak mau, semua tingkah laku dan perbuatan manusia dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi haruslah berlandaskan syari'ah agama Islam. Artinya perilaku ekonomi kita haruslah Islami.

Seluruh amal perbuatan manusia sejak lahir sampai mati akan selalu dicatat oleh malaikat Allah, yaitu Malaikat Rakib di sebelah kanan manusia dan Malaikat Atid di sebelah kiri manusia. Ditegaskan dalam firman Allah :

Yaitu ada Malaikat yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu, mereka mengetahui apa yang kamu

⁴Secara utuh mengandung pengertian bahwa semua tingkah laku hidup manusia yang Islami harus diterapkan pada seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi berikut instrumen-instrumennya, seperti manajemen, akuntansi dsb..

⁵QS. Al-Baqarah (2) : 208

⁶QS. Al-Isra' (17) : 36

*kerjakan.*⁷

Kedua Malaikat itulah yang mencatat amal perbuatan manusia selama hidupnya, yang tidak satupun perbuatan atau amal manusia terlewatkan pencatatannya, apakah itu berupa amal kebaikan atau amal buruk. Firman Allah menegaskan :

*(Ingatlah) ketika mencatat dua (malaikat) yang mencatat, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tidaklah diucapkan suatu perkataan melainkan ada di sisinya (Malaikat) pengawas yang hadir”.*⁸

Catatan amal manusia oleh dua malaikat tersebut akan dijadikan bahan pertanggungjawaban manusia kepada Allah pada hari Akhirat atau Penghisaban/ Pengadilan (Hari Perhitungan Amal Manusia). Pada saat inilah manusia akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan amal perbuatan selama masa hidupnya.

Mempercayai hari Pembalasan adalah salah satu dari rukun iman yang lima, yaitu iman kepada Hari Akhir. Pada hari itu manusia akan datang kepada Tuhannya, dan Allah akan menghisabnya. Ditegaskan dalam firman-Nya :

*Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang pada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.*⁹

Pengadilan Allah akan dilakukan kepada semua manusia. Pada saat Hari Pengadilan inilah pengadilan yang seadil-adilnya terjadi. Dinyatakan oleh Kuroda dalam “*The Mizan of Act,*” *Maydan* Vol 14. bahwa :

Situasi yang maha adil, yaitu mahkamah Allah akan ada di akhirat, dan dunia ini adalah tempat untuk menentukan nasib seseorang di akhirat nanti. Di dunia ini seseorang harus berupaya agar segala amalnya akan bermanfaat baginya di

⁷QS. Al-Infithaar (82) : 10-12.

⁸QS. Qaaf (50) : 17-18.

⁹QS. Maryam (19) : 93-95.

akhirat. Pada hari pembalasan semua perbuatan baik dan jelek akan ditimbang (mizan) dan dinilai melalui suatu ukuran berdasarkan nilai Islam.¹⁰

Mizan adalah timbangan Allah untuk mengukur kadar baik buruknya amal manusia selama hidupnya. Ditegaskan dalam firman Allah :

Dan Kami adakan neraca-neraca (timbangan) yang adil pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan diri seseorang sedikitpun. Dan jika ada (amal) seberat biji sawi, niscaya Kami mendatangkan (balasan)nya. Dan cukuplah Kami yang memperhitungkan mereka.¹¹

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Allah berkaitan dengan untung ruginya manusia selama menjalankan hidup di dunia, bahwa :

Dan neraca pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barang siapa yang berat timbangan (kebaikannya), maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang ringan timbangan (kebaikannya), maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu berlaku dhalim terhadap ayat-ayat Kami.¹²

Orang yang beriman dan beramal baik selama hidupnya, pada masa hisab (*mizan*) akan menerima catatan atau laporan keberuntungannya dengan tangan kanan, sedangkan orang yang amal perbuatannya selama hidup di dunia tidak baik atau bahkan ia kafir kepada Allah, ia akan menerima catatan atau laporannya dengan tangan kiri. Pada saat penyerahan buku catatan kepada orang-orang yang berbuat baik, maka berkata Allah : “Ambillah, bacalah kitabmu ini!”¹³ Pada ayat lain, Allah memerintahkan : *Bacalah bukumu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menghitung (amal)mu.¹⁴* Hal demikian

¹⁰Miyoko Kuroda, “A Balance of Deeds in Islam”, *Maydan. Vol. 14*. (Niigata : The Institute of Middle Eastern Studies. International University of Japan), 1988, Hal. 7.

¹¹QS. Al-Anbiya (21) : 47.

¹²QS. Al-A'raaf (7) : 89.

¹³QS. Al-Haaqqah (60) : 19.

¹⁴ QS. Al-Israa' (17) : 14.

inilah yang disebut dengan *muhasaba 'an al-a'mal*.

Demikian gambaran perhitungan (hisab atau akuntansi) Allah yang dikenakan kepada manusia dalam menjalankan transaksi kehidupan. Kehidupan adalah sebagai amanah Allah yang harus dijalankan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"*.¹⁵ Di ayat lain ditegaskan : *"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi"*.¹⁶ Sebagai seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi, maka manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kekhalifahan atau kepemimpinannya. Di sinilah letak manusia sebagai pemegang amanah Allah.

Jadi, kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan pemberi amanah. Berkaitan dengan amanah ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah adalah Allah Sang Pencipta Alam Semesta. Penerima amanah adalah manusia sebagai khalifah dan amanah adalah perintah atau kaidah-kaidah yang ada dalam firmanNya.

C. Hisab atau Muhasabah

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa syari'ah Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah *hisab*. *Hisab* adalah salah satu proses perhitungan amal selama hidup manusia di dunia oleh Allah. Sebagai khalifah, manusia diberikan amanah oleh

¹⁵QS. Al-Baqarah (2) : 30.

Allah untuk mengelola bumi yang kemudian hasilnya dipertanggungjawabkan kepadaNya. Oleh karena itu, setiap manusia dalam hidupnya harus selalu dalam keadaan amanah, jujur dan komitmen tinggi terhadap janji yang telah diucapkan kepada Allah. Hal demikian ini merupakan bagian dari perilaku manusia yang Islami. Sehubungan dengan ini, Ghamidi (1997) mengatakan bahwa :

perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya, selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan *muhasaba* (menghitung-hitung atau mengevaluasi) diri, terhadap kaum Muslimin maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam yang terbaik.¹⁷

Oleh karena itu, kaum Muslimin harus kembali kepada Allah, mengoreksi diri mereka, menerapkan perilaku Islami dalam seluruh segi kehidupan, senantiasa jujur, iman dan qana'ah, agar kemuliaan dapat diraih kembali.

Berkaitan dengan kata *muhasaba* di atas, menurut Atiya dinyatakan, bahwa kata Arab yang berarti akuntansi adalah *muhasabah (hisab)*. Kata ini muncul 48 kali dalam al-Qur'an.¹⁸ Sementara Muhammad Khir yang dikutip oleh Harahap disebutkan bahwa "Istilah *hisab* ditemukan 109 kali dalam al-Qur'an."¹⁹ Akar kata *muhasabah* adalah **h.s.b.** (ح س ب) dengan bentuk verbalnya *hasaba* dan bentuk lainnya *yahsaba* yang berarti mengitung (*to compute*) atau mengukur (*to measure*). Lebih jauh perubahan kata *hisab* menjadi *muhasaba* adalah sebagai berikut Al-Muhasaba berasal dari perubahan kata "al-

¹⁶QS. Faathir, (35) : 39.

¹⁷Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir, *Amanah dalam Manajemen*, Terjemahan Rahmad Abbas. (Jakarta : Pustaka al-Kautsar), 1997, Hal. 11.

¹⁸M.K. 'Atiya, *Accounting of the Company and the Bank for the Islamic Organization (Muhasaba Sharikat wa Musarif al-Mizan al-Islami)*, (Alexandria : Daral-Jamiat al-Misliya), 1984, Hal. 32.

¹⁹Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara), 1997, Hal. 276

hisab", yaitu perhitungan. Dari segi bahasa, munculnya kata *al-muhasabah* terjadi karena adanya perubahan *isim*, yaitu *hisab/hisaban* atau *hasaba* sebagai *isim masdar* termasuk *fiil madli*, kemudian *yuhasibu* sebagai *isim masdar mim* termasuk dalam *fiil mudhari*.

Penggunaan kata *hisab* akan mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan bentuk kalimat. Sehingga *hisab* akan berubah menjadi *hasaba*, jika kalimat yang dibentuk berarti "selesaikan tanggung jawab" atau "agar netral". Kemudian akan berubah menjadi *tahasaba* yang berarti "menjaga" atau "mencoba mendapatkan". Juga dapat berubah menjadi *ihtisaba* yang berarti "mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan"; juga berarti "menjadikannya perhatian" atau "mempertanggungjawabkannya".²⁰ Akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, peristilahan kata bahasa Inggris berkembang secara etimologis, istilah Arab justru berkembang secara fonetis (suara), kata *muhasabah* (akuntansi) berkaitan dengan *ihtisab* dan citranya dikaitkan dengan pencatatan perbuatan seseorang secara terus menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (*mizan*) sebagai alat dan Tuhan sebagai akuntan.

Istilah lain yang memiliki makna sama dengan kata *muhasaba* adalah *al-Hisba*, namun kata *al-hisbah* menunjuk pada penerapan atau operasi suatu lembaga. Sehubungan dengan itu, Taymiyah menyebutnya, bahwa "*al-Hisbah* adalah lembaga publik yang telah ada pada masyarakat Islam sejak awal periode Islam sampai masa pendudukan Barat".²¹ Personil yang mengelola lembaga Hisba disebut muhtasib. Kegiatan lembaga ini

²⁰ *Ibid*, Hal. 276-278

²¹ Ibn. Taymiya, *Public Duties in Islam : The Institution of the Hisba*. London : Islamic Foundation, 1982, Hal. 2.

mencakup tugas yang luas, yaitu mulai dari hal-hal yang bersifat ekonomi sampai pada yang bersifat etika.

Berkaitan dengan tugas *muhtasib* Ibn Taymiyah menguraikan sebagai berikut :

“dia ini bertugas menyesuaikan dan menjelaskan beberapa tindakan yang tidak pantas di berbagai bidang, *muhtasib* tidak bertanggung jawab pada gubernur, hakim atau pejabat administrasi (*ahl al diwan*).²²

Lebih lanjut dinyatakan, sehubungan dengan persoalan ekonomi, tugas seorang *muhtasib* adalah :

berkaitan dengan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan, seperti : sifat benci, bohong, penipuan, dan termasuk mengurangi timbangan, praktek kecurangan dalam industri, dagang, masalah agama dan lain-lain.²³

Secara sistematis Ibn Taymiyah menguraikan tugas seorang *muhtasib* , adalah sebagai berikut :

1. Memastikan masyarakat mendapatkan hak atas timbangan dari ukuran yang benar seperti dikemukakan sebelumnya ada beberapa ayat dalam al-Qur'an untuk bersifat jujur dalam dagang dan timbangan
2. Untuk mengecek kecurangan bisnis. Dilarang menyembunyikan kerusakan dan menyebutkan informasi yang salah tentang barang yang dijual.
3. Mengaudit kontrak-kontrak yang tidak benar, seperti kontrak tentang riba, judi, atau aktivitas yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.
4. Menjaga terlaksananya pasar bebas, juga dianggap melawan hukum, membeli barang dagangan harga murah dari pedagang karena ketidaktahuannya situasi harga di pasar.
5. Mencegah penimbunan barang kebutuhan masyarakat. Dia berwenang memaksa seseorang menjual barang kebutuhan masyarakat seperti roti, dalam harga wajar jika sangat dibutuhkan.²⁴

Uraian di atas, menunjukkan bahwa kata *hisab* atau *muhasaba* dan pelaku

²²*Ibid*, Hal. 25.

²³*Ibid*, Hal. 29..

muhasaba atau *muhtasib* adalah kata dan fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk menghitung, mengukur atau mengendalikan seluruh aktivitas manusia selama hidup di dunia untuk dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan demikian, *muhtasib* memiliki tugas yang sangat luas, dari pengawasan harta, yang menyangkut kepentingan sosial sampai pada pemeriksaan atas transaksi bisnis perusahaan. Selanjutnya Ibn Taymiyah menyebutkan, bahwa kewajiban *muhtasib* adalah sebagai berikut :

Functions of a *muhtasib* could be classified into three categories :

- (i) those relating to (rights of) God.
- (ii) those relating to (rights of) Social.
- (iii) those relating to both.²⁵

Fungsi pertama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pelaksanaan shalat wajib, pelaksanaan shalat Jum'at, dan pemeliharaan masjid. Kemudian fungsi kedua adalah berkaitan dengan masalah sosial dan perilaku di pasar seperti : kebenaran dalam timbangan dan ukuran serta kejujuran dalam bisnis. Fungsi ketiga adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut administrasi kota seperti menjaga kebersihan jalan, lampu malam, bangunan yang dapat mengganggu masyarakat.

D. Nash-nash al-Qur'an tentang Hisab atau Muhasaba

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa di dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menggunakan kata *hisab* yang dikaitkan dengan sifat dan fungsi *hisab* dari Allah kepada perbuatan manusia. Ayat-ayat inilah yang dijadikan nash tentang perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Berikut akan dinukilkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan

²⁴*Ibid*, Hal. 56.

nash *hisab* :

1. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia tentukan perjalanannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab (perhitungan). Allah menjadikan tidak lain kecuali dengan benar. Dia menerangkan tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kamu yang mengetahui.²⁶
2. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, maka Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang supaya kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.²⁷
3. Mereka itu akan memperoleh bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.²⁸
4. Kehidupan dunia dipandang indah oleh orang-orang kafir, dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertaqwa itu berada di atas mereka (mengungguli) di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dengan tiada terbatas.²⁹
5. Sesungguhnya agama di sisi Allah (hanyalah) Islam. Tiada berselisih orang-orang yang diberi Kitab kecuali sudah datang ilmu (keterangan) kepada mereka disebabkan kedengkian diantara mereka. Barangsiapa yang ingkar akan ayat-ayat Allah, maka

²⁵*Ibid*, Hal. 139

²⁶QS. Yunus (10) : 5.

²⁷QS. Al-Israa' (17): 12

²⁸QS. al-Baqarah (2) : 202

²⁹QS. al-Baqarah (2) : 212

sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.³⁰

6. Engkau masukkan malam kepada siang. Engkau masukkan siang kepada malam, Engkau keluarkan yang hidup dari pada yang mati, Engkau keluarkan yang mati dari pada yang hidup dan Engkau memberi rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tiada terhitung.³¹
7. Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharannya. Setiap Zakaria masuk menemui (Maryam) di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam dari mana engkau memperolehnya? Maryam menjawab itu dari Allah. *"Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakiNya dengan tiada terhitung"*.³²
8. Mereka bertanya kepadamu, *"Apakah yang dihalalkan bagi mereka?"* Katakanlah, *"Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan binatang buas yang telah kamu ajar dengan malatihnya untuk berburu, sedang kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang pemburu itu (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat*

³⁰QS. Ali-'Imran, (3) : 19.

³¹QS. Ali 'Imran (3) : 27

³²QS. Ali 'Imran (3) : 37

cepat perhitungan-Nya.³³

9. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya waktu pagi dan waktu petang mereka menghendaki keridhaanNya. Bukanlah kewajibanmu memperhitungkan mereka sedikit pun dan bukan pula kewajiban mereka memperhitungkan sedikit pun, lalu engkau mengusir mereka; (kalau sampai demikian) maka engkau termasuk orang-orang yang zalim.³⁴
10. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (mendapat) kebaikan. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan (ditambah) seumpamanya, niscaya mereka akan menebus dengannya. Bagi mereka itu seburuk-buruk perhitungan dan tempat kediaman mereka jahannam. Itulah seburuk-buruknya tempat kediaman.³⁵
11. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan dengannya, mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada seburuk-buruk perhitungan.³⁶
12. Tidakkah mereka perhatikan bahwa Kami datang bumi dengan mengurangnya dari ujung-ujungnya, dan Allah menentukan, tidak ada yang dapat membatalkan ketentuan-Nya dan Dia amat cepat perhitungan-Nya.³⁷

³³QS. Al Ma'idah (5) : 4.

³⁴QS. Al-An'aam (6) : 52.

³⁵QS. Ar-Ra'du (13) : 18.

³⁶QS. Ar-Ra'du (13) : 21.

³⁷QS. Ar-Ra'du (13) : 41.

13. Dan jika Kami tunjukkan kepada engkau sebahagian dari yang Kami janjikan kepada mereka, atau Kami matikan engkau, maka hanya sesungguhnya kewajibanmu menyampaikan, dan kewajiban Kami menghitungnya.³⁸
14. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ibu bapakku serta orang-orang mukmin pada hari terjadi hisab.³⁹
15. Agar Allah memberi balasan kepada tiap-tiap diri apa-apa yang dia usahakan. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.⁴⁰
16. Telah dekat bagi manusia (masa) perhitungan mereka, sedang mereka di dalam kelalaian lagi berpaling.⁴¹
17. Barangsiapa yang menyeru selain Allah, tidak ada baginya keterangan tentang itu, maka perhitungannya adalah di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung.⁴²
18. Supaya Allah membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan menambah (lagi) dari karunia Nya. Dan Allah memberi rizki kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki dengan (jumlah) yang tidak terbatas.⁴³

³⁸QS. Ar-Ra'du (13) : 40.

³⁹QS. Ibrahim (14) : 41.

⁴⁰QS. Ibrahim (14) : 51.

⁴¹QS. Al-Anbiya' (21) : 1.

⁴²QS. Al-Mu'minin (23) : 117.

⁴³QS. An Nur (24) : 38.

19. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka seperti fatamorgana di tanah rata, yang orang dahaga menyangkanya air, hingga apabila dia mendatangnya tidak suatu pun yang dia dapati dan dia mendapati Allah di samping amalnya, maka Allah memenuhi perhitungan-Nya. Allah amat cepat menghitung.⁴⁴
20. Dan mereka berkata (mengejek), "Ya Tuhan kami segerakanlah azab yang telah ditentukan bagi kami sebelum hari hisab itu".⁴⁵
21. (Allah berfirman), "*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di bumi, maka berilah keputusan antara manusia dengan benar, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka azab yang pedih karena mereka melupakan hari perhitungan*".⁴⁶
22. Inilah anugerah Kami, maka berikanlah atau tahanlah dengan tiada perhitungan.⁴⁷
23. Katakanlah, "*Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertaqwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Hanya sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar dengan tiada terhitung*".⁴⁸

⁴⁴QS. An-Nur (24) : 39.

⁴⁵QS. Ash-Shaad (38) : 16.

⁴⁶QS. Ash-Shaad (38) : 26.

⁴⁷QS. Ash-Shaad (38) : 39.

⁴⁸QS. Az-Zumar (39) : 10.

24. Pada hari ini tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah dia usahakan. Tiada kezaliman di hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.⁴⁹
25. Dan berapa banyak (penduduk) negeri yang durhaka terhadap perintah Tuhannya dan rasul-rasul-NYA, maka Kami menghisabnya dengan hisab yang keras dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.⁵⁰
26. Sesungguhnya Aku percaya bahwa Aku akan menemui hisab-Ku.⁵¹
27. Dan aku tidak mengetahui apa hisabku.⁵²
28. Sesungguhnya mereka dahulu tidak mengharapkan perhitungan.⁵³
29. Maka dia akan dihisab (diperhitungkan) dengan hisab yang mudah.⁵⁴
30. Kemudian sesungguhnya atas Kamilah perhitungan mereka.⁵⁵

Tiga puluh ayat tertulis di atas, dapat dianalisis dan dipahami, bahwa sifat-sifat hisab Allah dapat dijadikan tolok ukur bagi manusia, sebagai khalifah Allah, dalam melakukan hisab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Apakah itu berupa *hisab* atas dirinya sebagai orang per orang ataupun berupa hisab atas seseorang atau dirinya dalam

⁴⁹QS. Al Mu'min (40): 17.

⁵⁰QS. Ath-Thalaq (65): 8.

⁵¹QS. Al-Haqqah (69): 20

⁵²QS. Al-Haqqah (69) : 26.

⁵³QS. An-Naba' (78): 27

⁵⁴QS. Al-Insyiqaq (84): 8.

⁵⁵QS. Al-Ghasyiyah (88) : 26.

suatu kelompok tertentu.

E. Implikasi Nash-Nash Al-Qur'an Dalam Akuntansi

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah *hisab*, pada intinya adalah mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan akuntansi syaria'h. Dengan demikian, apabila keinginan kita hendak membangun suatu teori tentang akuntansi syaria'h, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar al-Qur'an tentang sesuatu teori. Dengan kata lain, nilai-nilai al-Qur'an harus dijadikan prinsip-prinsip dalam aplikasi akuntansi.

Kaitannya dengan penerapan akuntansi (*muhasabah*) atau pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan selama bermuamalah, maka al-Qur'an memberikan rambu-rambu prinsip umum yang harus diikuti dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip umum ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah, yang artinya sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan`lah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu ...⁵⁶

Terjemahan ayat tersebut di atas secara tegas Allah mengajarkan kepada manusia, bahwa apabila manusia melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka ia harus melakukan pencatatan. Kegiatan muamalah -- dalam kerangka bisnis -- memiliki makna "berutang piutang". Utang piutang pada intinya adalah berhubungan langsung dengan transaksi dagang. Disamping itu juga memiliki

⁵⁶QS. Al-Baqarah (2) : 282.

makna pinjaman kepada pihak lain apakah itu kepada perorangan maupun lembaga. Dalam konteks inilah al-Qur'an mengajarkan agar seluruh transaksi pinjam meminjam atau jual beli dilakukan penulisan transaksinya. Jika demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan atau perusahaan.

Lebih-lebih lagi, proses perdagangan atau transaksi di masa sekarang telah mengalami pergeseran. Artinya, budaya transaksi dengan sistem kredit saat ini banyak dilakukan di samping adanya transaksi perdagangan secara kontan (tunai). Dengan demikian, proses pencatatannya harus dilakukan untuk transaksi kredit maupun tunai. Sehubungan dengan hal tersebut, Hamka dalam tafsir al-Azhar mengomentari dan mengupas transaksi kontan atau tunai, sebagai berikut :

... di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga di pembeli dapat mencatat berupa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada menghitung penjualan berupa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara'. Kalau dikatakan tidak mengapa tandanya ditulis lebih baik.⁵⁷

Penafsiran Hamka tersebut di atas menunjukkan, setiap transaksi dalam berniaga seharusnya ditulis secara baik dan benar. Sebab hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam melakukan aktivitas niaga pada masa-masa yang akan datang. Dengan melakukan penulisan terhadap semua transaksi, peminjam ataupun penjual akan lebih mudah mempertanggungjawabkan niaganya. Hal inilah yang menjadi inti dari ayat 282 QS. Al-Baqarah tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan mengacu pada uraian di atas, maka secara ringkas dapat dirumuskan prinsip umum akuntansi syari'ah sebagai berikut :

1. Keadilan
2. Kebenaran
3. Pertanggungjawaban

⁵⁷Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta : PT. Bulan Bintang), 1992, Hal. 35.

Berdasarkan tiga prinsip umum tersebut dan didukung dengan bentuk-bentuk praktis *hisab* yang tercantum dalam tiga puluh ayat di atas — yang akan dikenakan Allah kepada umat manusia --, maka selanjutnya dapat ditemukan prinsip-prinsip khusus dalam akuntansi syari'ah. Oleh karenanya nilai keadilan, kebenaran dan pertanggung-jawaban pencatatan transaksi dapat terwujud apabila pelaporan akuntansi dilakukan dengan : benar; cepat; terang, jelas, tegas dan informatif; menyeluruh; ditujukan kepada semua pihak; terperinci dan teliti; tidak terdapat unsur manipulasi; dan dilakukan secara kontinyu.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada nash-nash al-Qur'an tersebut di atas dan ciri-ciri pelaporan akuntansi, dapat dirasionalisasikan sebagai prinsip-prinsip khusus akuntansi syari'ah sebagai berikut :

1. Dilaporkan secara benar (QS. 10 : 5)
2. Cepat pelaporannya (QS. 2: 202; 3: 19; 5: 4; 13: 41; 14: 51; 24: 39; 38: 16; 40: 17)
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (QS. 13: 21; 13: 40; 23: 117; 88: 26)
4. Terang, jelas, tegas dan informatif (QS. 17: 12; 14: 41; 84: 8)
5. Memuat informasi yang menyeluruh (QS. 6: 52; 39: 10)
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal (QS. 2: 212; 3: 27; 3: 37; 13: 18; 13: 40; 24: 38; 38: 39; 69: 26)
7. Terperinci dan teliti (QS. 65: 8)
8. Tidak terjadi manipulasi (QS. 69: 20; 78: 27)
9. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai) (QS. 21: 1; 38: 26)

Prinsip-prinsip dalam nash-nash di atas, dapat diaplikasikan dalam kehidupan di dunia --- khususnya dalam dunia bisnis ---, yaitu apa yang dilakukan atau apa yang

diperbuat oleh seorang (pengusaha) harus melakukan perhitungan atau pencatatan. Kesemuanya itu akan digunakan sebagai bahan pertanggung-jawaban. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya prinsip-prinsip tersebut menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tekanan akuntansi Islam bukanlah pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban (*accountability*).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

SEKILAS TENTANG AKUNTANSI BARAT

A. Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran keadaan akuntansi Barat yang selama ini berkembang. Gambaran keadaan tersebut meliputi sifat akuntansi, aliran-aliran akuntansi Barat, dan implikasi teori dan praktek akuntansi dalam laporan keuangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah menganalisis dan mengoreksi persoalan-persoalan yang ada dalam akuntansi Barat, sehingga dapat ditemukan pemecahannya, sekaligus dapat dibangun format baru akuntansi Syari'ah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, di dalam bab ini akan membahas topik-topik sebagai berikut : Perkembangan Akuntansi Barat; Akuntansi sebagai Teknologi Universal; Aliran-aliran Akuntansi Barat; Implikasi Teori dan Praktek Akuntansi dalam Laporan Keuangan; dan Persoalan-persoalan dalam Akuntansi Barat.

B. Perkembangan Akuntansi Barat

Selama beberapa kurun waktu yang lalu, akuntansi secara tradisional telah dipahami dan diajarkan sebagai satu serangkaian prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi, yaitu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian.¹ Jika demikian, maka akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkrit, berwujud dan bebas dari nilai masyarakat di tempat akuntansi

¹Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah", *Kerta Kerja*, Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Surakarta, 24 Februari 1997, Hal. 2.

itu diterapkan. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Apakah itu sebuah ide, konsep, teori ataupun ilmu, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ide, konsep, teori ataupun ilmu adalah produk atau anak dari masyarakat setempat, yang dapat berlaku universal atau hanya berlaku lokal.

Kalau kita membicarakan ide, konsep, teori atau ilmu akuntansi, nampak berbeda dengan ide, konsep, teori atau ilmu ekonomi dilihat dari hubungannya dengan ideologi maupun masyarakat. Hal ini terbukti, di dalam ilmu ekonomi kita mengenal adanya ekonomika kapitalistik dan ekonomika sosialistik. Namun pada ilmu akuntansi tidak banyak dibahas tentang akuntansi kapitalistik dan/atau akuntansi sosialistik. Dengan kata lain, akuntansi jarang dihubungkan dengan ideologi. Sehubungan dengan hal ini, Baswier menyatakan, bahwa:

... ilmu ekonomi sangat erat kaitannya dengan ideologi, sedangkan di pihak yang lain, melalui operasi perusahaan-perusahaan kapitalistik, ia tidak mungkin dapat dipisah dari akuntansi. Dengan demikian, dalam rangka menelusuri hubungan antara akuntansi dan ideologi, ilmu ekonomi dan perusahaan-perusahaan kapitalistik dapat dianggap memainkan peranan sebagai perantara. Artinya, bila akuntansi dan ideologi memiliki kaitan satu sama lain, maka kaitan itu mestinya dapat dilacak dengan mengkaji ilmu ekonomi dan perusahaan kapitalistik.²

Oleh karena itu, dua dekade belakangan ini, upaya pembahasan kaitan akuntansi dengan ideologi mulai bermunculan.³ Hal ini terbukti, anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai (*value-free*), menurut

²Revisond Baswier, "Akuntansi dan Ideologi", *Kertas Kerja pada Seminar Nasional Harteknas*, Yogyakarta tanggal 27 Desember 1996, Hal. 1-2.

³Uraian selengkapnya tentang pembicaraan pengkaitan antara akuntansi dengan ideologi dibahas dalam sub bab aliran-aliran akuntansi.

Triyuwono, “pada akhir tahun 1970-an sudah mulai digoyang keberadaannya”.⁴ Anggapan tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi. Ciri utama dari era informasi dan globalisasi ini adalah adanya kecenderungan untuk melakukan harmonisasi sesuatu. Misalnya, dalam hal pengetahuan dan praktik akuntansi, yaitu upaya harmonisasi praktik-praktik akuntansi dilakukan. Hal ini berarti adanya kehendak untuk memberlakukan praktik-praktik tertentu, termasuk praktik akuntansi, secara seragam seluruh dunia. Hal ini juga berarti, bahwa upaya pengkaitan antara ideologi dengan akuntansi merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan.

Pembicaraan mengenai perkembangan sesuatu, tidak dapat dilepaskan dari akar sejarahnya. Demikian pula pembicaraan mengenai perkembangan akuntansi. Akuntansi, seperti halnya dengan ilmu-ilmu lainnya, dalam catatan sejarah telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Perlu diketahui bahwa akuntansi sekarang ini diklaim berkembang dari peradaban Barat.

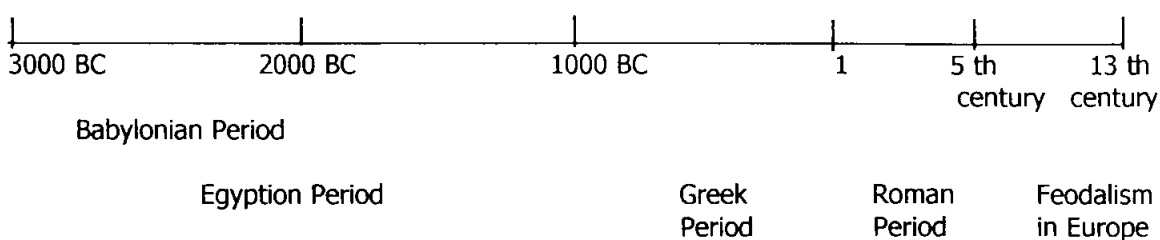
Hampir semua orang, sampai saat ini mengakui bahwa bapak akuntansi modern adalah Lucas Pacioli, yang pertama kali menerbitkan buku terkenal berjudul *Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita* pada tahun 1494.⁵

Gambaran perkembangan sejarah awal akuntansi seiring dengan perkembangan

⁴Iwan Triyuwono, “Organisasi, Akuntansi, dan Spiritualisme Islam”, *Makalah Stadium General Mahasiswa Syari'ah Banking Institute Yogyakarta*, tanggal 28 September 1996, Hal. 12.

⁵M. Akhyar Adnan, “[Teknologi] Akuntansi Konvensional dalam Perspektif Islam”. *Kertas Kerja*. Disampaikan pada seminar Hari Kebangkitan Teknologi Nasional I. Yogyakarta : tanggal 29 Agustus 1996, Hal. 2.

peradaban manusia. Sebagai mana digambarkan oleh Kam sebagai berikut



Pyramids and Sphinx built c. 2650 - 2500 BC
 Abraham c. 2000 BC
 Code of Hammurabi c. 1750 BC
 Moses c. 1400 BC

Gambar 3 : Sejarah Perkembangan Peradaban Manusia

Gambar di atas jelas terlihat, bahwa banyaknya anggapan yang menyatakan seolah perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini adalah hasil penemuan Barat adalah kurang benar. Sebab, ternyata ada indikasi bahwa Barat telah berupaya menyembunyikan sumbangan Islam terhadap perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dewasa ini. Di samping itu, juga banyak ditemukan dalam literatur Barat, bahwa perkembangan ilmu sekarang ini seolah langsung dari Romawi dan Yunani dengan melangkahi peradaban Islam selama tahun 600-1300 M.

Sebagai contoh, dalam bidang/ilmu akuntansi. Hasil penelitian Shahata menyimpulkan, bahwa :

... di dunia Islam juga dikenal akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dibawah pengawasan Bagian Keuangan Pemerintah yang disebut *Bayt al-Mal* yang membentuk sistem pembukuan yang sangat canggih dan jaringan informasi

⁶Vernon Kam, *Accounting Theory*. 2nd Edition. (New York : John Wiley and Sons), 1990, Hal. 2.

akuntansi.⁷

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamid, dkk. pada tahun 1995, disimpulkan, bahwa :

"sumber akuntansi bukan berasal dari Italia melainkan dari jaman kejayaan Islam. Praktek pembukuan berpasangan telah diterapkan oleh pemerintahan Islam pada abad ke sepuluh".⁸

Disamping itu, sejarah akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi ternyata sudah cukup lama dimulai. Berdasarkan pendapat beberapa penulis menegaskan, bahwa akuntansi sudah ada sejak sekitar 8000 sampai dengan 5000 sebelum Masehi Mattesich [1987]; Lee [1990]; Hendriksen & Breda [1992] untuk menyebut beberapa contoh.⁹ Dengan demikian, adalah kurang benar apabila peradaban Islam ditinggalkan begitu saja, tanpa dipertimbangkan sebagai embrio tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan sampai saat ini. Padahal peradaban Islam telah ada sejak tahun 600 - 1300 dan pernah mengalami kejayaannya pada tahun 900 - 1200. Jika demikian, maka perkembangan peradaban Islam telah banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan berbagai disiplin ilmu yang sekarang ini berkembang dengan pesatnya, termasuk perkembangan bidang ilmu : manajemen, akuntansi, maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Perkembangan itu mengalami maju dan mundur. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin nyata sejak zaman keemasan Renaisans. Pada zaman Renaisans dan sesudahnya mulai bermunculan feodalisme dan kapitalisme. Kedua aliran dan sistem ini telah merasuk dalam perilaku

⁷Shauqi Ismail Shahata, *Financial Accounting from the Islamic Point of View*, (Cairo : Alzahra al-A'lam al-A'rabi), 1985, Hal. 15.

⁸*Ibid*, 1995, Hal. 101.

⁹M. Akhyar Adnan, *Op.Cit*, Hal. 6.

kehidupan manusia. Apalagi setelah adanya kemajuan industri yang sangat menuntut ilmu manajemen dan akuntansi, maka secara perlahan bidang ilmu tersebut mulai dikembangkan dengan nafas feodalisme dan kapitalisme.

Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis.¹⁰ Kapitalisme lahir dari paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya timbul jika kegiatan produksi diserahkan pada individu. Tokoh-tokoh dibalik ini adalah Adam Smith, John Maynard Keynes, Alfred Marshal, Milton Freidman, sampai kepada Gunnar Myrdal. Ide konsep ini terus berkembang dan mencari bentuk sampai saat sekarang ini.

Catatan sejarah perkembangan akuntansi Barat dapat dikaji melalui pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama :

Tahap ini adalah tahap pertama kali lahirnya akuntansi, yang didalamnya berkembang dua periode, yaitu :

Periode awal, Pada periode ini, mekanisme atau metodologi akuntansi berbentuk tata buku. Sebagaimana disebutkan bahwa sebagian besar sejarah akuntansi adalah mengenai sejarah sivilisasi akuntansi telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Ketika orang memiliki keterbatasan daya ingatannya sebagai media penyimpanan informasi yang paling primitif dan kualitas yang baik dari media informasi, manusia mulai mencatat transaksi bisnisnya.¹¹ Lebih dari 700 tahun yang lalu pada

¹⁰Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara), Hal. 134.

¹¹Sadao Takatera, *Posobility of Accounting (Kanosai no Kaikeigaku)*, (Tokyo: Sanrei-shobo), 1982, Hal. 4.

masa kebudayaan Chaldean Babylonia, Assyrian, Sumerian telah meninggalkan catatan bisnis tertua.¹² Data lain menunjukkan bahwa zaman kuno Mesir, Cina, Romawi juga memiliki tata buku. Perkembangan selanjutnya berkenaan dengan istilah, sebagaimana sering dikemukakan sekarang ini istilah bahasa Inggris akuntansi berkaitan dengan istilah *accountability* (pertanggungjawaban), sebab pada zaman kuno dan zaman pertengahan budak dan agen mengurus kekayaan majikannya dan mereka harus berupaya memberikan pertanggungjawaban yang jelas tentang pengurusannya pada akhir periode tertentu.

Periode berikutnya, muncul beberapa pendapat tentang asal mula sistem pembukuan berganda (*double entry*), tetapi mungkin juga bahwa sistem tata buku berganda ini muncul dari buku-buku broker uang zaman pertengahan yang dipengaruhi oleh praktek pembukuan kas zaman Romawi. Sebagaimana diketahui pada tahun 1494 di Venesia, seorang ahli matematika bernama Lucas Pacioli menerbitkan buku yang berjudul *Suma de Arithmetica* sebagaimana dituliskan di atas, yang di dalamnya menjelaskan kebiasaan pembukuan yang dipraktikkan di antara pedagang Venesia pada saat itu yaitu metode tata buku berpasangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan periode perubahan dari zaman pertengahan ke zaman modern.¹³ Akan tetapi, ini tidak berarti perkembangan-perkembangan kapitalisme, adalah yang lebih tepat disebut sebagai tahap munculnya akuntansi, sebab pada saat itu tidak dimasukkan

¹²Michael Chatfield, *A History of Accounting Thought : Continuity and Change*, (New Jersey : Prentice-Hal. Englewood Cliffs), 1977, Hal. 4.

¹³*Ibid*, 1977, Hal. 61. Sombart dan banyak akuntan lainnya menekankan pada sumbangan pembukuan "*Double Entry*" terhadap perkembangan kapitalisme. Sebab *Double Entry* membantu

apapun kecuali hanya tata buku.¹⁴ Jadi pada tahap ini akuntansi berawal dengan nama tata buku.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua adalah tahap awal pertumbuhan teori akuntansi.¹⁵ Mengapa disebut demikian? Sebab pada tahap ini mulai secara perlahan berkembang untuk meninggalkan tata buku. Sehubungan dengan ini Canning menyatakan bahwa sebagian besar penulis akuntansi pada awalnya lemah kemampuan akademisnya, sedangkan para ekonom telah terlatih dalam profesinya sejak awal. "Tulisan para ekonom biasanya, semata-mata hanya berupa penjelasan tentang praktek pembukuan di lapangan".¹⁶ Tetapi, mereka menyadari keterbatasan dari metode yang digunakan untuk mempelajari pembukuan yang hanya dengan mengingat-ingat, hal ini terjadi karena penerapan aturannya hanya terbatas pada transaksi sejenis.¹⁷

Para ahli (akuntan) melihat dari segi logika dan kewajaran di dalam pembukuan. Littleton dan Zimmerman menyimpulkan bahwa "akuntan yang pada awalnya melakukan studi empiris, harus dapat menghasilkan teori prosedur mekanis".¹⁸

mengetahui laba dan modal dan menunjukkan hubungan antara keduanya sebagaimana memfokuskan perhatian pada potensi perusahaan untuk memaksimalkan laba buka hanya memberikan kehidupan.

¹⁴Sadao Takatera, *Op.Cit.* 1982, Hal. 46

¹⁵Kiyoshi Kurosawa, *Accounting and Society.* (Tokyo : Choukeizai-Sha), 1973, Hal. 5.

¹⁶John B. Canning, *The Economics of Accountancy : A Critical Analysis of Accounting Theory,* (New York : Ronald Press), 1992. Hal. 8.

¹⁷John R. Edward, *A History of Financial Accounting.* (London : Routledge), 1989, Hal. 71.

¹⁸A.C. Littleton and V.K. Zimmerman, *Accounting Theory : Continuity and Change.* (New jersey : Prentice-Hall), 1962, Hal. 47.

Penelitian tentang peraturan dan penjelasan yang lebih umum telah meningkatkan pengenalan terhadap perkiraan. Selanjutnya ide ini telah diterapkan ke perkiraan-perkiraan lainnya, seperti : perkiraan hasil dan biaya.¹⁹ Para peneliti akuntansi hanya memperhatikan perkiraan nominal atau perkiraan laba rugi. Perkiraan nominal inilah yang memberikan sumbangan pada perkembangan teori akuntansi. Sebab perkiraan inilah yang membantu akuntan mengenal perbedaan antara Modal dan Laba.

Sumber teori akuntansi yang lain adalah (kondisi/operasionalisasi) perusahaan. Pada mulanya perusahaan itu tidak memerlukan perhitungan laba rugi yang teratur. Sebab perusahaan itu adalah pedagang lokal seperti pedagang berlayar dan pedagang melalui darat. Akan tetapi setelah munculnya pasar modal pada awal abad ke-19, maka perhitungan laba rugi perusahaan diperhitungkan secara periodik, dan persoalan lainpun muncul, yaitu modal. Dengan demikian, jika perusahaan dapat berjalan terus menerus kendatipun terjadi perubahan investor atau pemegang saham, maka posisi modal harus diketahui terus. Dari sinilah muncul teori akuntansi. Apakah teori akuntansi itu berkembang sampai di sini? Ternyata perkembangan teori akuntansi berjalan sesuai dengan perjalanan waktu. Banyak pertambahan teori pada proses pembukuan.²⁰ Apalagi setelah terjadi Revolusi Industri, akuntan yang telah dipengaruhi oleh manajer perusahaan, terutama dalam Akuntansi Biaya, sehingga akhirnya Akuntansi Biaya disebut sebagai perubahan penting dari Akuntansi Tradisional.

¹⁹John R. Edward, *A History of Financial Accounting*. (London : Routledge), 1989, Hal. 72.

²⁰A.C. Littleton and V.K. Zimmerman, *Op.Cit*, 1962, Hal. 270.

3. Tahap Ketiga

Sebagaimana diuraikan pada tahap kedua, akuntansi telah menjadikan dirinya untuk membantu perusahaan dan akuntansi biaya membantu mengontrol produksi. Melalui akuntansi seseorang dapat melihat, meramalkan masa depan dan merencanakan kepengurusannya serta menghitung hasil usaha masa lalu. Menurut Littleton dan Zimmerman bahwa “akuntansi sebagai kemajuan paling besar dalam pembukuan sama dengan keputusan tentang kebijakan akuntansi ditambah dengan tata buku.”²¹ Akan tetapi, pada tahap kedua keputusan tentang kebijakan akuntansi dibuat, pada pokoknya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan manajemen.

Pada tahap ketiga ini, peranan akuntansi adalah dapat mengontrol individualisme perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan sosial. Individualisme perusahaan yang tidak memperhatikan masyarakat dimaksudkan, karena perusahaan mengejar laba sebanyak-banyaknya, jika ia (manajer) dibebaskan berbuat apa saja akan melakukan kecurangan dalam pembukuan untuk melegitimasi tindakan-tindakan bisnis misalnya, diperindah dengan pola "*window dressing*" untuk mendapatkan dana yang murah. Oleh karena itu, untuk mengontrol perilaku perusahaan yang hanya memikirkan laba tanpa memperhatikan aspek sosial, lembaga akuntansi harus digunakan oleh perusahaan sendiri atau jika tidak bisa oleh lembaga masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, Littleton (1989) mendesak bahwa sosialisasi akuntansi harus dapat diselesaikan melalui perkiraan-perkiraan yang seragam dan tabulasi statistik dari akuntansi yang diperluas. Untuk mencapai perkembangannya,

²¹ *Ibid*, 1962, Hal. 40.

dua alat harus dibuat. Kedua alat tersebut adalah : *Pertama*, setiap orang harus mematuhi prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP = *Generally Accepted Accounting Principles*). Melalui GAAP akuntan dapat mengukur laba perusahaan dengan akurat. *Kedua*, pemeriksaan laporan keuangan secara terpisah oleh akuntan publik. Akuntan publik akan memeriksa laporan keuangan perusahaan dan menyatakan pendapat apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan GAAP atau tidak.

C. Akuntansi sebagai Teknologi Universal

Sebagian besar, orang berpendapat bahwa (1) akuntansi hanyalah sebuah alat yang bebas nilai (*value free*), dan oleh karenanya (2) akuntansi [konvensional] adalah sesuatu yang dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perspektif agama Islam sekalipun.²² Berkaitan dengan persoalan universalitas teknologi akuntansi konvensional, apakah teknologi akuntansi yang ada saat ini memang dapat diterima atau tidak dalam perspektif Islam? Jika memang teknologi akuntansi konvensional adalah universal, apakah teknologi akuntansi adalah sesuatu yang bebas nilai.

Kebanyakan kita menerima begitu saja anggapan bahwa akuntansi adalah teknologi universal, tetapi akuntansi tidak semata teknologi.²³ Kalau kita simak sejarah perkembangannya, jelas bahwa akuntansi bukan sekedar teknologi tetapi lebih dari itu. Akuntansi adalah produk sejarah dan akuntansi adalah refleksi budaya. Hal ini berarti,

²²M. Akhyar Adnan, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 1.

²³Sofyan Syafri Harahap, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 253.

bahwa perkembangan akuntansi dari masa ke masa akan mengikuti perkembangan sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, dalam menatap perkembangan akuntansi, tidak banyak yang tidak sepakat bahwa akuntansi sangat dipengaruhi oleh alam dan lingkungan tempat akuntansi itu dikembangkan (Mathews & Perera, 1996; FASB, 1985).²⁴ Kejadian ini dikuatkan dengan klaim dari Sombart (1924) yang dikutip oleh Adnan (1997) sehubungan dengan kapitalisme dan akuntansi sebagai berikut :

One cannot imagine what capitalism would be without double-entry bookkeeping : the two phenomena are connected as intimately as form and content. One cannot say whether capitalism created double-entry bookkeeping as a tool in its expansion, or perhaps, conversely, double-entry bookkeeping created capitalism.²⁵

Sehubungan dengan itu, Weber yang dikutip oleh Andreski mengatakan, bahwa :

The modern rational organization of capitalistic enterprise would not have been possible without two other important factors in its development : the separation of business from household ... and, closely connected with it, rational book-keeping.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa akuntansi bukan sebuah teknologi atau teknik yang sederhana yang netral terhadap perkembangan, namun ia adalah teknologi universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan proses perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, baik sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Persoalan selanjutnya adalah dimanakah letak keuniversalan akuntansi [konvensional] itu? Sifat ini terletak pada penggunaan metode pembukuan *double entry* (tata buku berpasangan). Dengan demikian tepatlah anggapan yang menyatakan bahwa

²⁴M. Akhyar Adnan, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 6.

²⁵*Ibid*, Hal. 7.

²⁶S. Andreski (ed.), *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion*, (London : George Allen), 1983, Hal. 26.

(tata buku berpasangan). Dengan demikian tepatlah anggapan yang menyatakan bahwa metode pembukuan "*double entry*" (tata buku berpasangan) Barat atau konvensi akuntansi berkembang ke seluruh dunia, walaupun secara prosedural akuntansi banyak berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan atau tempat akuntansi itu diterapkan.

Beberapa contoh teknologi akuntansi yang dapat disajikan dalam pembahasan ini, misalnya akuntansi yang diterapkan di Jepang. "Di Jepang ada sistem akuntansi yang sudah terorganisasi baik dan maju sebagaimana yang ditulis dalam bukunya *Daifuku-Cho*".²⁷ Sebelum Lucas Pacioli, yaitu pada masa kejayaan Islam, di dunia Islam juga dikenal akuntansi di sektor publik yang dikembangkan di bawah pengawasan Bagian Keuangan Pemerintah yang disebut "*Bayt al-Mal*" yang membentuk sistem pembukuan yang sangat canggih dan jaringan informasi akuntansi.²⁸

Menilai akuntansi dalam konteks konsistensi universal ternyata ditemui kesulitan. Kesulitan ini muncul jika akuntansi sebagaimana asalnya, kemudian dikaji dari sudut pandang akuntansi moderen seperti sekarang. Padahal, sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa akuntansi tidak dapat dan tidak dinilai kecuali dalam konteks masyarakat tempat akuntansi itu dipraktekkan.

D. Aliran-Aliran Akuntansi Barat

Sesuai dengan perkembangan sejarahnya, akuntansi lahir dan berkembang mengikuti sistem yang dianut suatu bangsa. Sementara Littleton menganggap akuntansi sebagai ilmu pengetahuan eksak (*science*).²⁹ Dasar anggapannya adalah bahwa teori

²⁷Sadao Takatera, *Loc. Cit.* 1982, Hal. 17.

²⁸Shauqi Ismail Shahata, *Financial Accounting from the Islamic Point of View*, (Cairo : al-Zahraa al-A'lam a-Arabi), 1987, Hal. 15.

²⁹A.C. Littleton, "Socialized Accounts", *The Accounting Review*, Vol. 8 (March, 1934), 1934, Hal. 47.

akuntansi asalnya terbentuk sebagai suatu kumpulan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun anggapan ini tidak mendapat banyak dukungan. Akhirnya Gambling menyarankan agar “para perumus teori akuntansi membuat asumsi yang kuat sebelum memulai penelitian, mereka menerima bahwa struktur yang ada harus logis sehingga konsistensi postulat yang mendasarinya dapat ditemukan.”³⁰

Aliran akuntansi konvensional menurut perkembangannya dapat ditelusuri dari empat aliran akuntansi, yaitu : “Aliran akuntansi Inggris; Aliran Ekonomi Politik dari Akuntansi; teori Akuntansi Alternatif Hopwood dan Akuntansi Sosial.”³¹ (Harahap, 1997 : 261 - 264). Paparan singkat tentang empat aliran akuntansi tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

1. Aliran Akuntansi Inggris

Aliran akuntansi Inggris lahir pada sekitar akhir tahun 1970-an. Aliran ini menyoroti bahwa studi akuntansi saat ini dipengaruhi oleh model ekonomi neo-klasik Amerika. Akhirnya para akuntan yang kritis³² mengkaji lebih jauh keberadaan akuntansi saat itu dengan memperhatikan aspek sosial dan politik dari akuntansi dan

³⁰Trevor E. Gambling, "Toward a General Theory of Accounting," *International Journal of Accounting Education and Research*, Vol. 7, No. 1 (Fall 1971), 1971, Hal. 15.

³¹Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit.*, 1997, Hal. 261-264.

³²diantaranya terbagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut : *Kelompok Hopwoodian*, meliputi : Anthony G. Hopwood (LSE); Colin Clubb (University of London, ICST); Jeremy F. dent (LBS); Michael J. Eral (University of Oxford); Anne P. Loft (Copenhagen Business School); Peter Miller (LSE) ; Ted O'leary (University of Cork); Stuart R.C. Burchell (London Greenwich Borough Office); Grahame F. Thompson (Open University); *Kelompok Political Economy of Accounting* : David J. Cooper (UMIST); Trevor M. Hooper (University of Manchester); David Knights (UMIST); Michael J. Sherer (University of Essex); Hugh C. Willmott (Aston University); *Kelompok Sheffield* : Richard C. Laughlin (University of Sheffield); Wai Fong Chua (University of New South Wales); E. Anthony Lowe (UMIST); Anthony G. Puxty (University of Sheffield); Anthony MM. Tinker (City University of New York); *Kelompok Lainnya* : Trevor E. Gambling (Portsmouth Polytechnic); John M. Samuels (University of Birmingham)

mereka telah menunjukkan pendekatan alternatif pada model akuntansi.³³

Lebih lanjut Takatera menyatakan, bahwa dengan adanya kritik terhadap keberadaan akuntansi yang harus memperhatikan peran sosial, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah pengungkapan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sehingga saran ini menyebabkan timbulnya ketergantungan pada hipotesis yang menyatakan, bahwa kurangnya informasi akuntansi di kalangan kelompok yang berkepentingan di luar perusahaan akan mengganggu mereka dalam pengambilan keputusan yang rasional. Teori ini disebut dengan teori akuntansi yang didominasi konsumen (*Consumer Dominated*).

Perkembangan selanjutnya setelah adanya teori *Consumer Dominated*, maka muncul pula teori tentang *Producer Dominated*. *Producer Dominated* adalah teori yang didasarkan pada pengungkapan informasi akuntansi yang didasarkan pada informasi yang didominasi oleh penyaji laporan sehingga perluasan pengungkapan mungkin akan memperluas penguasaan manajemen dalam mengarahkan pihak lain yang berkepentingan.³⁴ Oleh karena dasarnya adalah manajemen, maka teori ini menggunakan kekuasaan politik pemakai informasi dengan menitik beratkan pada topik khusus atau sebaliknya dengan mengabaikan topik lain dalam pengungkapan informasi.

Akibatnya adalah tidak perlu memikirkan cara pengungkapan informasi akuntansi dengan tanpa mengawasi kekuasaannya, dan kemudian perlu untuk menciptakan pengungkapan yang didominasi pembuat laporan. Hal demikian ini relatif

³³Sadao Takatera, *Op. Cit.* 1988, Hal. 22.

³⁴Sadao Takatera 1988, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit.*, 1997, Hal. 261.

melemahkan kekuasaan manajer atas informasi itu. Akan tetapi, akses informasi akuntansi oleh serikat pekerja dapat menjadi kontrol alternatif untuk pendekatan pengungkapan informasi yang didominasi penyaji (*Producer Dominated*). Pada kasus demikian ini, serikat pekerja tidak hanya menerima informasi dari manajemen dan menilainya kembali, tetapi akses ke laporan dapat terjadi secara positif.

2. Ekonomi Politik dari Akuntansi

Perkembangan lebih lanjut dalam bidang ekonomi adalah masuknya ilmu politik dalam bidang ekonomi. Dari sini kemudian lahir Ilmu Ekonomi Politik. Dengan adanya Ilmu Ekonomi Politik, maka secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap akuntansi. Pelopor teori Ekonomi Politik dari Akuntansi adalah David J. Cooper. Sebagaimana dikatakan oleh Takatera, bahwa “perkembangan lebih lanjut adanya ilmu Ekonomi Politik, maka akuntansi mendapat pengaruh darinya”.³⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa kekuasaan politik dari akuntansi telah diabaikan atau tidak memperhatikannya sebagai suatu faktor eksternal dalam akuntansi sekarang. Aliran akuntansi Inggris telah mencatat aspek akuntansi ini dan metode-metode yang mendasarinya, yaitu :

1. Ekonomi politik dari akuntansi menyangkut peranan akuntansi dalam proses distribusi pendapatan, kekayaan, kekuasaan, dalam organisasi dan masyarakat.
2. Hal ini meletakkan pentingnya nilai lingkungan yang unik secara historis dan kelembagaan dari organisasi dan masyarakat di mana akuntansi dipraktekkan. Pemilihan prosedur akuntansi adalah akibat dari konflik politik di antara pihak yang berkepentingan dan pilihan yang diambil

³⁵Sadao Takatera, *Loc. Cit.*, 1988, Hal. 70.

adalah atas biaya dari beberapa kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah akuntansi tidak dapat dianggap sebagai teknik atau pemecahan konseptual.

3. Akuntansi adalah simbol sistem yang didefinisikan dari realitas, dan lagi pula akan terus berubah karena kekuasaan dari sistem itu. Dalam hal ini tidak cukup dan tidak sempurna memecahkan masalah akuntansi sebagai teknik, sebab kita telah menerima praktek dari lembaga yang ada sekarang.

Ekonomi politik dari akuntansi seperti itu harus memiliki tiga persyaratan, yaitu : (1) harus normatif eksplisit; (2) harus deskriptif; dan (3) harus kritis.³⁶ Ketiga persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Harus Normatif Eksplisit, artinya setiap studi akuntansi empiris dan deskriptif adalah normatif dan berbobot nilai.
2. Harus deskriptif, artinya setelah pengetahuan cukup mengenai fungsi yang saling mendukung (*mutual*) di antara informasi akuntansi, individu, organisasi, pasar dan masyarakat, kita akan dapat menilai sistem akuntansi. Hal ini penting untuk menjelaskan lingkungan seperti lembaga masyarakat tempat akuntansi dipraktikkan, susunan nilai sosial dan politik serta pelaku akuntansi ini. Hal ini tidak berarti bahwa deskriptif adalah bebas nilai.
3. Harus kritis, artinya adalah suatu situasi ketika masalah akuntansi menjadi gambaran potensial dari masalah sosial. Di sini termasuk analisis kritis terhadap masalah sebelumnya. Dalam konteks ini akuntansi alternatif mengharapkan adanya revolusi akuntansi dan akhirnya revolusi sosial yang

³⁶Sofyan Syafri Harahap, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 262.

didalamnya akan terjadi revolusi akuntansi.

3. Teori Akuntansi Alternatif Hopwood

Sesuai dengan namanya, teori akuntansi alternatif Hopwood pertama kali dimunculkan oleh seorang akuntan Inggris yang kritis, yaitu Anthony Hopwood. Kekritisannya Hopwood adalah terletak pada kecermatannya dalam memandang akuntansi sebagai sebuah ilmu yang memiliki hubungan dengan masyarakat. Hopwood menyatakan bahwa “akuntansi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat akuntansi diterapkan dan tidak bisa netral secara teknis atau netral dari kepentingan”.³⁷

Mengapa akuntansi dianggap tidak bisa netral secara teknis atau netral dari kepentingan? Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa akuntansi selama ini digunakan untuk mendukung kepentingan ekonomi atau untuk kepentingan politik. Hal ini adalah suatu kasus yang secara historis digambarkan untuk kepentingan khusus dan membentuk kepentingan khusus pula. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hopwood mengakui pandangan dualistik akuntansi, yaitu akuntansi sebagai produk lingkungan dan akuntansi sebagai sesuatu yang mampu memberikan sumbangan yang baik pada lingkungannya. Dengan demikian, akuntansi adalah ilmu yang sarat dengan elemen sosial.

Masalahnya adalah apakah elemen sosial telah digambarkan ke dalam akuntansi masa lalu dan apakah sekarang ini elemen sosial atau organisasi dikaitkan dengan perubahan akuntansi. Oleh karena itu timbullah pertanyaan apa peran akuntansi dalam pembuat kebijakan di masyarakat? Untuk menjawab permasalahan ini, harus selalu diingat bahwa elemen sosial tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Hal ini

³⁷ *Ibid*, 1997, Hal. 263.

berarti bagaimana akuntansi meletakkan elemen sosial ke dalam masalah seperti elemen organisasi sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam menempatkan elemen organisasi sebagai elemen sosial. Jikalau elemen sosial dianggap terpisah dari elemen organisasi, maka akuntansi harus dijadikan jembatan antara keduanya dan dianggap sebagai hal yang tidak termasuk di dalam keduanya.

4. Akuntansi Sosial

Seperti halnya Hopwood, ada seorang akuntan Inggris yang cukup ekstrim dalam memandang akuntansi sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Dia adalah T.E. Gambling. Berkaitan dengan pandangannya tentang adanya hubungan antara akuntansi dan masyarakat, Gambling menyatakan :

teori akuntansi menyangkut pengertian dari istilah kesejahteraan apa yang kita artikan ketika kita menyatakan pendapatan, pengeluaran, laba, kekayaan, dan lain-lain. Teori akuntansi formal tentang kebudayaan akhirnya mendapatkan jati dirinya dalam kepribadian individu.³⁸

Di dalam tulisan lain Gambling menyatakan yang dikutip oleh Gaffikin, bahwa *accounting is a social product and will reflect the cultural mores of the society (viz, Western societies) that produces it.*³⁹ Hal serupa juga diungkapkan oleh Tricker, bahwa :

"... *accounting is dependent on the ideology and mores of society. It is not value free. It is a child of its culture. Any claim to report objectives facts has to be set into the context of the beliefs of that particular culture.*"⁴⁰

Apa fungsi hadirnya akuntansi sosial dalam operasional sistem masyarakat, sehingga akuntansi itu mampu menjadi alat pengontrol sosial (masyarakat)? Chambers

³⁸Trevor E. Gambling, *Societal Accounting*, (Londong : George Allen & Unwin), 1974, Hal. 107.

³⁹M.J.R. Gaffikin, *Accounting Methodology and The Work of R.J. Chambers*. New York : Garland Publishing, Inc., 1989, Hal. 180.

⁴⁰R.I. Tricker, *Reaserch in Accounting*. Arthur Young Lecture No. 1. University Glasgow Press, 1978, Hal. 8.

mengatakan, bahwa :

1. *Accounting as a social control device to preserve the firm as a social unit comprising the staff.*
2. *Accounting as a social control device to safeguard those parties (forming a social unit) who deal with the firm.*
3. *Accounting as a social control device to regulate the firm for the benefit of society generally through the medium of government.*⁴¹

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa lahirnya akuntansi sosial menunjukkan kecenderungan terwujudnya metode akuntansi yang berbeda dengan model Akuntansi Barat. Sebagaimana diakui oleh Gambling bahwa perbedaan ide tentang waktu, diri sendiri, pengelompokan, dan lain-lain akan menghasilkan bentuk dari teori akuntansi yang melahirkan metode akuntansi yang berbeda dari model Barat.⁴² Apabila kajian suatu teori telah masuk dalam dimensi sosial atau kemasyarakatan, jangkauan kajiannya adalah bukan semata pada satu aspek atau dimensi saja. Akan tetapi hal itu akan mencakup pada keseluruhan dimensi nilai-nilai yang berada dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, apabila hal di atas dapat terwujud maka bentuk akuntansi yang sebenarnya akan terlihat, sebagai berikut :

1. Masyarakat kita tanpa bisa ditolak terdiri dari satu kumpulan dimensi nilai.
2. Akan tetapi, kita menganggap bahwa situasi ekonomi secara keseluruhan yang bisa dicatat dapat diketahui melalui akuntansi. Ide ini mempertimbangkan berbagai hal di luar konsep akuntansi yang telah ada.
3. Akuntansi hanya mengakui satu aspek dari dimensi "n" dari kenyataan. Sejauh menyangkut pandangan akuntansi sekarang, gap antara hal-hal yang dipikirkan orang dan hal-hal yang sebenarnya, selalu diabaikan.⁴³

Jikalau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat adalah seperti gambaran di

⁴¹Dalam M.J.R. Gaffikin, *Accounting Methodology and the Work of R.J. Chambers*. (New York : Garland Publishing, Inc.), 1971, Hal. 3-6.

⁴²Trevor E. Gambling, *Op.Cit.*, 1974, Hal. 110.

⁴³Sofyan Syafri Harahap, *Loc.Cit*, 1997, Hal. 264.

atas, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat harus dijadikan pertimbangan dalam penyusunan teori kemasyarakatan. Jika tidak, apa yang berlaku dalam masyarakat hanyalah sama dengan pandangan "Newtonian" tentang dunia. Oleh karena itu, Takatera menyarankan, "pentingnya merekonstruksi akuntansi sebagai sesuatu yang tidak teratur yang terorganisasi".⁴⁴

Apapun yang terjadi dalam konteks sosial, semua lembaga atau perusahaan yang menggunakan akuntansi tidak lepas dari persoalan sosial. Akan tetapi apakah keinginan itu tidak dapat diwujudkan? Berkaitan dengan hal ini, Gambling dan Karim menyatakan bahwa :

keberadaan akuntansi sosial ini memungkinkan bahwa biaya operasi perusahaan tidak sama dengan biaya sosial yang dikeluarkannya kepada masyarakat secara keseluruhan karena adanya unsur-unsur "externalities".⁴⁵

Walaupun kuatnya hukum (khususnya di Barat) membutuhkan beberapa pengungkapan tentang dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat. Namun banyak perusahaan di sana yang mengungkapkan informasi itu hanya karena kerelaan bukan kewajiban. Hal ini membuktikan bahwa fungsi sosial ini belum begitu berkembang. Solusi terhadap persoalan ini perlu dipikirkan cara pemecahannya. Salah satu cara untuk mengembangkan akuntansi sosial yang baku untuk Timur maupun Barat mungkin adalah dengan cara memperluas konsep dasar sistem zakat yang berlaku di dalam sistem Islam. Muncul pertanyaan, mengapa sistem zakat dapat dijadikan sebagai cara untuk mengembangkan akuntansi sosial yang baku untuk Timur dan Barat? Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu ditelusuri dari sisi hakikat zakat dan mekanismenya.⁴⁶

⁴⁴Sadao Takatera, *Loc. Cit.*, 1988, Hal. 104.

⁴⁵dalam Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit.*, 1997 : 193

⁴⁶Uraian lebih lanjut tentang akuntansi sosial yang didasarkan pada pengembangan sistem zakat akan dibahas pada bab IV sub bab Refleksi Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban.

D. Implikasi Teori Dan Praktek Akuntansi Dalam Laporan Keuangan

Salah satu produk dari teori dan praktek akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan-catatan atau gambaran keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan inilah yang dijadikan sumber informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan demikian peran akuntansi adalah menjadi sumber informasi utama bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan, dan bagi investor dalam memilih investasi.

Sebelum dibahas lebih rinci tentang keterkaitan antara akuntansi dengan laporan keuangan, terlebih dahulu perlu disinggung tentang sistem akuntansi dalam sistem ekonomi kapitalistik. Sebab dari sinilah muncul istilah yang dikenal dengan struktur teori akuntansi, yang tidak dapat lepas dari fenomena sosial ekonomi masyarakat. Hal ini berarti, melalui kajian mendasar mengenai fenomena atau teori ekonomi maka akan ditemukan kaitan antara teori ekonomi dengan teori akuntansi.

1. Ekonomika dan Perusahaan Kapitalistik

Sebagaimana diketahui, bahwa ilmu ekonomi yang diajarkan selama ini di Perguruan Tinggi, khususnya fakultas ekonomi di Indonesia, adalah ilmu ekonomi kapitalistik. Di sisi lain, negara kita berusaha untuk membangun sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Sebut saja sistem ekonomi Pancasila. Jika demikian, maka kondisi ini perlu diperdebatkan. Dikatakan oleh Markam, bahwa :

ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan benda-benda ekonomis, yaitu benda-benda yang terbatas jumlahnya serta memiliki alternatif penggunaan".⁴⁷

Namun dalam kenyataannya ilmu ekonomi (kapitalistik) tersebut cenderung melihat semua persoalan dari sudut pandang pemilik kapital belaka. Menurut Baswier,⁴⁸ bahwa

⁴⁷Dalam Revrison Baswier, *Loc. Cit.*, 1996, Hal. 2

⁴⁸*Ibid*, 1996, Hal. 2-4

hal itu dapat dibuktikan dengan melihat postulat, asumsi, dan prinsip ekonomi.

Postulat Ilmu Ekonomi. Postulat ilmu ekonomi kapitalistik antara lain mengajarkan agar manusia mengabaikan ada atau tiadanya Tuhan Yang Maha Esa. Jika demikian, akibat secara tidak langsung adalah ilmu ekonomi kapitalistik juga mengajarkan untuk mengabaikan ada atau tidak adanya alam akhirat.

Asumsi Ilmu Ekonomi. Asumsi ilmu ekonomi kapitalistik antara lain mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang egois, serakah dan rasional. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, bahwa : bila seorang pelayan restoran bersikap ramah terhadap anda, hal itu bukan merupakan tanda bahwa ia seorang yang baik hati, melainkan hanya sekedar suatu cara untuk mengeruk uang dari kantong anda.

Prinsip Ilmu Ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi kapitalistik antara lain mengajarkan bahwa "dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan". Oleh karena yang dimaksud dengan pengorbanan dalam hal ini adalah biaya, dan yang dimaksud dengan hasil adalah hasil penjualan, sedangkan selisih antara keduanya adalah laba, maka pada dasarnya ilmu ekonomi kapitalistik mengajarkan kepada kita "kejarlah laba sebesar-besarnya". Laba yang dimaksud di sini adalah laba dalam batas laba materil.

Berdasarkan prinsip ekonomi tersebut, maka perusahaan-perusahaan yang ada, beroperasi dengan menganut prinsip ekonomi tersebut sepenuhnya. Dengan kata lain, pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik tampak sangat jelas dalam tujuan perusahaan kapitalistik sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu ekonomi perusahaan. Sebagaimana diketahui, perusahaan adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (laba)." Namun dalam kenyataannya yang bertujuan

mencari laba itu hanyalah para pemilik kapital perusahaan.

Di sisi lain, dalam suatu perusahaan tujuan para buruh pada dasarnya adalah mencari upah. Di dalam kajian ekonomi perusahaan diketahui, bahwa upah memiliki hubungan negatif dengan laba. Dengan demikian, apabila jumlah upah besar, maka jumlah laba cenderung mengecil; sebaliknya apabila jumlah laba yang besar jumlah upah -- sebagai komponen biaya --- haruslah kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan, di dalam perusahaan kapitalistik yang berkembang berdasarkan sistem ekonomi kapitalistik, terdapat konflik permanen antara pemilik kapital (modal) dengan buruh.

Sejarah telah mencatat, bahwa negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalistik membuktikan terjadinya konflik antara para pemilik modal dengan buruh. Oleh karena itu, tidak heran jika terjadi, seperti di negara Inggris dan Australia, organisasi-organisasi buru mulai terjun ke kancan politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan para pendukungnya. Catatan sejarah yang lainnya adalah bahwa revolusi kaum buruh telah melahirkan bentuk negara-negara baru, yaitu negara komunis (walaupun sekarang sudah mulai berguguran). Kesemuanya itu, sebenarnya adalah sebagai akibat dari konflik antara buruh dengan pemilik kapital yang memuncak. Dari sini muncul negara yang didominasi oleh para pemilik modal dan negara yang didominasi oleh para buruh.

2. Akuntansi Kapitalistik

Sesuai dengan bentuk atau sistem ekonomi yang diterapkan dan dikembangkan di negara-negara Barat, maka sistem perusahaan dan akuntansinyapun tentu tidak dapat dipisahkan dari kaidah atau prinsip yang ada dalam sistem tersebut. Pendek kata, sistem ekonomi kapitalis akan memiliki sistem akuntansi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis

memiliki sistem akuntansi sosialis, dan seterusnya.

Sebagaimana telah dikutip pada Bab I, bahwa akuntansi adalah :

kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu perusahaan atau lembaga, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan.⁴⁹

Wujud akhir dari proses akuntansi dalam suatu perusahaan adalah penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan ini pada akhirnya ditujukan kepada para pemakai laporan akuntansi, terutama adalah bagi para pemilik kapital perusahaan. Oleh karena itu, hasil perhitungan akhir dari laporan keuangan (laporan pendapatan/*income statement*) adalah laporan laba atau rugi.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan laporan laba rugi tersebut? Laba atau rugi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut adalah laba atau rugi para pemilik kapital perusahaan. Padahal dalam operasional suatu perusahaan, keberadaan buruh sangat menentukan posisi laba atau rugi perusahaan. Namun terjadi sebaliknya dalam kaitannya dengan upah buruh. Pada umumnya (dalam sistem akuntansi kapitalistik) upah buruh diperlakukan sebagai biaya dan dikelompokkan bersama-sama dengan rekening-rekening harga pokok produksi lainnya (biaya bahan baku dan biaya pabrik), atau sesuai dengan bagian buruh yang bersangkutan di dalam struktur organisasi perusahaan.

Berdasarkan kejadian tersebut di atas, Baswier menggambarkan posisi laporan pendapatan dari suatu perusahaan yang mengikuti sistem akuntansi kapitalistik, sebagai

⁴⁹Belkoui, 1981, dalam Baswier, *Ibid*, 1996, Hal. 6.

berikut :

LAPORAN PENDAPATAN PERUSAHAAN XX

Penjualan Bersih		xxx
Harga Pokok Produksi :		
- Biaya Tenaga Kerja Langsung	xxx	
- Biaya Bahan Baku	xxx	
- Biaya Pabrik	xxx	
	----	(xxx)
Laba Kotor		xxx
Biaya Penjualan		(xxx)
Biaya Administrasi dan Umum		(xxx)

Laba		xxx

Tabel 1 : Laporan Pendapatan Perusahaan XXX

Lebih lanjut Baswier menganalisis, bila kenyataan sebagaimana yang tampak dalam laporan pendapatan, ternyata ilmu ekonomi kapitalistik memang mengajarkan bahwa buruh hanyalah bagian dari faktor produksi. Buruh setara dengan sumberdaya alam, teknologi, dan modal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan, bila melalui laporan pendapatan yang dihasilkan oleh akuntansi, kecenderungan ilmu ekonomi berpihak kepada para pemilik kapital perusahaan. Demikian pula halnya dengan konflik buruh-pemilik kapital. Bila upah buruh dinaikkan, laba pasti berkurang; sebaliknya, bila laba yang hendak dinaikkan, maka perusahaan, antara lain akan menekan upah buruh. Jika demikian adanya maka produk akuntansi Barat akan terus menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara buruh dengan pemilik modal. Konflik tersebut muncul karena persoalan materiil laba dan rugi yang harus diterima oleh pemilik modal.

Jika keadaan di atas terjadi, maka upaya-upaya untuk memperbaiki sistem

⁴⁹Belkoui, 1981, dalam Basweir, *Ibid*, 1996, Hal. 6.

⁵⁰Revrisond Basweir, *Ibid*, 1996, Hal. 7.

tersebut perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan atau penindasan-penindasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses produksi, tetapi tidak pernah mendapatkan imbalan yang adil.

3. Implikasi Akuntansi dalam Proses Pengambilan Keputusan

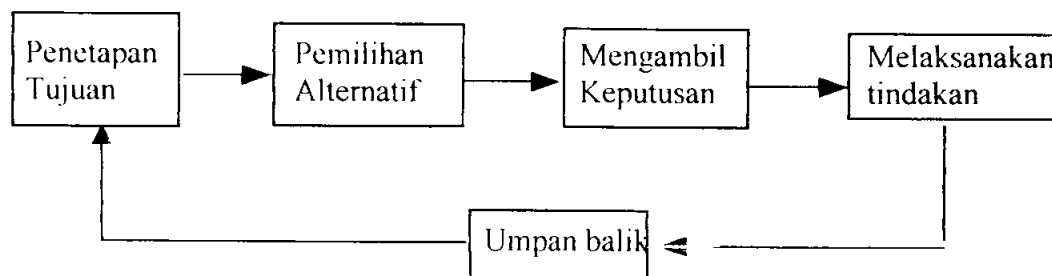
Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Pengambilan keputusan akan akurat jika didasarkan pada kelengkapan informasi atau pengetahuan yang diperlukan yang menyangkut berbagai aspek masalah yang akan diputuskan. Dengan kata lain, semakin luasnya informasi yang dimiliki pengambil keputusan, maka semakin tepat keputusan yang diambilnya. Demikian pula semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang di bidang tertentu semakin tepat keputusan yang diambilnya.

Proses pengambilan keputusan dalam ilmu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui beberapa tahap. Dalam kaitan ini Harahap mengemukakan tahap-tahap sebagai berikut :⁵¹

1. Mengidentifikasi persoalan dengan cara membandingkan keinginan dengan kejadian yang sebenarnya
2. Merumuskan persoalan utama
3. Memerinci persoalan
4. Merumuskan berbagai alternatif pemecahan
5. Memutuskan pilihan terbaik
6. Melaksanakan keputusan
7. Memonitor dan menindaklanjuti

⁵¹Sofyan Syafri Harahap, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 15-16.

Sementara tahap pengambilan keputusan lain dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3 : Tahap-tahap Pengambilan Keputusan

Pada setiap tahap pengambilan keputusan keberadaan informasi mempunyai peranan penting, baik mulai dari proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasionalisasi suatu perusahaan, informasi akuntansi inilah yang akan sangat dibutuhkan. Lebih luas lagi, informasi akuntansi bukan saja berguna bagi pemilik perusahaan, tetapi informasi akuntansi tersebut menjadi sumber informasi utama bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, bagi investor dalam memilih investasi, dan pihak lainnya.⁵²

Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana informasi Akuntansi berimplikasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan? Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu ditelusuri melalui proses akuntansi. Namun sebelumnya perlu dipaparkan beberapa pengertian akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵³

1. APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No. 4 mendefinisikan sebagai berikut "akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif".
2. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan

⁵²Sofyan Syafri Harahap, *Ibid*, 1997, Hal. 16

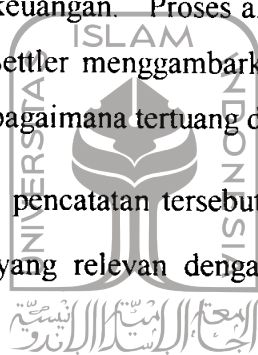
⁵³Sofyan Syafri Harahap, *Ibid*, 1997, Hal. 16 - 17.

sebagai berikut : "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peng-ikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

3. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan akuntansi adalah "proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya".

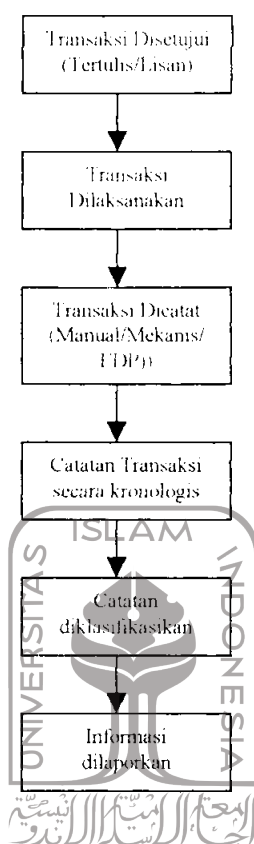
Bagaimana akuntansi dapat menyajikan informasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri proses, siklus atau prosedur akuntansi sebagai proses yang dilalui dalam menghasilkan laporan keuangan. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data. Berkaitan dengan hal ini, Settler menggambarkan elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data sebagaimana tertuang dalam halaman berikut.

Melalui langkah-langkah pencatatan tersebut, maka seluruh aktivitas akuntansi akan mampu memberikan data yang relevan dengan apa yang diperlukan oleh para pembuat keputusan.⁵⁴



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁴ Howard F. Stettler, *Auditing Principles*, (New York : Prentice Hall), 1978, h. 47.

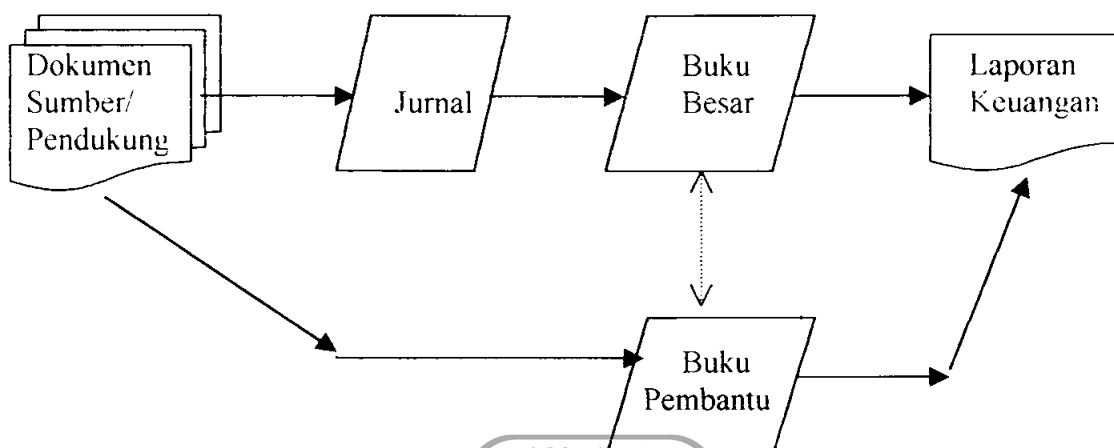


Gambar 4 : Tahap Pengolahan Data

Tahap-tahap di atas merupakan tahap yang dilalui dalam pengolahan data. Proses berawal dari seseorang atau perusahaan melakukan transaksi. Hasil transaksi dicatat, kemudian diklasifikasikan. Kumpulan transaksi disebut sebagai data atau informasi. Kemudian data atau informasi tersebut diolah untuk mendapatkan informasi yang dilaporkan dan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan akuntansi, adalah tidak jauh berbeda dengan proses pengolahan data sebagaimana tersebut di atas. Sebab transaksi perdagangan akan dicatat melalui proses akuntansi yang pada akhirnya untuk menemukan kondisi laporan keuangan perorangan atau perusahaan. Dengan demikian, siklus akuntansi dapat disajikan

sebagai berikut :⁵⁵



Gambar 5 : Siklus Sistem Akuntansi Pokok

Gambar di atas menunjukkan bahwa siklus sistem akuntansi pokok merupakan organisasi dokumen (*form*), catatan dan laporan yang terdiri atas dokumen, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Unsur sistem tersebut dirancang untuk menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan pengelolaan keuangan perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak luar seperti : investor, kreditor, pemerintah, tenaga kerja (buruh), dan sebagainya.

4. Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah Laporan Keuangan. Laporan Keuangan merupakan wujud jasa dari profesi akuntan. Laporan Keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas

⁵⁵Anonim. "Sistem Informasi Akuntansi Baitul Maal Wat Tamwil" *Modul 2*. Klinik Usaha Kecil dan Koperasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Yogyakarta. 23-27 Pebruari 1998. Hal. 26, dengan modifikasi penulis.

pengelolaan perusahaan.⁵⁶

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa jenis laporan keuangan ini sebenarnya banyak, namun menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, laporan keuangan mencakup :

- a. Neraca
- b. Perhitungan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Pendukung
- e. Catatan atas Laporan Keuangan⁵⁷

Dari berbagai jenis laporan keuangan tersebut, apakah sebenarnya isi atau elemen dari laporan keuangan. Sesuai dengan rangkaian antara akuntansi dengan laporan keuangan, maka isi atau elemen laporan keuangan menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 6 adalah berupa :

- a. Harta (*Asset*)
- b. Kewajiban atau Utang (*Liabilities*)
- c. Modal Pemilik (*Owner's equity*)
- d. Hasil (*Revenues*), Laba (*Gain*)
- e. Biaya (*Expenses*), dan Rugi (*Loses*)

Unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dalam Laporan Posisi Keuangan atau Neraca dan unsur d dan e merupakan unsur yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi. Dengan demikian laporan keuangan adalah media bagi manajemen untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi perusahaan. Kondisi keuangan tersebut meliputi

⁵⁶Sofyan Syafri Harahap, *Loc. Cit.* 1997, Hal. 38

⁵⁷dalam *Ibid*, 1997, Hal. 39-40.

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.

E. Persoalan-Persoalan Dalam Akuntansi Barat

Telaah mendalam terhadap akuntansi konvensional menunjukkan ada sejumlah persoalan penting yang perlu dicatat. Beberapa diantaranya menurut Adnan adalah sebagai berikut:⁵⁸

Pertama, persoalan kepemihakan. Akuntansi sebenarnya dapat diumpamakan ibarat alat ukur atau timbang. Sebuah alat ukur atau timbangan, selayaknya bersifat seadil mungkin, maknanya sejauh mungkin dia harus terhindar dari kondisi bias, atau ada kecenderungan untuk berat sebelah kepada pihak tertentu. Dalam konteks akuntansi konvensional, pemihakan ini terasa cukup jelas. Misalnya saja, dari berbagai buku teks akuntansi dijelaskan bahwa tujuan [utama] akuntansi [baca: penyusunan laporan keuangan sebuah entitas] adalah untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham (shareholder) atau para investor untuk tujuan pengambilan keputusan [lihat misalnya Gaffikin, 1996; Fess & Warren, 1993]. Memang betul beberapa pihak lain disebutkan sebagai pengguna laporan keuangan, seperti pemerintah, kreditur, karyawan dan semacamnya, tetapi mereka diposisikan secara marginal, bukan yang utama. Bukankah ini telah terjadi proses pemihakan yang jelas dan nyata? Sementara, Allah SWT juga sudah memberikan peringatan nyata dalam Al-Qur'an: “ ... cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan.”⁵⁹

Kedua, beberapa persoalan mendasar pada asumsi atau *basic concept*. Ada

⁵⁸M. Akhyar Adnan, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 8-10.

⁵⁹QS. Huud (11) : 85.

beberapa konsep dasar [atau sering disebut juga dengan asumsi, postulat, karakteristik dan lain sebagainya] yang bersifat kontroversial, sehingga selalu menjadi bahan perdebatan yang tiada habisnya. Sekedar contoh dapat disebutkan konsep *historical cost, conservatism, going concern, stability of the purchasing power of the monetary unit, objectivity*. Keberatan atas beberapa konsep yang dicontohkan di atas, sebetulnya tidak hanya muncul bila kita memakai perspektif norma keagamaan, misalnya, tetapi bahkan juga bila digunakan penalaran umum atau common sense. Itulah sebabnya, banyak juga keberatan justru muncul dari pakar Barat sendiri, yang menginginkan-setidaknya penyempurnaan dari kondisi status quo tersebut.

Ketiga, efek dari persoalan *basic concept* tentu saja merembes ketinggian standar, atau bahkan metode akuntansi yang dipilih. Hal ini mungkin tidak perlu dibahas lebih jauh, karena merupakan sesuatu yang amat logis. Standar dan metode akuntansi merupakan turunan dari konsep dasar yang disinggung di muka. Kalau konsep dasarnya tidak dapat diterima, maka sudah barang tentu standar dan/atau metode yang diturunkan menjadi tidak dapat diterima pula.

Berdasarkan tiga persoalan dasar tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak semua asumsi, postulat, kaidah, dan prinsip-prinsip dalam akuntansi Barat dapat diterapkan untuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Sebab lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga atau perusahaan Barat. Dengan demikian implikasi dari tiga persoalan dasar yang melekat dalam sistem akuntansi Barat jelas sangat berbeda. Sebagai contoh, kepemihakan dalam Islam adalah kepemihakan pelaporan kepada seluruh pihak yang terlibat dan terkena dampak perusahaan.

BAB IV

AKUNTANSI SYARIAH : REFLEKSI AKUNTANSI SOSIAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pendahuluan

Sebagaimana diuraikan pada Bab III, bahwa di dalam akuntansi konvensional ada sejumlah persoalan penting yang perlu dicatat. Beberapa diantaranya adalah (1) persoalan kepemilikan, (2) asumsi atau *basic concept*, (3) efek dari persoalan *basic concept* tentu saja merembes ke tingkat standar, atau bahkan metode akuntansi yang dipilih. Berangkat dari tiga persoalan dasar tersebut, maka semua asumsi, postulat, kaidah, dan prinsip-prinsip dalam akuntansi Barat dapat diterapkan untuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, perlu dirancang atau dibangun sistem, format akuntansi yang menegakkan nilai-nilai Islam. Hal ini penting, mengingat perilaku dan kelembagaan bisnis Islam memiliki karakteristik berbeda dengan perilaku dan lembaga atau perusahaan Barat.

Pembicaraan akuntansi syaria'ah (Islam), akhir-akhir ini semakin sering kita dengar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, walaupun keberadaan akuntansi syaria'ah itu sendiri -- seperti halnya dengan keberadaan sistem ekonomi Islam -- masih dipertanyakan. Pembicaraan semacam itu muncul karena ilmu akuntansi yang dipelajari sampai saat ini masih tertuju dan merujuk pada sistem akuntansi Barat, yang didalamnya mengandung persoalan sebagaimana disebutkan di atas.

Sesuai dengan tujuan bab ini, maka pembahasannya terfokus pada topik-topik

sebagai berikut : Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam; Sistem Ekonomi Islam (yang didalamnya dibahas mengenai : perkembangan pemikiran ekonomi Islam; Sistematika Nilai ekonomi Islam; Filsafat ekonomi Islam; Nilai dasar ekonomi Islam; Nilai instrumen Ekonomi Islam); Teori Akuntansi Syari'ah; dan Praktek Akuntansi Syari'ah, yang di dalamnya dibahas tentang refleksi akuntansi sosial dan pertanggungjawaban, dengan uraian sebagai berikut :

B. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bekerja, optimis, kreatif, dinamis dan inovatif. Ajaran ini dimaksudkan agar umat Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan percepatan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ajaran tersebut, Islam telah menjadi suatu agama yang memiliki kekuatan dinamis dalam dunia modern ini. Sehingga Islam telah menjadi agama yang diperhitungkan oleh agama-agama yang lain di dunia. Kondisi ini dilukiskan oleh Voll sebagai berikut :

Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam dunia kontemporer, dan pada tahun 1980-an, pada permulaan abad ke-15 H., kebangkitan Islam semakin jelas kelihatan dan terasa kuat pengaruhnya. Sejak dari Revolusi Islam Iran sampai ke wilayah Asia Tenggara dan Afrika Barat, seluruh dunia Islam terlihat bergerak secara aktif. Keyakinan keagamaan yang sebelumnya tidak tercatat kini muncul unsur-unsur utama dalam banyak peristiwa dan kejadian.¹

Kecadaan ini telah mengejutkan banyak orang, dan ini memunculkan isu-isu besar tentang hakikat kehidupan masa depan masyarakat di dunia modern. Di samping itu juga telah menimbulkan krisis bagi para pembuat kebijakan. Sampai sekarang, merosotnya

¹John Robert Voll, 1997, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, Terjemahan : Ajat Sudrajat, (Yogyakarta : Titihan Ilahi Press), 1997, Hal. 17.

pengaruh agama selain Islam telah banyak dilukiskan, dan akhirnya kematian agama selain Islam itu sendiri telah dapat diramalkan. Kemerosotan telah terjadi pada hampir semua agama-agama besar dunia, dan hal ini secara jelas telah dicatat dalam pembahasan-pembahasan mengenai Islam. Secara umum, dapat dirasakan bahwa proses modernisasi telah merusak fondasi utama suatu agama. Secara khusus dapat dirasakan bahwa sekulerisasi, pemisahan agama dari lembaga-lembaga sosial-politik, dan pandangan yang melihat agama hanya sebagai masalah individual, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses modernisasi. Walau dalam kondisi demikian ini, haruslah diyakini bahwa agama akan memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Keadaan di atas dewasa ini telah ditunjukkan, bahwa perkembangan masyarakat tampaknya mengarah kepada asalnya (*back to nature* atau *back to basic*). Ramalan Naisbitt (1994) [yang dikutip oleh Harahap (1997, 2)] sempat menterjemahkan fenomena ini dalam bukunya *Megatrend 2000*, menyebutkan bahwa masyarakat di tahun 2000 dan seterusnya semakin mengalami peningkatan kadar keberagamaan dan semangat keagamaan. Artinya masyarakat akan kembali memberikan perhatian kepada ajaran agamanya. Mengapa gejala (*fenomena*) semacam ini dapat terjadi?

Gejala tersebut muncul, karena ternyata apa yang dilakukan manusia selama ini untuk mencari kesenangannya sendiri dengan pola sendiri tidak membawa kebahagiaan. Akhirnya manusia mulai mencari kecenderungan baru, yaitu mencari cara untuk dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah kembali kepada ajaran agamanya. Dengan kata lain, perilaku dalam berbagai bidang: politik, sosial, budaya, ekonomi harus dilandaskan pada syari'ah. Sehingga wajarlah bila

perkembangan terakhir di negara kita, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis, mulai bermunculan lembaga-lembaga bisnis yang falsafah dan sistem operasionalnya didasarkan pada syari'ah.

Pergeseran masyarakat ini juga berkembang sampai ke dalam dunia ilmiah. Bagaimanapun juga, negara Barat tidak dapat selamanya menyembunyikan sumbangan perkembangan peradaban umat Islam yang telah maju lebih dahulu (615 - 1250) dengan puncaknya tahun 900 - 1200 Masehi, sedangkan peradaban Barat sekitar tahun 1350 sampai sekarang. Islam lebih dahulu memiliki pemikir-pemikir terkemuka yang selama ini disembunyikan, seperti : Ibn Rusyd, Ibn Sina, Maskaweh, Aljabar, Alkhawariz. Menurut Watt (1995) dinyatakan bahwa "Islam telah memberikan sumbangan besar terhadap kebudayaan Barat". Dari sini jelas bahwa dinamika masyarakat Islam dalam kancan perkembangan peradaban umat manusia memberikan sumbangan yang begitu besar. Akan tetapi, kenyataan masyarakat Islam apabila dibandingkan dengan masyarakat Barat jauh ketinggalan. Khusus dalam bidang ekonomi, masyarakat muslim atau negara-negara Islam masih berada dalam kelas masyarakat atau negara menengah ke bawah. Berkaitan dengan ini Shopiaan menyatakan :

Perkembangan dunia dewasa ini dan beberapa dekade mendatang tampaknya masih akan didominasi dengan persoalan ekonomi. Terlebih lagi sejak usainya perang dingin, perkembangan dunia selanjutnya praktis diwarnai ketegangan ekonomi antara Blok Selatan yang mayoritas adalah negara-negara berkembang (miskin), dengan Blok Utara yang merupakan negara-negara industri maju.²

Kondisi semacam ini merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi dunia atau masyarakat Islam pada khususnya. Untuk lepas dari persoalan tersebut,

²Ainur R. Shopiaan (ed.), *Etika Ekonomi Politik : Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti), 1997, Hal. v.

maka beberapa negara telah membentuk gerakan-gerakan pembaharuan. Kristalisasi pertama terwakili dalam gerakan Non-Blok (GNB), sementara yang kedua tercermin dalam apa yang lebih sering disebut sebagai G-7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada, Inggris, Perancis dan Italia. Belakangan lagi Rusia diikutsertakan menjadi anggota G-8 pada KTT 1997 yang lalu. Sementara itu, negara-negara Islam membentuk organisasi IFTA (*Islamic Free Trade Agreement*).

Walaupun kelompok negara Islam telah memiliki gagasan IFTA yang kini dipelopori oleh Pakistan, Iran, Turki dan beberapa negara Islam bekas Republik Sosialis Sovyet, namun, hingga kini gagasan IFTA itu belum menjadi agenda atau persoalan yang fundamental untuk dibicarakan pada forum-forum Islam internasional semacam OKI. Padahal persoalan inilah yang menjadi masalah yang kini dihadapi oleh sebagian besar negara-negara Islam. Hampir semua negara Islam menghadapi masalah mulai dari kemiskinan struktural, kesenjangan pendapatan yang terlalu lebar, lemahnya sumber daya manusia sampai pada persoalan ekonomi makro, seperti strategi pembangunan nasional dan politik ekonomi yang berpihak pada keadilan dan kemakmuran.

Negara-negara Islam tengah menderita keterbelakangan ekonomi secara luar biasa, yaitu mubazirnya atau kurang dimanfaatkannya sumberdaya manusia dan fisik. Akibatnya kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi terjadi di mana-mana. Meskipun negara itu termasuk kaya sumber daya, namun keadaan ekonominya tetap tidak berkembang. Standar hidup rata-rata penduduknya masih rendah. Menurut Ahmad, “sebagian negara dalam dua dasawarsa terakhir ini mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata (tingkat pertumbuhan di atas rata-rata negara kurang

berkembang), tetapi secara riil tetap saja tidak ada pembangunan ekonomi”.³

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana negara-negara Islam dapat keluar dari persoalan penting yang terjadi sebagaimana di atas? Secara makro kita mengetahui bahwa negara-negara Islam tidak memiliki strategi pembangunan yang benar-benar didasarkan pada prinsip Islam. Bahkan secara ideologis politik-ekonomi, negara-negara tersebut masih berangkat dari falsafah Kapitalisme dan Sosialisme. Padahal menurut Shopiaan dinyatakan, bahwa :

nilai-nilai moralitas pembangunan dan kerjasama di antara negara berkembang tersebut dapat pula menjadi gambaran betapa konsepsi pembangunan masyarakat Islam haruslah didasarkan pada formulasi dasar-dasar etik yang digali dari semangat al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴

Islam adalah agama universal yang sederhana, mudah untuk dipahami dan dirasionalisasikan. Islam ada didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu : *tauhid*, *khalifah*, dan *adalah* [keadilan].⁵ Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar tujuan akhir (*maqasid*) syari'ah, tetapi juga merupakan strategi untuk mewujudkan syari'ah tersebut. Dalam rangka menegakkan syari'ah Islam secara benar dan utuh, maka Allah memberikan suatu keistimewaan kepada manusia. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah manusia diangkat oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi, merupakan amanah berat yang harus dijalani manusia dalam kehidupannya. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang

³Khurshid Ahmad, *Economic Development in An Islamic Framework*, (London : The Islamic Foundation), 1997, Hal. 223.

⁴Ainur R. Shopiaan (ed.), *Opcit*, 1997, Hal. vii

⁵M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*. (United Kingdom : The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought), 1992, Hal. 201.

lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mendapatkan amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Pihak yang diamanahi memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan masalah amanah ini, ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu : pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah adalah Allah SWT. Penerima amanah adalah manusia. Amanah adalah sesuatu yang dijalankan, dimakmurkan sehingga membuat sang pemberi amanah tidak murka.

Ketegasan Allah tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi, telah menimbulkan protes keras dari kaum Jin. Allah berfirman : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : *”Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”*.⁶ Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.⁷ Khalifah adalah sebuah fungsi yang diemban oleh manusia berdasarkan amanah yang diterimanya dari Allah. Amanah itu pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.⁸

Dalam kancah kehidupan umat manusia, -- di berbagai bidang kehidupan, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun bisnis -- semua manusia dibebani untuk

⁶QS. Al-Baqarah (2) : 30.

⁷QS. Faathir (35) : 39

⁸M. Dawam Rahardjo, “Khalifah”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, VI (1), (Jakarta : Ulumul Qur’an), 1995, Hal. 47.

lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mendapatkan amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Pihak yang diamanahi memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan masalah amanah ini, ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu : pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah adalah Allah SWT. Penerima amanah adalah manusia. Amanah adalah sesuatu yang dijalankan, dimakmurkan sehingga membuat sang pemberi amanah tidak murka.

Ketegasan Allah tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi, telah menimbulkan protes keras dari kaum Jin. Allah berfirman : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"*.⁶ Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.⁷ Khalifah adalah sebuah fungsi yang diemban oleh manusia berdasarkan amanah yang diterimanya dari Allah. Amanah itu pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.⁸

Dalam kancah kehidupan umat manusia, -- di berbagai bidang kehidupan, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun bisnis -- semua manusia dibebani untuk

⁶QS. Al-Baqarah (2) : 30.

⁷QS. Faathir (35) : 39

⁸M. Dawam Rahardjo, "Khalifah", *Jurnal Ulumul Qur'an*, VI (1), (Jakarta : Ulumul Qur'an), 1995, Hal. 47.

dapat menjalankan amanah dari Allah secara bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa manusia dengan predikat khalifah Allah di muka bumi, mengemban amanah dan tugas tertentu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, harus berdasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*). Sebab apa yang dilakukan atau aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan, atau setiap langkah, sepaik terjang manusia harus mencerminkan dimensi kekhalfahan secara individual maupun secara komunal.⁹

Rasa pertanggungjawaban kekhalfahan manusia di muka bumi, tercermin dalam sikap senang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ditegaskan Allah dalam firman-Nya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.¹⁰ Rahmat adalah kebaikan, kesejahteraan, atau kemudahan bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Di samping rahmat, pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah tercermin dalam sifat adil. Allah mengungkapkan dalam firman-Nya : “... sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”.¹¹ Allah SWT. menghendaki agar manusia di saat melakukan kegiatan muamalah (bisnis dan ekonomi) harus dikelola dan dilakukan dengan cara-cara yang adil. Untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud adil, penerima amanah (manusia) dapat menggunakan potensi internal yang dimilikinya secara baik dan seimbang. Menurut Triyuwono “potensi internal tersebut

⁹Iwan Triyuwono, “Akuntansi Syariah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah”, *Kerta Kerja*, Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Surakarta, 24 Februari 1997. Hal. 9.

¹⁰QS. Al-Anbiyaa’ (21) : 107.

¹¹QS. Shaad (38) : 26.

adalah akal dan hati nurani".¹² Melalui kedua potensi tersebut diharapkan manusia mampu membaca kehendak Tuhan baik yang terwujud secara verbal maupun non verbal. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka penghambaan manusia kepada Tuhan. Sehingga Allah berfirman : "Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".¹³ Dengan demikian seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini dilakukan semata-mata ditujukan untuk ibadah kepada Allah. Perilaku-perilaku bisnis atau ekonomi manusia di muka bumi harus dilakukan dalam kerangka dimensi ibadah. Kesemuanya ini dilakukan agar manusia dalam kehidupannya dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sementara itu, konsep dinamika masyarakat dalam membangun dirinya terwujud dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan pembangunan yang Islami, khususnya pembangunan ekonomi Islami. Konsep pembangunan masyarakat dan ekonomia adalah dua konsep yang berdampingan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Konsep pembangunan ekonomi Islami, tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan Islami. Apakah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Menurut Chapra dirumuskan sebagai berikut :

pembangunan ekonomi sasaran utamanya adalah peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan total jumlah penduduk.¹⁴

¹²Iwan Triuwono, *Op. Cit.*, 1997, Hal. 10.

¹³QS. Adz-Dzariat (51) : 56.

¹⁴M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom : The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought), 1992, Hal. 12.

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkan pembangunan umat manusia sebagai masalah yang lebih penting dan lebih besar. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dengan arah yang tepat. Oleh karena itu, apabila kita memiliki komitmen pada pembangunan ekonomi, semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Disamping itu kerangka landasannya harus jelas dan kokoh. Menurut Chapra ada lima dasar filosofis yang melandasi berlangsungnya pembangunan kehidupan umat, yaitu :

dalam rangka membangun seluruh bidang kehidupan umat, harus didasarkan pada lima dasar filosofis, yaitu : (1) *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya. (2) *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan islam; (3) *Khilafah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, etika serta prinsip-prinsip organisasi sosial; (4) *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara; dan (5) Hasil dari tazkiyah adalah *Falah*, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Selain lima dasar pokok tersebut dalam kerangka Islam, pembangunan adalah aktivitas yang multidimensional. Semua usaha harus diarahkan kepada keseimbangan dari berbagai faktor dan tidak ada ketimpangan diantaranya. Pembangunan akan menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan dua aspek ini harus seiring, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan, kesenjangan atau *gap* yang terlepas dari prinsip kebenaran dan keadilan. Sebab Islam menganjurkan sifat syukur dan keadilan, serta mengutuk sifat kufur dan dhalim.

¹⁵*Ibid*, 1992, Hal. 13.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi Islam, persoalan fundamental yang muncul adalah berkaitan dengan langkah ke depan pembangunan ekonomi Islam, sehingga apa yang perlu dipersiapkan pada saat sedang memasuki langkah awal membangun ekonomi Islam? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan kajian mendalam tentang model pertumbuhan ekonomi dan ketepatan pengambilan keputusan. Dalam situasi demikian ini, kita tidak perlu menggunakan model pertumbuhan untuk tujuan pengambilan keputusan, akan tetapi pendekatan yang mungkin pas adalah, kita harus mengadopsi pendekatan multiobyektif terhadap pembangunan, atau menurut Chapra disebut dengan pendekatan *problem-oriented* serta mengevaluasi keberhasilan perencanaan dan kegiatan pembangunan di daerah-daerah tertentu (khusus).¹⁶

Hasil dari pembangunan ekonomi biasanya diwujudkan dalam bentuk produk yang seharusnya dimiliki oleh warga negara dan terdistribusikan secara adil. Sehingga ada dua konsep utama dalam kerangka sistem ekonomi Islam, yaitu kerangka kepemilikan dan keadilan. Berkaitan dengan persoalan kepemilikan Saefuddin berpendapat, bahwa :

salah satu nilai dasar ekonomi [Islam] sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid adalah kepemilikan (*ownership*). Realitas kepemilikan mutlak tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena hal itu berarti menerima konsep kepemilikan mutlak yang jelas berlawanan dengan tauhid. Kepemilikan mutlak hanya ada pada Allah swt semata; sedangkan kepemilikan manusia itu relatif belaka.¹⁷

Barangkali kita perlu bertanya tentang apa yang telah kita lakukan selama ini. Apakah kepemilikan yang ada pada diri kita ini sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Bagaimanakah kepemilikan kita direalisasikan? Untuk menjawab pertanyaan prinsip ini,

¹⁶ *Ibid*, 1992, Hal. 20.

¹⁷ A.M. Saefuddin, "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", *Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah*, Yogyakarta, tanggal 18 - 21 Agustus 1997, 1995, Hal. 73.

perlu mempelajari sistem kepemilikan yang sebenarnya ada dalam Islam sehingga ditemukan hasil yang konsisten dengan tujuan Islam. Bagaimanakah hasil pembangunan ekonomi yang Islami itu? Kepemilikan dan keadilan pembangunan ekonomi dapat benar-benar terwujud apabila tidak terjadi akumulasi modal dan sentralisasi kekuasaan. Hal ini juga akan mengantarkan kepada konsep etika ekonomi Islam.

Disamping persoalan kepemilikan dan keadilan, dasar untuk membentuk etika ekonomi Islam, menurut Chapra adalah keadilan dan keamanan.¹⁸ Kedua hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka terciptanya kehidupan manusia yang bertaqwa dan saleh. Setiap pilihan ekonomi akan selalu dilengkapi dengan pilihan etik. Terlebih lagi apabila pilihan itu dihadapkan pada seorang wiraswasta. Pilihan ekonomi dan etik ini amat penting, apakah itu yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan tentang harga, pengalokasian sumber daya, atau membagi keuntungan, semuanya harus dikaji dari aspek ekonomi maupun etik.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa keadilan merupakan konsep yang sangat komprehensif. Keadilan adalah konsep yang menyangkut semua segi kehidupan umat manusia. Melalui keadilan akan membuahkan keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan dengan keadilan hukum. Dengan demikian, setiap bentuk yang berlawanan dengan sifat adil dipandang sebagai penindasan (*zulm*). Dari uraian di atas dapat dirumuskan, bahwa ide keadilan ekonomi Islam didasarkan pada dua unsur: *Pertama*, bentuk keseimbangan dan proporsi yang harus dipertahankan di antara masyarakat dengan mengindahkan hak-hak mereka. *Kedua*, bagian yang menjadi hak setiap orang dengan penuh kesadaran harus diberikan kepadanya, apa yang dituntut dalam hal ini adalah keseimbangan dan proporsi yang tepat bukannya persamaan.

Proses membangun sebuah sistem baru yang berlandaskan pada etika ekonomi Islam, harus dilakukan sesuai dengan kaidah Islam. Kaidah itu menurut Shopiaan adalah sebagai berikut :

... ada resep khusus yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi Islam, yaitu : penafsiran dan pengembangan ekonomi Islam ternyata lebih kaya dan yang penting menjadi lebih relevan jika didasarkan pada pengalaman-pengalaman konkrit pembangunan yang sarat dengan etik, baik di negara-negara Muslim maupun di Indonesia. Dalam mencari hukum-hukum ekonomi sejalan dengan asas *rububiyah*, pengalaman-pengalaman praktik merupakan bahan bagi validasi hukum-hukum ekonomi tersebut. Dengan pendekatan ini, maka kita perlu memulai dengan kerja praktik pembangunan, berdasarkan teori dan konsep-konsep yang mapan.¹⁹

Walaupun kita telah memiliki resep khusus dalam pembangunan ekonomi, tetapi harus diingat, paradoks dunia Islam dewasa ini adalah dunia yang kaya di bidang sumber daya, tetapi secara ekonomis miskin dan lemah. Pembangunan ekonomi sudah mulai dilakukan di beberapa negara Islam. Sebagian sudah mencapai tingkat yang cukup maju, seperti Negeria, Mesir, Syria, Aljazair, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia. Namun, menurut Shopiaan dikatakan bahwa :

hampir di semua negara tersebut pola pembangunannya merupakan prototipe pertumbuhan yang dirancang pakar dan praktisi Barat yang kemudian "dijual" kepada perencana negara-negara Islam melalui diplomasi internasional, tekanan ekonomi, *infiltrasi* intelektual dan cara-cara lain yang terbuka maupun tertutup.²⁰

Padahal, sumber daya apapun yang hendak dijadikan sumber inspirasi Ekonomi Kapitalis Barat atau Ekonomi Sosialis Sovyet tidak akan berarti apapun bagi pengembangan nilai-nilai Islam dan strategi pembangunan berdasarkan prinsip Islam.

¹⁸M. Umer Chapra, *Op.Cit*, 1992, Hal. 85.

¹⁹Ainur R. Shopiaan (ed.), *Loc.Cit*, 1997, Hal. 10

²⁰Ainur R. Shopiaan (ed.), *Ibid*, 1997, Hal. 4

Salah satu versi pembangunan ekonomi itu telah diterjemahkan menjadi gagasan kebijakan negara, yaitu industrialisasi. Gagasan industrialisasi ini sangat tergantung pada upaya pembentukan modal. Sebab industri dipandang sebagai sektor yang sangat penting dan investasi yang paling menguntungkan sekaligus dipercaya sebagai jalan utama menuju "impian pembangunan" (*development dream*) yang menyenangkan.

Semua bukti di atas, menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas Islam. Kalaupun nafas Islam ditampilkan, paling-paling yang tergambar adalah salah satu dari kedua bentuk berikut: (1) Sebagian memperdulikannya sekedar untuk mencari pengabsahan (*legitimation*) bagi kebijakan yang sudah diambil. (2) Sebagian lagi menjadikannya sebagai titik rujukan (*point of reference*) untuk mengkritik kebijakan dan pembangunan.

Demikianlah gambaran dinamika masyarakat muslim dalam menjalankan pembangunan masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Kesemuanya dilakukan dalam rangka menemukan format pembangunan dan perjalanan masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah al-Qur'an dan as-Sunnah.

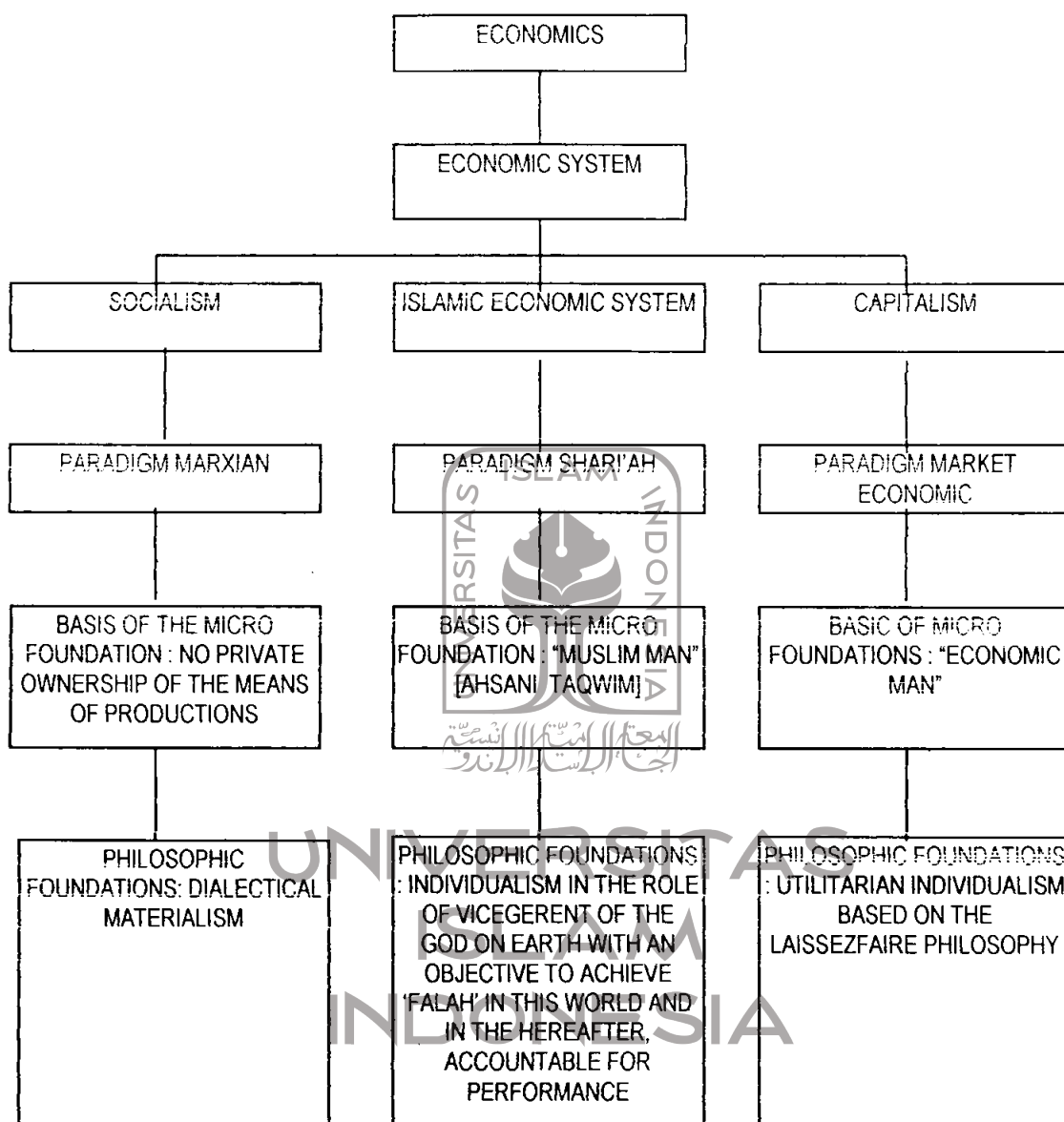
C. Sistem Ekonomi Islam

Ada dua aliran besar sistem perekonomian yang dikenal di dunia, yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa aliran kapitalisme dapat dikatakan mendominasi praktik ekonomi di berbagai belahan bumi ini, karena 'terbukti' bahwa aliran ini lebih menjanjikan kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan semua sistem perekonomian. Sementara itu, aliran sosialisme tampak menjadi semakin kurang populer, karena terbukti dari beberapa negara

yang menerapkannya, tingkat kemakmuran yang dicapai, kalah jauh dari negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu, dapat disaksikan akhir-akhir ini semakin banyak negara yang mengorientasikan sistem ekonominya menjadi kapitalisme.

Kalau dicermati lebih jauh, ada sebuah sistem lain yang berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialis, yakni sistem ekonomi Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan diantara berbagai pihak --- termasuk perbedaan pendapat dikalangan para pakar Muslim sendiri --- ternyata masih ada sebagian kalangan yang mempertanyakan apakah perlu dipakai istilah "sistem ekonomi Islam" atau tidak. Berdasarkan gambar berikut, terbukti bahwa sistem ekonomi Islam --- dipandang dari sudut pandang keilmuan --- dapat disejajarkan dengan kapitalisme atau sosialisme sebagai sebuah sistem. Hal ini didasarkan pada argumentasi, bahwa sistem ekonomi Islam dapat memenuhi semua persyaratan yang dituntut agar sesuatu sah diklasifikasikan sebagai sebuah sistem. Misalnya saja, kalau dalam kapitalisme dan sosialisme ada paradigma, dasar fondasi mikro (*basis of mikro foundations*), dan landasan filosofis (*philosophic foundations*), sistem ekonomi Islam juga mempunyai semua unsur tersebut. Oleh sebab itu sistem ekonomi Islam sah bila disejajarkan dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Perbandingan ketiga sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut.²¹

²¹Muhammad Arif, "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics : The Beginning of a Scientific Revolution", *The American Journal of Islamic Social Science*, Vol. 2 No. 1. 1985, p. 98.



Gambar 6 : Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialis, Islam dan Kapitalis

Sumber : Muhammad Arif, "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics : The Beginning of a Scientific Revolution", *The American Journal of Islamic Social Science*, Vol. 2 No. 1. 1985, p. 98.

Hal penting yang dapat ditarik dari gambar di atas adalah, *Pertama*, sistem ekonomi Islam menurut pendekatan keilmuan sejajar keberadaannya dengan kapitalisme

dan sosialisme. Kedua, siapapun dapat melihat bahwa sistem ekonomi Islam tidak sama, baik dengan kapitalisme maupun sosialisme. Ketiga, sistem ekonomi Islam tidak bisa dikatakan secara sederhana meskipun posisinya berada ditengah atau diantara kedua sistem yang ada. Gambar di atas secara gamblang menunjukkan adanya perbedaan sangat mendasar dalam hal paradigma, dasar fondasi mikro, maupun landasan filosofisnya. Perbedaan-perbedaan ini tentu memberi akibat pada tataran lebih rendah. Sekedar contoh yang paling mudah, bagi paham kapitalisme adalah sah saja bagi seseorang untuk berdagang apa saja, sejauh hal tersebut memberikan keuntungan. Akan tetapi sistem ekonomi Islam tidaklah demikian, ada ketentuan yang mengatur, misalnya untuk tidak boleh memperdagangkan komoditi atau jasa tertentu yang melanggar aturan syariah, seperti babi, minuman keras, perjudian dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, terbukti bahwa sistem kapitalisme tidak dapat disamakan dengan sistem ekonomi Islam --- baik dari aspek filosofisnya, apalagi dalam tataran teknis atau metodenya --- konsekuensinya adalah harus ada kejelian dan kehati-hatian dalam pemakaian instrumen atau alat. Akuntansi selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen ekonomi. Oleh karena itu, layak dipertanyakan apakah akuntansi yang sekarang ada dan tentunya sangat dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme, dapat dipakai begitu saja dalam kegiatan komersial yang berangkat dari nilai yang berbeda dengan nilai Islam?

Pembicaraan mengenai Sistem Ekonomi Islam, pada beberapa tahun terakhir ini mulai mencuat ke permukaan. Namun pembicaraan itu acapkali membosankan, karena pembahasannya cenderung dengan pendekatan *fiqiyah* atau masih bersifat normatif. Pembicaraan semacam ini bukan saja dilakukan oleh para kiyai, ulama, atau para santri, tetapi juga oleh kebanyakan ekonom Muslim. Sementara bahasan yang berkenaan dengan

praktek ekonomi Islam belum banyak dilakukan. Firman Allah dinyatakan dalam salah satu ayatnya, bahwa “umat Islam harus menjalankan ajaran Islam secara kaffah”.²² Perintah ini memacu ummat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, baik : politik, sosial, budaya dan juga aspek ekonomi, disamping aspek keagamaan, serta mencakup seluruh teori dan prakteknya. Disinilah letak agama Islam sebagai agama "*rahmatan lil 'alamin*".

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sub sistem dari supra sistem ajaran Islam. Sebagai sebuah sub-sistem, sistem ekonomi Islam tegak dan ditegakkan dengan bertumpu pada pilar-pilar atau landasan yang kokoh.²³ Menurut Dumairy pilar-pilar atau landasan itu adalah : 1) Nilai Dasar; 2) Nilai Instrumental; 3) Nilai Filosofis; 4) Nilai Normatif; dan 5) Nilai praktis. Untuk dapat menjalankan suatu sub atau sistem baru dari kerangka sistem yang telah ada harus mengkaji terhadap pilar-pilar tersebut sehingga apa yang direncanakan dan akan dilaksanakan dapat diwujudkan, tanpa banyak menimbulkan dampak kurang baik kepada masyarakat pemakai.

Kajian secara benar dan tulus terhadap pilar-pilar atau landasan tersebut akan mengenai sasaran apabila kita dapat menemukan takaran atau standar baku. Standar baku adalah takaran benar dan tulus menurut hukum-hukum Ketetapan-Nya (*Sunatullah*) juga

²²QS. *al-Baqarah* (2) : 208.

²³Dumairy, “Sistem Ekonomi Islami”, *Kertus Kerja*, Prasaran Seminar Ekonomi Islam dalam rangka Pembukaan dan Kuliah Perdana STIS Yogyakarta, tanggal 9 Agustus 1997, Ambarukmo Hotel Yogyakarta. 1997, Hal. 2-3.

disebut menurut sistem-Nya.²⁴ Kajian Ekonomi Islam adalah kajian yang memfokuskan pada pembicaraan tentang ekonomi yang berlandaskan pada syari'ah Islam sehingga ada yang menyebutnya sebagai ekonomi syari'ah. Kendatipun yang dimaksudkan di sini adalah syari'ah Islam. Kata-kata ini dapat diterima tidak bersifat otomatis, melainkan melalui pelajaran. Intinya perlu mengetahui pendekatan sistem dan mampu menerapkannya dalam mengenali hal, dengan catatan kata **hal** digunakan untuk menyatakan apa saja yang dijumpai dalam kehidupan, termasuk untuk menyatakan kehidupan itu sendiri. Di antaranya adalah kehidupan ekonomi.

Dengan demikian, bangun ekonomi Islam/Syari'ah (yang didalamnya diantaranya mencakup ilmu manajemen atau akuntansi) akan menjadi sebuah sistem ekonomi yang kokoh apabila dari seluruh aspek bangun sistem tersebut dapat dikenali berdasarkan sistem-Nya atau pendekatan sistem. Aspek-aspek tersebut meliputi : ilmu, teori, model, kebijakan serta praktek ekonomi. Dengan demikian, secara parsial menurut Dumairy dapat dirumuskan :

Ilmu ekonomi yang islami ialah ilmu ekonomi yang bernafaskan Islam, diciptakan dengan sendi dan landasan ajaran islam; teori dan model ekonomi yang islami ialah teori dan model ekonomi yang bernafaskan Islam, disusun dan dibentuk dengan bersendikan dan berlandaskan ajaran Islam; kebijakan ekonomi yang islami ialah kebijakan ekonomi yang bernafaskan Islam, dirancang dan dilaksanakan dengan bersendikan dan berlandaskan ajaran Islam, yaitu suatu kehidupan yang perekonomiannya dijalankan berdasarkan ilmu, teori, serta kebijakan yang bernafaskan Islami.²⁵

²⁴Poernomosidi Hadjisarosa, "Nasakah Ringkas mengenai : Mengenali Ekonomi Syari'ah dengan Menempuh Pendekatan Sistem (Bagian Pertama) dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah yang Semestinya Berlangsung di Indonesia (Bagian Kedua)", *Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah*, Yogyakarta, tanggal 18 - 21 Agustus 1997, Hal. 4.

²⁵Dumairy, *Op.Cit.*, Hal. 5.

Berdasarkan definisi di atas, muncullah berbagai pertanyaan : apakah untuk menjalankan suatu perekonomian secara Islam harus dengan ilmu-teori-model-kebijakan ekonomi yang juga islami? Tidak cukupkah hanya dengan kebijakannya saja yang islami, sedangkan ilmu dan teori serta model-modelnya adalah sebagaimana yang sudah ada? Bukankah suatu ilmu bersifat tanpa memandang keadaan khas masyarakat atau bangsa di suatu tempat? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini oleh semantara kalangan, terutama kalangan ilmuwan dari negeri-negeri yang tidak pernah melahirkan sesuatu ilmu, sering dianggap kekanak-kanakan. Sesungguhnya, pertanyaan-pertanyaan mendasar demikian justru teramat berharga untuk tidak diabaikan.

Perekonomian adalah sebuah sistem. Unsur-unsurnya meliputi ilmunya itu sendiri, teori-teorinya, model-modelnya, kebijakan-kebijakannya dan prakteknya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Disinilah perlunya kita dekati ilmu tersebut dengan mengenali sistemnya. Artinya, mencoba menjalankan sebuah sistem tanpa mengikutsertakan seluruh unsur yang membentuk dan menjadi perangkat sistem tersebut, merupakan usaha menegakkan benang basah. Demikian pula, berusaha mempraktekkan kehidupan ekonomi secara Islam dengan hanya mengandalkan kebijakan ekonomi yang Islami, tanpa keislaman unsur-unsur lain yang ada dalam sistem ekonomi tersebut, tidak berbeda dengan pekerjaan menegakkan benang basah.

Melaksanakan sistem ekonomi yang islami, guna mendapatkan kehidupan ekonomi yang islami pula, tidak dapat tidak harus didukung oleh ilmu ekonomi yang islami. Filosofi sebuah ilmu akan mendasari teori dan model-model yang diturunkan darinya. Pada gilirannya, filosofi tersebut akan mewarnai kebijakan-kebijakan dan praktek dalam

kehidupan. Sebagai contoh, praktek kehidupan ekonomi liberal-kapitalistik yang umumnya berlangsung di berbagai bagian dunia saat ini, merupakan pengejawantahan dari ilmu ekonomi yang terlahir dari masyarakat yang berfilosofis liberal-kapitalistik. Begitu pula, praktek kehidupan ekonomi sosialis yang umumnya berlangsung di negeri-negeri komunis-sosialis, merupakan perpanjangan dari filosofi sosialisme yang menjiwai sistem (ilmu, teori, model, dan kebijak-kebijakan) ekonominya.

Apabila perekonomian yang dijalankan hanya kebijakan-kebijakannya saja yang islami sehingga diklaim sebagai "ekonomi yang islami", padahal ilmu ekonomi yang menjadi rujukannya bukan merupakan ilmu ekonomi yang islami, maka hal itu sama saja artinya dengan islamisasi ilmu ekonomi yang bersangkutan. Sama saja maknanya dengan berapologi mencari-cari pembenaran sesuatu yang tidak islami agar sesuai dengan ajaran Islam. Bukan kehidupan ekonomi islami yang seperti ini yang diinginkan oleh umat Islam. Bukan ekonomi islami yang merupakan hasil pemufakatan antara ide ekonomi non-islami dengan kaidah-kaidah keislaman. Melainkan ekonomi islami yang murni bersumber dan digali dari ajaran Islam, dengan al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama serta Ijtihad sebagai rujukan tambahan. Filosofi dari masing-masing dan untuk seluruh unsur sistem perekonomian tersebut haruslah Islam, tidak dapat ditawar-tawar.

Oleh karena itu, kejelasan dan ketegasan suatu konsep terlebih dahulu perlu dirumuskan dan dimatangkan, sebelum diusahakan untuk direalisasikan. Ibarat gagasan membangun sebuah proyek, terlebih dahulu harus jelas dan tegas proyek apa yang akan dibangun, kemudian diteliti kemungkinan faktor-faktor yang mendukungnya, barulah pembangunannya dilaksanakan. Tanpa usaha-usaha awal semacam ini sebuah konsep

akan tetap berupa konsep, gagasan akan tetap gagasan, tidak pernah terealisasi. Dengan kata lain, diperlukan upaya pendekatan sistem untuk melakukan berfikir mengenali tentang berbagai faktor dan kemungkinan kekokohan bangun sistem Ekonomi Islam yang semestinya, baru kemudian dilakukan berfikir untuk melaksanakannya.

1. Perkembangan Pemikiran Ekonomi

Kalau kita belajar dari sejarah, pada abad ke-7 sampai abad ke-14, merupakan abad keemasan umat Islam. Pada masa itu, ekonomi dan agama menyatu, tidak terpisah. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat pun demikian, ekonomi terkait dengan agama. Ahli ekonomi Barat adalah pendeta dan sekaligus ahli agama. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh orang-orang gereja seperti Thomas Aquinas, Augustin dll. Para fisiokrat telah berfikir tentang tanah dan orang berdasarkan kekristenan. Tetapi dengan adanya revolusi industri dan produksi masal, ahli ekonomi Barat mulai memisahkan kajian ekonomi dari agama. Kita mengenal keadaan seperti ini sebagai revolusi awal tentang kekuasaan gereja, dan merupakan awal kajian ekonomi yang menjauhkan dari pikiran ekonomi skolastik. Sejak itu sejarah berjalan terus sampai keadaan dimana pemikiran dan kajian ekonomi yang menentang agama mulai mendingin.

Para ekonom kontemporer mulai mencari lagi sesuatu yang hilang itu, sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral dan humanis. Ekonom Gunnar Myrdal dalam bukunya *Asian Drama*, menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Muncul pula wajah kajian ekonomi baru dengan pendekatan

humanistik dari Eugene Lovell dalam bukunya yang terkenal *Humanomics* dan Schumacher dalam bukunya *Small is Beautiful, Economics as if people mattered*. Para ekonom ini, menurut Saefuddin telah menyadari sepenuhnya bahwa :

meniadakan hubungan kajian ekonomi dengan nilai-nilai moral humanis adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini tumbuh setelah semua bangsa menyaksikan sendiri hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan model leberal-kapitalistik dari teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model *marxist* dan *neo marxist* yang keduanya ini mengutamakan kehidupan *materialistik hedonisme*. Hasil model ini misalnya : kemiskinan di tengah kemakmuran, konsumerisme, budaya permissive dan rupa-rupa bentuk pop-hedonisme, gaya hidup yang sekuler dan sinkretis dan lainnya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai agama.²⁶

Setiap aliran pemikiran dan agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana tampilan yang tercermin pada tingkah laku ekonomi manusia pengikutnya. Kajian ilmu ekonomi pada abad dewasa ini mengarah kepada pemikiran ekonomi *humanis*. Yakni ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (*logica*), kebaikan (*ethica*) dan keindahan (*aesthetica*). Ekonomi yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi adalah ekonomi yang diciptakan untuk melahirkan keadilan dan melenyapkan ketimpangan.

Islam adalah agama wahyu yang dirisalahkan sejak manusia pertama yakni Nabi Adam AS, dan dilanjutkan, disempurnakan melalui nabi-nabi Allah sampai kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Yang menjadi sumber dan pedoman tingkah laku manusia.

²⁶A.M. Saefuddin dalam Adi Sasono, dkk., *Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*, (Jakarta : Gema Insani Press), 1998, Hal. 30

Oleh karena tingkah laku ekonomi itu bagian dari tingkah laku manusia, maka ilmu dan aktivitas ekonomi harus berada dalam naungan Islam. Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bagian dari ilmu agama Islam. Oleh karena itu ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari suprasistemnya yaitu Islam, yang dapat digali dari al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian ilmu ekonomi yang ada berasaskan iman, sebagaimana firman Allah yang artinya :

*“Celakalah (siksalah) untuk orang-orang yang menipu. Bila mereka menimbang dari manusia untuk dirinya, mereka sempurnakan (penuhi). Dan bila mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Tiadakah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan ? Pada hari yang besar (kiamat) ? yaitu pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.*²⁷

Dalam tarikh Islam, Nabi Syu'aib AS. banyak disebut sebagai nabi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang dikembangkan adalah berdasarkan ekonomi ketauhidan terhadap adanya Allah dan hari pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya :

*“Telah kami utus kenegeri Madyan seorang saudaranya, Syu'aib ia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan selain daripadanya; dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam kebaikan dan aku takut terhadap kamu akan siksaan hari yang meliputi kamu. Hai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan keadilan dan janganlah kamu kurangkan hak orang sedikit juga dan janganlah pula berbuat bencana dimuka bumi sebagai perusak. Rizki Allah yang tinggal (selain dari yang haram) lebih baik bagimu, jika kamu orang beriman, dan aku bukanlah oran yang memeliharamu. Mereka berkata : Hai Syu'aib, apakah sembahyangmu menyuruh supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau supaya kami jangan berbuat pada harta kami apa yang kami sukai ? sesungguhnya engkau penyantun lagi cerdas”*²⁸

²⁷QS. Al-Muthaffiin (83) : 1-6.

²⁸QS. Hud (11) : 84 - 87

Kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada Allah. Kekayaan ekonomi adalah suatu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasan hidup dalam rangka meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdikan lebih baik kepada Allah. Mencari dan menimba kekayaan atau pendapatan yang lebih baik untuk dinikmati, tidaklah dikutuk Allah sepanjang diakui sebagai karunia, dan amanah Allah. Orang-orang yang terkutuk ialah apabila kekayaan yang dimiliki itu diletakkan atau dijadikan sesembahan yang utama dalam kehidupannya. Iman dan takwa kepada Allah memberi corak dunia ekonomi pada segala aspeknya. Corak ini menampilkan arah dan model pembangunan yang menyatu antara pembangunan ekonomi dan pembangunan agama sebagai sumber nilai (*central core of value*). Dengan demikian, kegiatan-kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi harus menggunakan pertimbangan nilai agama dan bukan oleh *determinisme mekanistik* ekonomi lainnya seperti pada kapitalisme dan marxisme.

Islam, sejak risalah Muhammad SAW. sampai kepada suatu zaman yang disebut *the golden age of Islam*, lalu ke zaman pembekuan dan kegelapan (*the dark age*), merupakan pengalaman empiris dan sebagai batu uji bagi pemikir muslim era globalisasi untuk membangkitkan kembali Islam. Apabila kebangkitan ini berhasil, Islam akan mewarnai abad ekonomi modern dewasa ini, baik ditingkat nasional, regional maupun global. Pertemuan para ahli ekonomi muslim sedunia dalam *International Conference for Islamic Economic I* di Makkah tahun 1976 telah mendorong gairah untuk menggali nilai Islam bagi ekonomi bangsa dunia ditengah-tengah krisis kehidupan akibat sistem ekonomi kapitalis individualistik dan marxis-sosialistik.

Konsep ekonomi Islam mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketentraman hidup manusia kepada kehidupan yang damai dan sejahtera.²⁹ Gambaran tentang komponen-komponen ekonomi dimaksud diuraikan berikut ini.

2. Sitematik Nilai Ekonomi

Menurut Saefuddin sistematis diartikan bahwa “kita hendaknya dapat menggolongkan nilai-nilai menurut hirarki tertentu sehingga kita dapat menarik hubungan-hubungan nilai dan interaksinya, dan dengan demikian eksistensi suatu sistem dapat dijelaskan”.³⁰ Definisi ini dapat diartikan bahwa hirarki nilai-nilai secara aksiologis menunjukkan hirarki strategis dan faktik untuk suatu kerangka referensi yang selalu berubah, maupun yang bersifat mutlak. Oleh karena itu sistematis hirarki nilai dari suatu sistem pada dasarnya sama, yang membedakan ialah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu.

Bertolak dari paparan diatas, maka sistem ekonomi harus disusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak berdasarkan pada pandangan filsafat tentang ekonomi dan di pihak lain merupakan interaksi nilai-nilai yang membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem. Dengan

²⁹ Adi Sasono, dkk., *Op. Cit.*, 1998, Hal. 33.

³⁰ A.M. Saefuddin, *Op. Cit.*, 1997, Hal. 15.

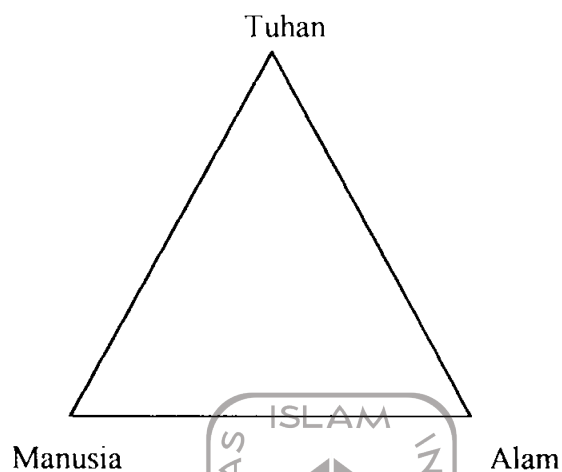
batasan tersebut dapat diungkap tiga komponen penting dalam menyusun eksistensi sistem ekonomi. Ketiga komponen tersebut adalah : filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi.

Filsafat ekonomi, menurut Saefuddin, merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun menurut doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam, dan tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi.³¹ Bertolak dari filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai dasar yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem. Kemudian diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat aturan permainan yang akan menjamin terlaksananya atau tergeraknya sistem yang ada. Sistem ekonomi berfungsi atau bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan atau hasil ini biasanya memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung kepada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem itu. Prioritas ini akan menentukan tujuan yang akan dicapai. Diantara tujuan tersebut adalah : pertumbuhan ekonomi atau keadilan distribusi, kebebasan persaingan individual atau saling kebergantungan masyarakat/negara, pembangunan ekonomi dengan memelihara moral agama.

Menghadapi berbagai sistem ekonomi di dunia ini kita hendaknya kembali kepada konsep segitiga (*triangle*) filsafat Tuhan-manusia-alam yang saling mengutamakan

³¹*Op.Cit.*, 1997, Hal. 20.

eksistensinya masing-masing dimana Tuhan terletak disudut puncak.³² Gambaran segitiga hubungan antara alam, manusia dan Tuhan ini divisualisasikan sebagai berikut :³³



Gambar 7 : Segitiga hubungan antara alam, manusia dan Tuhan

Pemahaman yang keliru terhadap filsafat sistem ini, menurut Saefudin, akan berakibat adanya penjungkir balikan konsep segitiga (*triangle*).³⁴ Jika sudah terjadi demikian, maka akhirnya akan terjadi eksploitasi nilai-nilai dasar maupun instrumental, selanjutnya membawa manusia kepada pendewaan dirinya sendiri (*anthroposentris*) dan memasuki wilayah ekonomi sekuler, dengan menggeser eksistensi Tuhan (*teosentris*) seperti pada ekonomi liberal kapitalis, atau dengan menghilangkan eksistensi Tuhan seperti pada ekonomi Marxis-Sosialis. Kenyataan menunjukkan bahwa kedua filsafat ekonomi Kapitalis dan Marxis ini telah membawa manusia bertindak memperbudak manusia lain, kekayaan

³² *Ibid*, 1997, Hal. 20.

³³ Achmad Ramzy Tadjoedin, dkk., *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : P3EI FE UII bekerja sama dengan Tiara Wacana), 1992, Hal. 72.

³⁴ A.M. Saefuddin, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 6.

alam dan bahkan Tuhan juga dieksploitir untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan dirinya sendiri. Akibat selanjutnya dari keadaan ini ialah proses dekadensi nilai antara manusia dengan Tuhan, dehumanisasi antara manusia dengan manusia, dan disharmoni antara manusia dengan alam. Filsafat ekonomi Islam merupakan alternatif dan menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai-nilai logik, etik dan estetik yang Islami.

3. Filsafat Ekonomi Islam

Sebagaimana telah diuraikan di muka, filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi, yang dapat berlainan menurut kerangka referensi berbeda. Dalam pembahasan selanjutnya kita akan melihatnya dari tiga referensi filsafat ekonomi, yaitu menurut : aliran Kapitalis, aliran Marxis, dan menurut Islam.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa filsafat ekonomi Kapitalisme tergambar pada prinsip *laissez faire* dan kekuasaan tersamar, kebebasan orang diberikan sepenuhnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Filsafat ini selanjutnya memandang bahwa Tuhan itu memang ada tetapi tidak ikut campur dalam bisnis manusia, atau Tuhan itu sudah pensiun, tidur, atau sudah pindah atau sedang jalan-jalan ke negara-negara dan bangsa yang sedang berkembang. Menurut Saefudin dinyatakan bahwa filsafat semacam ini menggambarkan *agnostisisme* yang pada gilirannya akan menerima akibat fatal bagi eksistensi konsep *triangle*.³⁵ Walau masih mengaku ada segi-segi moral dan rohani agama dalam kehidupan, filsafat ini telah membawa manusia kepada kehidupan yang materialistis.

³⁵ *Ibid.*, 1997, Hal. 8.

Sedangkan filsafat ekonomi Marxisme terkenal dengan konsep perjuangan kelas dan pertentangan kelas, revolusi dan kekuasaan *proleter*. Perjuangan dan pertentangan kelas ini adalah penjabaran dari filsafat konflik, modifikasi dan gambaran macam-macam Tuhan bangsa Yunani yang satu sama lain bertentangan dengan kemauan dan keinginan, dan Tuhan pembalas dendam dari kebudayaan Ibrani Kristen. Dengan demikian, “filsafat marxisme ini pada dasarnya mengingkari agama, dan membawa manusia kepada materialisme juga”.³⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa kedua macam filsafat kontemporer tersebut, ternyata menghasilkan ilmu ekonomi yang selain tidak dapat secara bulat memecahkan masalah ekonomi, tetapi juga tidak sanggup memecahkan masalah manusianya, karena manusia dianggap hanya sebagai subyek budaya saja, karena manusia sesungguhnya sekedar binatang ekonomi (*homo economicus*). Bila filsafat ekonomi marxisme berasas kepada konsep pertarungan kelas dan kapitalisme berasas *laissezfaire*, kemudian timbul pertanyaan, bagaimakah filsafat sistem ekonomi Islam? Tentu saja harus dikembalikan pada asasnya, yaitu bahwa filsafat sistem ekonomi Islam adalah berasaskan kepada konsep Tauhid, dengan pokok doktrin sebagai berikut: “Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka (orang-orang kafir); Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? niscaya mereka menjawab: Allah”.³⁷

Tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam selanjutnya menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi Islam. Ketiga asas pokok tersebut adalah :

³⁶*Ibid.*, 1997, Hal. 8.

³⁷QS. Az-Zumar (39) : 38.

- (1) dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya;
- (2) Allah adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya;
- (3) Iman kepada hari Kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu.³⁸

Makna dari tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam yang merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dunia ini, semua harta dan sumber-sumber kekayaan adalah milik Allah dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan-Nya. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan segala yang di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah.³⁹ Kemudian *"Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang didalam semuanya, dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu"*.⁴⁰ Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak khilafat dan tidak absolut serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya. Sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem Kapitalisme dan oleh kaum proletar pada sistem Marxisme. Doktrin yang menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan kehidupan di alam semesta merupakan landasan nilai sistem ekonomi Islam.
2. Allah itu Esa, pencipta segala makhluk dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya. Salah satu hasil ciptaan-Nya ialah manusia yang berasal dari substansi yang sama,

³⁸ A.M. Saefuddin, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 9-11.

³⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 6

⁴⁰ QS. Al-Ma'idah (5) : 20

dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Alam ini, semua flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi umat manusia sebagai sumber manfaat ekonomis dan bahan pemenuhan kebutuhan umat manusia.⁴¹ Semua manusia adalah sama dan tidak terbentuk atas kelas-kelas, sedangkan perbedaannya ialah keterandalannya dalam taqwa dalam perbuatan amal sholehnya.⁴² Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan adalah kuasa Allah pula, tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (*egalitarian*) dan bersyukur kepadanya.⁴³ Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa antara manusia itu terjadi persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni *syirkah* dan *qirad* atau *profit and loss sharing* (bagi hasil).⁴⁴ Ditegaskan pula dalam Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya. Tak patut ia menganiaya dan menghina. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan suatu kesusahan dari seorang muslim, Allah akan membukakan daripadanya satu dari kesusahan-kesusahan kelak dihari kiamat”⁴⁵ Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya didunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya”⁴⁶

⁴¹Pernyataan ini ditegaskan dalam firman-Nya, dalam QS. Al-An'am (6) : 142-145; An-Nahl (16) : 10-16; Faathir (35) : 27-29; dan Az-Zumar (39): 21.

⁴²QS. Al-Baqarah (2) : 213; QS. Al-Mu'min (40) :13.

⁴³QS. Al-Maa'un (107) : 1-7 ; QS. Al-Hadiid (57) :7.

⁴⁴QS. Al-Baqarah (2) : 254; QS. Al-Ma'idah (5) : 2.

⁴⁵HR. Ibn Umar

⁴⁶H.R. Muslim.

Doktrin *egalitarian* Islam seperti di atas jelas berbeda dengan sistem ekonomi materialistik hedonisme yang proletar sosialistik dan marxisme.

3. Iman kepada hari Pengadilan (Kiamat) sebagai asas ketiga sangat penting dalam filsafat ekonomi Islam, karena akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian. Menurut dalil ekonomi (*economic jargon*), hal ini mengandung maksud bahwa orang akan membandingkan manfaat dan biaya (*benefit-cost*) dalam memilih kegiatan ekonomi dengan menghitung nilai sekarang dan hasil yang akan dicapai pada masa mendatang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh baik sebelum maupun sesudah mati (*extended time horizon*). Contoh khalifah Abubakar r.a menyerahkan semua harta kekayaannya untuk persiapan perang Tabuk di Madinah dan ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, “*Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk kehidupan keluargamu di rumah*” : Ia menjawab : “*saya tinggalkan untuk mereka Allah dan rasul-Nya*”. Pilihan ini diambil oleh Abubakar r.a karena ia mengharap ridha Allah tentang imbalan korban yang lebih baik di kemudian hari.⁴⁷

Ketiga asas filsafat ekonomi Islam seperti diuraikan di atas sebenarnya berpangkal dari asas tauhid, yang jelas sangat berbeda jauh dengan asas filsafat ekonomi lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bila filsafat sudah berlainan maka nilai-nilai dasar dan instrumental dari ekonomi akan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang nyata pula. Instrumentasi filsafat ekonomi Islam kedalam nilai-nilai sistem serta fungsionalisasinya merupakan harapan baru bagi seluruh manusia yang sedang berada di tengah-tengah krisis sistem kontemporer yang hampa nilai dan bebas nilai.

⁴⁷QS. AlQayyimah (75) : 1-40; dan QS. Al-Zalzalah (99) : 1-8.

4. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Apakah yang dimaksud dengan perangkat nilai dasar ekonomi Islam? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah implikasi dari asas filsafat sistem (bidang tertentu) yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi dalam menyusun kerangka sosial dan tingkah laku para pelakunya. Apa saja yang tercakup di dalamnya, diantaranya adalah tentang organisasi pemilikan, pembatasan tingkah laku individual, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi.

Kalau dicermati, dalam sistem Kapitalisme asas yang dianutnya adalah *laissez faire*. Artinya hak pemilikan perorangan adalah absolut tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas. Demikian pula norma-norma individual ditarik dari *individualisme* dan *utilitarianisme*. Hal ini berarti setiap komoditi itu dianggap baik secara moral dan ekonomi sepanjang dapat dijual. Sedangkan dalam sistem Marxisme, hak memiliki hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan diktator, distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang diproduksi ditetapkan oleh negara, bagaimana dan untuk siapa produksi diatur secara terpusat pula, pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah norma utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi.

Berdasarkan pada nilai-nilai dasar sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tersebut di atas, maka bagaimanakah nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang memiliki asas filsafat tauhid? Tauhid memiliki kontek etika yang menunjuk pada integrasi antara aspek-aspek spiritual dan temporal dalam eksistensi manusia. Etika merupakan hal terpenting dalam Islam. Di antara dua sifat tersebut, yang pertama jelas menjadi prasyarat bagi yang kedua; tetapi juga akan menjadi tidak tulus dan tidak akan menjadi keimanan yang sejati tanpa yang kedua. Tauhid

bukanlah sekedar tujuan (*objective*), tetapi pedoman bagi proses dinamis, suatu hal yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi. Dalam kaitan ini, nilai-nilai dasar ekonomi yang berfalsafah Tauhid, menurut Saefudin (1998), adalah meliputi :

1. Kepemilikan (*ownership*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Keadilan (*justice*)⁴⁸

Ketiga nilai dasar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilikan (*ownership*) dalam ekonomi Islam adalah :

- a. Pemilikan terletak pada kemanafaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti berlaku terhadap pemilikan lahan atau tanah. Hadist Nabi Muhammad SAW :

barang siapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun.

- b. Pemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Firman Allah menyatakan :

*Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu telah hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang taqwa".*⁴⁹

⁴⁸A.M. Saefuddin dalam Adi Sasono dkk., *Loc. Cit.* 1998, Hal. 40 – 43

⁴⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 180; QS. An-Nisa' (4) : 11-12, 176

Kemudian Hadits Nabi Muhamad SAW : “ *Barang siapa meninggalkan harta atau hak (hutang), maka ahli warisnyalah yang berhak*’

- c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Hadits Nabi Muhammad SAW : “*Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api*”.⁵⁰ Tiga macam barang ini dikiaskan juga kepada barang tambang dan minyak bumi, serta kebutuhan pokok kehidupan manusia pada waktu dan kondisi tertentu. Katagori milik umum ini termasuk sumber-sumber air minum, hutan, laut, dan isinya udara dan ruang angkasa. Sehingga Allah berfirman : “Mereka bertanya kepadamu perihal anfal. Katakanlah bahwa anfal adalah untuk Allah dan Nabi”⁵¹. Anfal berarti barang-barang bebas, yang dapat diperoleh tanpa mengusahakannya, atau tambahan yang diperoleh melebihi yang dimiliki. Anfal termasuk juga harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Semua yang dimiliki Allah adalah milik umum. Sebagaimana Allah berfirman :

Segala sesuatu yang dikembalikan Allah kepada Nabi-Nya dari penduduk kota adalah Tuhan, Nabi, sanak famili, anak yatim, orang miskin dan musafir, sehingga semua itu tidak hanya diperoleh secara bergantian oleh orang kaya diantara kamu”.⁵²

2. Keseimbangan (*equilibrium*), yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*) dan

⁵⁰HR. Ahmad dan Abu Daud.

⁵¹QS. Al-Anfal (8) : 1

⁵²QS. Al-Hasyr (59) : 6-9.

menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkait juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, *growth with equity* tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵³ Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi konsumerisme. Allah menegaskan dalam firman-Nya

*Hai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika hendak sholat. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang berlebih-lebihan atau melampaui batas.*⁵⁴

Menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja tetapi juga pembelanjaan dan *sadaqah* yang berlebihan.⁵⁵ Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu dan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat maka haruslah ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan semula. Allah berfirman :

*"Begitulah kami jadikan kamu ummat yang pertengahan supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan Rasul menjadi saksi pula atas perbuatanmu. Tiadalah kami jadikan kiblat engkau yang dahulu itu, melainkan supaya kami ketahui orang-orang yang mengikuti rasul daripada orang yang kembali kepada kekafiran. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali orang-orang yang ditunjuki Allah. Allah tiada menyia-nyiakan kamu. Sesungguhnya Allah Pengasih dan Penyayang kepada Manusia".*⁵⁶

⁵³ Ayat yang berkaitan dengan masalah keseimbangan terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 101 dan QS. Al-Furqan (25) : 67.

⁵⁴ QS. Al-'Araf (7) : 31.

⁵⁵ QS. Al-Isra' (17) : 29; QS. Ar-Rahmaan (55) : 8-9

⁵⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 143

Berbagai cobaan atau ujian di dunia seperti kelaparan, kemiskinan ditengah kekayaan (*poverty in the midst of plenty*), kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain akan mengakibatkan keseimbangan terganggu, kestabilan ekonomi dan keamananpun tidak terjamin. Allah telah mengingatkan, bahwa

*Dan sungguh akan kami uji kamu dengan suatu cobaan yaitu ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar.*⁵⁷

Dalam keadaan demikian salah satu tindakan telah dicontohkan dan diniatkan oleh khalifah Umar Bin Khattab :

Bila aku mempunyai waktu lebih banyak pada masa mendatang, aku akan mengadakan redistribusi kekayaan dengan mengambil kelebihan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin.

Kemungkinan tindakan lain, misalnya nasionalisasi industri atau kegiatan ekonomi lainnya dapat merupakan implikasi nilai dasar keseimbangan.

3. Keadilan (*Justice*). Kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, baik yang berkait dengan aspek sosial, politik maupun ekonomi. Qardhawi menyatakan, bahwa "ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil ..." ⁵⁸ Lebih jauh Qardhawi menyatakan bahwa :

"Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, Islam melarang *bai' al-gharar* (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang

⁵⁷QS. Al-Baqarah (2) : 155.

⁵⁸Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan : Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid. (Jakarta : Robbani Press). 1997, Hal. 85.

ditransaksikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi.⁵⁹

Berkaitan dengan masalah perilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasiannya diantara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan melimpah⁶⁰ dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.⁶¹
- b. Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah paduan (*aransement*) efisiensi dan memberantas pemborosan. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain.⁶² Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.⁶³ Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 308.

⁶⁰ QS. Al-Hadiid (57) : 20

⁶¹ QS. Al-Humazah (104) : 1-3

⁶² QS. An-Nisaa' (4) : 160-161; QS. Asy-Syu'aara (26) : 182-183; QS. Al-Baqarah (2) : 188.

⁶⁴ QS. Al-Hijr (15) : 19; QS. Thaha (20) : 6 ; QS. Al-Furqaan (25) : 2; QS. Al-A'laa (87) : 1-3.

kekuatan pasar, yakni kebijakan melalui zakat, infaq dan sedekah.⁶⁴ Perhatikan pula hadits Nabi Muhammad SAW : *“Saya bersumpah kepada Allah; bukanlah orang yang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan”*. Keterangan ayat-ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh umat manusia sesuai dengan kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Karakter pokok dari nilai keadilan di atas menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syari'ah Islam. Penyimpangan dari keadaan tersebut akan berakibat masyarakat divonis oleh ayat Allah yang artinya :

“Apabila kami menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, kami memberi kesempatan kepada orang-orang yang mewah di negeri itu untuk memerintah, kemudian mereka membuat kecurangan-kecurangan di negeri itu, maka benar-benar terjadilah keputusan kata (vonis) atas negeri itu, lalu kami hancur luluhkannya”.⁶⁶

Kemudian ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya :

Dan kami menghendaki untuk memberi pertolongan kepada kaum tertindas di bumi, untuk kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin dan kami jadikan pula mereka pewaris-pewaris”.⁶⁷

⁶⁴QS. Al-Baqarah (2) : 110, 271, 280; QS. An-Nisaa' (4) : 8; QS. At-Taubah (9) : 60; QS. An-Nuur (24) : 33; QS. An-Naml (27) : 26-27; QS. Muhammad (47) : 38; QS. Al-Hadiid (57) : 7; QS. Al-Mumtahanah (60) : 8; QS. Al-Ma'aarij (70) : 24-25.

⁶⁵QS. Ar-Ruum (30) : 37

⁶⁶QS. Al-Isra' (17) : 16.

⁶⁷QS. An-Naml (27) : 5

Ketiga nilai dasar ekonomi Islam di atas yakni : kebebasan terbatas terhadap pemilikan harta kekayaan dan sumber-sumber, nilai keseimbangan dan nilai keadilan merupakan kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan. Nilai dasar merupakan pangkal bertolak untuk mengungkap nilai-nilai instrumental ekonomi.

5. Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Kita telah melakukan instrumentasi bertingkat, mulai dari filsafat sampai kepada perangkat nilai-nilai dasar dan kemudian ke nilai-nilai instrumental. Implementasi konsep ekonomi bergantung kepada kerangka kerja yang diturunkan dari perangkat nilai instrumental yang menjamin fungsionalisasi sistem. Tiap sistem ekonomi menurut aliran pemikiran dan agama tertentu memiliki perangkat nilai instrumental yang berlainan. Dalam sistem kapitalisme nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa *retribusi*, informasi dan bentuk pasar *atomistik*, dari tiap unit ekonomi, pasar yang monopolistik untuk mencegah perang harga dan pada waktu yang sama menjamin produsen dengan kemampuan menetapkan harga-harga lebih tinggi daripada biaya *marginal (marginal cost)*. Sedangkan dalam marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses *iterasi* yang mekanistik, pemilikan kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif. Proses *iterasi* dan kolektifisme ini adalah beberapa nilai instrumental yang pokok dari sistem marxisme.

Kemudian bagaimanakah fungsionalisasi nilai instrumental ekonomi Islam? Dalam ekonomi Islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku

ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, adalah meliputi : zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.⁶⁸

1. Zakat

Sumber utama pendapatan dalam pemerintahan negara Islam pada periode klasik serta negara-negara Islam pada umumnya adalah Zakat, yang notabene merupakan salah satu dari rukun Islam.⁶⁹ Namun zakat bukanlah pajak untuk menjamin penerimaan negara. Sebab, distribusi hasil pengumpulan zakat harta ditujukan kepada delapan kelompok sasaran (*asnaf*) sebagaimana firman Allah SWT yang, artinya :

"hanya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, orang muallaf hatinya, untuk memerdekakan budak (hamba), orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah dan untuk orang musafir sebagai suatu keperluan daripada Allah. Allah maha mengetahui lagi bijaksana"⁷⁰.

Menurut Qardhawi zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi umat.⁷¹ Oleh karena itu, Qardhawi lebih tegas menyatakan, bahwa zakat tersebut --- dalam konteks umat --- menjadi sumber dana yang sangat penting.⁷² Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau konsumsi atau investasi. Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh ketajaman

⁶⁸A.M. Saefudin dalam Sasono, *Loc.Cit.*, 1988, Hal. 46.

⁶⁹M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan : M. Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf), 1995, Hal. 248.

⁷⁰QS. At-Taubah (9) : 60.

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.* 1997, Hal. 416.

perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, Manan menyatakan sebagai berikut :

Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi. ... Penanganan yang tepat akan pajak zakat secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan.⁷³

Kata zakat dalam Al-qur'an selalu dirangkaikan dengan kata sholat disebut sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga zakat ini sangat penting dalam membangun kehidupan yang humanis dan harmonis. Zakat merupakan lembaga Islam dan telah diwajibkan sejak zaman Nabi Ibrahim AS. dan Nabi-nabi sesudahnya. Dari nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW.⁷⁴ Mengingat kedudukan zakat sebagai rukun Islam ketiga dan memiliki dampak sosial ekonomi yang baik, maka sampai-sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq ra. berani mengambil resiko akan memerangi orang Islam yang tidak membayar zakat walaupun ia telah mendirikan sholat. Peranan lembaga zakat, baik zakat harta (*mal*) maupun zakat fitrah (*nafs*) akan sangat nampak lagi dengan lebih baik bila diberlakukan bersama-sama dengan pelarangan riba, dan qirad sebagai nilai instrumental berikutnya.

⁷²*Ibid*, 1997, Hal. 417.

⁷³M.A. Manan, *Op. Cit.* 1995, Hal. 248.

⁷⁴QS. Al-Anbiyaa' (21) : 73; QS. Al-Maa'idah (5) : 12; QS. Maryam (19) : 31, 55; QS. At-Taubah (9) : 60.

2. Pelarangan Riba/Bunga

Zakat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, sarana untuk mencegah timbulnya fenomena ketidakadilan yang paling menonjol adalah pelarangan riba. Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak yang lainnya dijamin keuntungannya. Menurut Qardhawi, bahwa “nash al-Qur’an (yang berkaitan dengan riba = pen.) menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan zhalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi”⁷⁵.

Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik yang tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dalam jangka panjang ataupun pendek adalah termasuk riba. Sesungguhnya ekonomi Islam itu bersendikan larangan riba, sebagaimana firman Allah yang artinya :

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila; keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; maka orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan riba) dan urusannya (terserah) kepada Allah; orang yang mengulangi (mengambil riba), maka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah menghapuskan (berkah) riba dan menyuburkan edekah; dan Allah tidak menyukai (mengasihi) tiap orang dalam kekafirannya lalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, untuk mereka itu pahala di sisi Tuhannya, dan tak ada ketakutan atas mereka dan tiada mereka berduka cita. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut)

⁷⁵Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 310.

*itu, jika kamu orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (tidak meninggalkan riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu; dan jika kamu berbuat taubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu (modalmu), kamu tidak menganiaya (dengan mengambil lebih), dan tidak pula dianiaya (dengan penghapusan pokok hartamu). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai di kelapangan, dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.*⁷⁶

Ulama Islam telah bulat sepakat tentang larangan riba menurut Al-Qur'an (riba nasiah) yakni riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa tertentu, panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Riba yang dimaksud dalam al-Qur'an ialah riba yang dijalankan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank dan orang-orang dalam transaksi perdagangan non-Islami, semua haram tanpa keraguan. Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, bank atau non bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan. Baik ia rugi ataupun untung. Islam melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi utang piutang yakni yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu kalau dibayar tunai.

Larangan riba ternyata tidak hanya ada dalam ajaran Islam saja. Dalam Taurat dan Injil pun tercantum larangan riba, meskipun sengaja telah diubah atau dilupakan.⁷⁷ Agama Kristen melarang riba secara positif tidak saja bagi orang Kristen tetapi untuk yang bukan Kristen.⁷⁸ Bahkan pembaharu Kristen yakni Martin Luther King tidak merasa cukup dengan larangan bunga yang sedikit atau banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus pada pembungaan uang sampai kepada menjual dengan harga

⁷⁶QS. Al-Baqarah (2) : 275-280; QS. Ali 'Imran (3) : 130 dan QS. Ar-Ruum (30) : 39

⁷⁷AM.Saefudin dalam Adi Sasono, dkk., *Loc.Cit.* 1998, Hal. 49.

⁷⁸Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 310.

bayar kemudian yang lebih mahal dari harga tunai. Taurat yang telah diubah aslinya oleh Yahudi yang artinya :

*“Maka tidak boleh kamu mengambil bunga daripada saudaramu (orang Israel) baik bunga uang, bunga makanan atau bunga barang. Maka dari pada lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi dari saudaramu tidak boleh, supaya diberkati Tuhanmu dalam segala perkara pegangan tanganmu dalam negeri, yang kamu tuju sekarang hendak mengambil dia akan kebahagiaanmu pusaka”*⁷⁹

Solon pembuat Undang-Undang Athena zaman dahulu telah melarang riba. Juga Plato dalam bukunya *The Canon* berkata : “Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk meminjamkan uang dengan bunga”. Aristoteles dalam bukunya *The Politics* berkata yang sama pula, sebagai berikut :

wajib bagi kita untuk menolak pembunga-an uang (riba), karena ia adalah salah satu jalan keuntungan yang lahir dari uang itu sendiri, jalan mana menghalanginya dari menunaikan fungsinya, karena uang itu tidak seyogyanya dipergunakan kecuali untuk alat pertukaran dan mendapatkan keuntungan daripadanya. Bunga atau riba itu termasuk diantara macam keuntungan yang bertentangan dengan naluri.⁸⁰

Para ekonom komtemporer telah menyadari secara empiris bahwa riba mengandung kemudhalaratan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko dapat berakibat peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi berbagai krisis. Hal ini tidak akan terjadi bila pemilik modal turut mengambil bagian dalam untung/rugi (*profit and loss sharing*). Bunga tidak dapat membimbing kearah pembentukan dan penanaman modal karena bunga dijadikan

⁷⁹kitab Ulangan pasal 23 ayat 19-20 dalam A.M. Saefudin dalam Adi Sasono, dkk., 1998, Hal. 49.

⁸⁰Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 310-311

mata pencaharian tanpa memandang produksi yang terkandung di dalamnya. Ekonom Lord Keynes berkesimpulan yang sama tentang bunga sebagai berikut :

Individu-individu tersebut tidak menyimpan dengan tujuan memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mengeksploitir simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan senantiasa berjalan terus meski suku bunga turun sampai nol.⁸¹

Keynes selanjutnya menulis : “Suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan lalu secara negatif mempengaruhi penerimaan sebagai sumber produksi.” Lord Boyd Orr menjelaskan pula: “Bunga adalah penyebab utama kegoncangan ekonomi dewasa ini, baik dalam bentuk krisis-krisis periodik atau sebagai perbedaan yang menyolok dalam pembagian pendapatan nasional, atau menghambat jalan ke penanaman modal.”⁸²

Para ekonom muslim abad XV Hijrah merintis fungsionalisasi ekonomi bebas bunga dengan mendirikan bank Islam, yakni bank bagi hasil dengan melukukan segala kegiatan ekonomi yang lebih modern daripada bank-bank non-Islam yang konvensional. Sejak 1972 di berbagai negara dunia telah berdiri bank Islam dan lembaga keuangan non-bank. Indonesia termasuk dalam pendiri bank Pembangunan Islam (IDB) di Jeddah tahun 1975 dengan sahamnya sebesar US\$ 28 juta. Bank Islam Malaysia berdiri pada tahun 1982 dan bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991, lalu asuransi Takaful 1994, Reksadana Syari’ah 1997, BPR Syari’ah dan BMT. Ternyata lembaga keuangan anti riba ini *applicable* dan *viable* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

⁸¹Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.* 1997, Hal. 203.

⁸²*Ibid*, 1997, Hal. 311

3. Kerjasama ekonomi.

Kerja sama (*cooperative*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islami versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme. Kerjasama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam adalah *qirad*. *Qirad* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. *Qirad* dikenal di dunia ekonomi sebagai penyertaan modal, tanpa beban bunga modal atau bunga uang, tetapi atas dasar *profit dan loss sharing* dari proyek usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. Karena itu dalam *qirad* pemilik uang atau modal merupakan mitra sejajar dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang meminjamkan. *Qirad* ditetapkan dalam operasi perbankan Islam, yakni yang disebut *mudharabah* atau *murabahah*. Dalam *mudharabah*, bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, dan pengusaha (*modarib*) berpatner dengan keahlian dan pekerjaannya. *Mudharabah* sangat sesuai bagi pendatang baru dalam dunia usaha yang memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai pembiayaan untuk memanfaatkan keahlian tersebut. Sedangkan *murabahah* ialah pembiayaan oleh bank Islam untuk usaha perdagangan dalam negeri maupun luar negeri atas dasar *murabahah (cost plus)*. Baik *mudharabah* maupun *murabahah* keduanya berdasar *profit and loss sharing* tanpa beban bunga antara kedua pihak bank Islam dan pihak pengusaha.

Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam seperti di atas dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat⁸³, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial,⁸⁴ mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata,⁸⁵ dan melindungi kepentingan ekonomi lemah.⁸⁶ Ekonomi dengan berdasarkan kerja sama yang Islami pada semua kegiatan ekonomi menghendaki organisasi dengan prinsip syarikat atau syirkah, yang kuat membantu yang lemah,⁸⁷ pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri⁸⁸ dan dalam rangka efisiensi relatif yang terbesar (*comparative advantage*) maupun kerja sama ekonomi global. *Qirad* atau *syirkah* dalam Islam jelas berbeda dengan ekonomi non Islami yang individualistis yang mengajarkan konflik antar pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untuk memupuk kekayaan, pemusatan kekuatan dan ketidakadilan ekonomi, pertentangan antar kelas dan akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan. Implikasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

⁸³QS. Al-Baqarah (2) : 190

⁸⁴QS. Ali Imran (3) : 103; QS. Al-Maa'idah (5) : 3; QS. At-Taubah (9) : 71, 105.

⁸⁵QS. Al-Isra' (17) : 16; QS. Al-Haaqqah (69) :25-37; QS. Al-Fajr (89) :17-20; QS. Al-Maa'un (107) : 1-7.

⁸⁶QS. An-Nisaa' (4) : 5-10; 74-76; QS. Al-Fajr (89) : 17-26

⁸⁷QS. Az-Zukhruf (43) : 32.

⁸⁸QS. Al-Lail, (92) : 8-10; QS. Al-'Alaq (96) : 6.

4. Jaminan Sosial

Dalam al-Qur'an sering disebut doktrin sosial. Tujuan doktrin sosial antara lain adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran-pengeluaran sosial baik untuk kepentingan negara atau untuk kebijakan humanis (*filantropis*) dan tujuan-tujuan bermanfaat lainnya menurut syari'ah Islam. Nilai-nilai jaminan sosial yang Islami, menurut Saefuddin ialah sebagai berikut :⁸⁹

- a. Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat.
- b. Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal kepada orang lain.
- c. Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah
- d. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi
- e. Pengeluaran sosial adalah hak sah bagi orang-orang yang miskin dan malang
- f. Kesearahan arus pengeluaran sosial dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin.
- g. Prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat
- h. Surplus pendapatan dan kekayaan sebagai dasar perhitungan tagihan untuk tujuan bermanfaat dan pengeluaran pribadi
- i. Tingkat pengorbanan dari pengeluaran sosial.
- j. Makin besar surplus makin tinggi angka pertambahan marginal dari pengeluaran sosial.
- k. Mengeluarkan tenaga dan modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim.
- l. Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengganti pengorbanan uang.
- m. Kebijaksanaan yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana
- n. Memperhatikan pihak-pihak yang berhak terhadap jaminan sosial
- o. Motif dan pembenaran terhadap pengeluaran sosial.

⁸⁹A.M. Saefuddin, *Loc. Cit.* (1997, Hal. 26 – 28.

Semua komponen nilai jaminan sosial di atas, adalah bagian Allah sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dikaruniakan kepada individu dan bangsa. Nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah dan karunia-Nya, membuat mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri, dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosial ekonomi. Jaminan sosial akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan karena telah menjual dirinya untuk mencari kenikmatan Ilahi, dan bagi mereka adalah taman Firdaus. Pengeluaran sosial manusia dalam Islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan imbalan psikis di akhirat.

5. Peran Negara

Nilai instrumental yang kelima adalah peran atau campur tangan negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam. Dalam hal ini negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Dalam negara Islam fungsi pengawasan dilakukan melalui lembaga *Hisbah* (pengawasan). *Hisbah* adalah institusi negara yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga pengawas pasar atau kegiatan ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan atau pelanggaran aturan moral dalam pasar (monopoli), perkosaan terhadap hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. *Hisbah* ini *independent* dari kekuasaan yuridis maupun eksekutif. Apabila campur tangan negara dalam pengawasan moral ekonomi (pasar) pada individu maupun masyarakat makin kuat, maka makin berkuranglah campur tangan langsung dari negara terhadap kegiatan ekonomi. Peran negara diperlukan dalam instrumentasi

dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian distribusi sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh, saling mengasih sayangi dan bekerja sama dalam kebaikan serta taqwa kepada Allah SWT. Dalam kaitan dengan peranan negara, Qardhawi menyatakan, bahwa :

Tugas negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktek-praktek konkrit, dan mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Juga monitoring pelaksanaan setelah itu; sejauh manakah pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pecehan.⁹⁰

Dengan kata lain, tugas negara adalah berupaya untuk menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan, khususnya dosa-dosa besar, seperti : riba, perampasan hak, pencurian, kezhaliman kaum kuat terhadap kaum lemah.

6. Kata Akhir

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan melihat pada pemikiran, filsafat, nilai instrumental, dan sistematika nilai tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memfungsionalisasikan seluruh perangkat sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, bekerja secara fungsional terhadap nilai-nilai suatu sistem berarti sistem itu ada. Ekonomi Islam kini mulai diapresiasi dan diinstrumentasikan dalam kehidupan,

⁹⁰Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 454.

khususnya dalam rangka memakmurkan manusia dan alam. Firman Allah SWT artinya :
 “*Barang siapa tidak menjalankan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah (ajaran kebenaran), maka mereka itu adalah orang-orang jahat*” (QS. 5:45). Konsep ekonomi Islam dapat dilaksanakan lengkap untuk mencapai tujuan sistem. Untuk itu memerlukan hubungan faktor penunjang yang harmonis dalam masyarakat karena berkaitan dengan aspek sosial makro dari negara. Pelaksanaan zakat dan pelarangan riba memerlukan aspek legal dari negara, agar dapat beroperasi walau masih secara partial. Bank Islam dapat *applicable* dan *viable* dalam masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan syari’ah Islam. Ekonomi Islam mengandung nilai-nilai artinya bersifat purposif dan tidak netral atau bebas nilai. Ekonomi Islam bekerja menurut aksioma dasar dan instrumental dalam mengelola kegiatan ekonomi berdasarkan al-Qur’an dan Hadist. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu karena Islam adalah *rahmatan lil ‘alamin*. Kekuatan akal manusia di era globalisasi ekonomi dewasa ini mampu mengkaji hubungan antar bangsa dan seluruh negara dalam transaksi yang ditetapkan Al-Qur’an dan sunnah dengan ijtihad, khususnya untuk aspek ekonomi yang belum dispesifikasikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berarti penelitian dan pengembangannya harus terus menerus dilaksanakan sebagai agenda ekonomi Islam yang strategis dan relevan dengan ruang dan waktu. Selain dari itu, tidak boleh dipandang sebelah mata, peran masyarakat dalam implementasi ekonomi Islam sangat penting, yaitu dalam usaha menterjemahkan konsep ini pada kehidupan ekonomi global yang nyata untuk menyelamatkan manusia dan alam semesta.

Semua kehidupan sosial adalah pakaian yang terdiri dari sejumlah benang yang dirangkai secara ketat. Ekonomi, politik, sosial dan semua aspek kehidupan lain berinteraksi secara timbal balik satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organik. Sesuai dengan teori Oscar Morgenstern yang disebut *compressibility of an economic system*.⁹¹ Didalam sistem ini ada akar atau inti dari sistem ekonomi, yang apabila dirusak dapat merusak seluruh bagian sistem tersebut.

Oleh karena itu, apabila kita ingin membangun sebuah sistem ekonomi Islam secara mapan, maka kajian kita harus tertuju pada akar permasalahannya. Akar dari sistem yang Islami terdiri dari keyakinan-keyakinan yang mendasar, tujuan-tujuan dan nilai-nilai (termasuk penghapusan riba) serta peningkatan moral dari setiap individu. Ini tidak dapat ditawar-tawar dan tidak terbatas waktu, tidak peduli apakah kita akan melihat kebelakang empat belas abad yang silam ke zaman Nabi, atau melihat ke depan kelima belas abad setelah hijrah. Lembaga-lembaga yang dikembangkan untuk memahami dan merefleksikan tujuan-tujuan ini mungkin telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan zaman. Karena itu tidak ada studi yang dapat menyodorkan teknik-teknik pemecahan yang bersifat abadi. Hanya melalui interaksi gagasan cerdas, sehingga membuat umat Islam dapat merealisasikan aspirasi-aspirasinya.

D. Teori Akuntansi Syari'ah

Ada suatu perubahan luar biasa dalam kancah bidang ilmu akuntansi untuk beberapa dekade belakangan ini. Sebelum tahun 1970-an ada anggapan tentang

⁹¹Adi Sasono, dkk. *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 30.

akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan praktek yang bebas dari nilai (*value-free*) sudah mulai digoyang keberadaannya. Anggapan tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi.

Pada era informasi dan globalisasi dalam bidang akuntansi ada upaya harmonisasi praktek-praktek akuntansi. Hal ini berarti ada kehendak untuk memberlakukan praktek-praktek akuntansi secara seragam seluruh dunia. Dengan kata lain, nilai-nilai lokal praktek akuntansi -- yang mungkin sangat berbeda dengan praktek dunia internasional -- sedapat mungkin dieliminasi karena keberagaman praktek akuntansi di setiap negara dianggap menyulitkan dalam menafsirkan laporan keuangan, atau praktek akuntansi yang beragam itu tidak dapat diperbandingkan (*uncomparable*).

Kasus ini mengundang reaksi banyak kalangan, sehingga muncullah pandangan-pandangan yang bersifat pro dan kontra. Mereka yang berpandangan kontra mengemukakan bahwa tindakan untuk melakukan harmonisasi merupakan tindakan pelecehan terhadap nilai-nilai lokal. Mereka justru melihat bahwa sebetulnya akuntansi adalah suatu bentuk pengetahuan dan praktek yang banyak ditentukan lingkungannya (*non value-free*). Bahkan ada yang mengatakan akuntansi adalah "anak" yang lahir dari budaya setempat (lokal).

Pandangan kedua, memang secara eksplisit menolak pandangan pertama yang bersifat fungsionalis dan positivistik, kalau ditelusuri ke belakang akar pemikirannya berasal dari August Comte. Pemikiran ini memiliki sifat reduksionis, yaitu

menghilangkan kandungan nilai yang seharusnya terkandung dalam ilmu pengetahuan dan praktek akuntansi. Keringnya nilai ini menyebabkan masyarakat bisnis, ketidakseimbangan tatanan sosial, dan kerusakan lingkungan terjadi.

Berpijak dari kasus di atas, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatori, transendental, dan teleologikal merupakan upaya yang niscaya. Timbul pertanyaan, upaya apa yang harus dilakukan? Upaya ini secara filosofis dan metodologis dapat dilakukan dengan menggunakan meta-perspektif, yaitu suatu pandangan yang berusaha berada di atas perspektif-perspektif yang ada. Karena dengan cara ini pandangan-pandangan filosofis, seperti pandangan tentang hakekat manusia dan masyarakat, ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi, menjadi lebih luas dan utuh, sehingga formulasi pengetahuan dan praktek akuntansi menjadi lebih humanis dan sarat dengan nilai.

Akuntansi syari'ah, menurut Iwan Triyuwono dan Gaffikin dikatakan, merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syari'ah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal.⁹² Konsekuensi ontologis upaya ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban, beserta jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (ontologi tauhid).

⁹²Iwan Triyuwono and M.J.R. Gaffikin, "Shari'ate Accounting : An Ethical Construction of Accounting Knowledge" *The Fourth Critical Perspectives on Accounting Symposium*, 26-28 April 1996, New York City, Hal. 6

Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada kuasa Allah. Dengan kesadaran diri tersebut, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat dimana ia berada. Dengan demikian, melalui akuntansi syari'ah, realitas sosial akan dirancang dan dibangun melalui muatan nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Kesemuanya itu dilakukan dengan perspektif *khalifat-ullah fil ardh*. Perspektif ini berarti suatu cara pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah SWT.

Bagaimana idealitanya dan realisasinya? Cita yang cukup ideal ini bisa direalisasikan apabila organisasi dikiaskan atau di-metamorphosis-kan. Sebagai contoh misalnya zakat. Realitas organisasi yang dikiaskan (metafora) dengan zakat merupakan realitas dalam bentuk yang lebih operasional. Ia sebagai salah satu alternatif untuk menciptakan realitas organisasi yang terikat pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Oleh karena itu, apabila seluruh perusahaan bisnis telah menerapkan kiasan/metamorfosa zakat, maka akan terbentuk jaringan-jaringan realitas organisasi yang tunduk dan mengikuti realitas kuasa Ilahi.

Akan tetapi walau bagaimanapun, keberadaan teori akuntansi syari'ah masih dalam tataran filosofis.⁹³ Berpijak dari dasar filosofis ini, untuk selanjutnya dapat dijadikan petunjuk atau memberikan arah bagaimana akuntansi syari'ah dapat dibangun. Hal ini bukan berarti bahwa dalam membangun akuntansi syari'ah nantinya hanya diperoleh dengan mendasarkan pada pendekatan deduktif (*deductive approach*) saja, atau

⁹³ Iwan Triyuwono, *Loc. Cit.* 1997, Hal. 17

pendekatan induktif (*inductive approach*) saja, atau pendekatan etika (*ethical approach*), atau pendekatan sosiologi (*sociological approach*) saja, atau juga pendekatan ekonomi (*economic approach*) saja, secara terpisah antara satu dengan yang lain.⁹⁴ Namun, secara metodologis, akuntansi syari'ah memandang pendekatan-pendekatan tersebut tidak mempunyai batas-batas yang tegas, bahkan dalam implikasinya pendekatan tersebut telah menjadikan agama (melalui kitab sucinya) sebagai salah satu sumber yang rujukan dalam membangun model akuntansi syari'ah.

Akuntansi syari'ah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya akuntansi syari'ah adalah sangat baru dan para ahli akuntansi syari'ah belum secara jelas membuat tujuannya. Hal ini dapat menjadi suatu kasus jika diganti istilah ekonomi dunia ke akuntansi sebagaimana dikatakan oleh Baqir as-Sadr, bahwa "ekonomi Islam... bukanlah suatu pelajaran tetapi suatu teori Teori artinya metode dan alat belajar untuk menafsirkan".⁹⁵

Oleh karena itu, akuntansi syari'ah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan ini Shahata menjelaskan kemungkinan keberadaan akuntansi syari'ah sebagai berikut:

Postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal ... karenanya secara teoritis akuntansi memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi,

⁹⁴Ahmed Belkaoui, *The Coming Crisis in Accounting*. (New York : Greenwood Press, Inc.), 1993, Hal. 60-65.

⁹⁵M. Baqir As-Sadr, *Islamic Economic*. Translated : Toshio Kuroda (*Isuramu Keizaron*). (Neigata : The Institute of Middle Easter Studies, International University of Japan), 1986, Hal. 136.

sosial, politik, ideologi, etika yang dimiliki Islam, kehidupan Islam dan keadilan dan hukum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Kesemua ini adalah satu paket yang tak bisa dipisah.⁹⁶

Akuntansi dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang sempurna. Permasalahan sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan akuntansi syaria'ah atau akuntansi Islam? Islam sebagai suatu program dan aktivitas yang mencakup semua akuntansi (perhitungan) yang mengatur masyarakat. Berkenaan dengan ini, Shahata menjelaskan maksud tersebut dalam rangka mempublisasi akuntansi Islam dalam bentuk definisi atau pernyataan sebagai berikut:

Kita ingin menunjukkan aspek Islam dari akuntansi yang bersumber hukum hanya dari prinsip Islam, standar yang unik, tujuannya, prinsip atau hal-hal yang tercantum dalam Qur'an dan Sunnah, tetapi dari rencana sekarang dan masa depan dan sifat akuntansi yang dapat diambil dari pandangan aspek ini sebagai suatu yang unik dan dasar dari akuntansi.⁹⁷

Dalam mencari bentuk akuntansi syaria'ah, harus berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Kekuatan pertama adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dibentuk oleh lingkungannya. Kekuatan kedua adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi. Jika demikian, maka usaha yang harus dilakukan oleh para akuntan adalah bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal. Menurut Triyuwono dikatakan bahwa bisnis yang ideal yaitu peradaban

⁹⁶Shauqi Ismail Shahata, *Financial Accounting from the Islamic Point of View*, (Cairo : Alzahra al-A'lam al-A'rabi). 1987, Hal. 9.

bisnis dengan nilai *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal*.⁹⁸

Sesuai dengan sifat bisnis tersebut, maka akuntansi syari'ah juga harus memiliki sifat *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal*. Lebih jauh Triyuwono menguraikan sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Nilai humanis akuntansi syari'ah adalah, bahwa akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Sebab menurut penelitian Morgan (1988) diketahui, bahwa praktek akuntansi telah mengakibatkan manusia menjadi *less humane*.⁹⁹ Atau dengan istilah lain, bahwa masyarakat kita sedang mengalami proses *dehumanisasi*. Sebagaimana Kuntowidjojo mengatakan :

Kita tahu bahwa kita sekarang mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial kita menjadikan kita sebagai bagiana dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial.¹⁰⁰

Sifat humanis akuntansi -- atau bentuk bisnis lainnya -- tersebut, diharapkan dapat mendorong perilaku manusia itu sendiri. Sehingga manusia semakin kuat kesadaran dirinya tentang hakikatnya. Melalui kesadaran diri tentang hakikat manusia ini merupakan landasan bagi manusia dalam memberi nilai emansipatoris pada akuntansi syari'ah. Sifat ini berarti bahwa tidak lagi berlaku bentuk dominasi atau penindasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh akuntansi

⁹⁷ *Ibid*, 1987, Hal. 10.

⁹⁸ Dalam *Ibid*, 1996, Hal. 11.

⁹⁹ Iwan Triyuwono, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 13.

¹⁰⁰ Kuntowidjojo, *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*. (Bandung : Mizan), 1991, Hal. 289.

syari'ah adalah berupa pembebasan dan tertuju pada semua pihak serta tidak menyepelekan pihak lain, atau akuntansi syari'ah akan berdiri pada posisi yang adil.

Oleh karena akuntansi syari'ah dibangun berdasarkan syari'ah Islam, maka nilai transendental akuntansi syari'ah terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa akuntansi syari'ah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis yang bersifat *profan*, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia *profan*. Dengan demikian, yang selama ini akuntansi dikenal sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, maka akuntansi syari'ah adalah lebih dari itu, yaitu pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan Tuhan. Dengan sifat ini, --- dalam melakukan praktek bisnis dan akuntansi --- maka seseorang yang terlibat akan selalu menggunakan, atau tunduk dan pasrah terhadap kehendak Tuhan (*etika syari'ah*). Nilai semacam inilah yang dimaksud dengan teologikal. Artinya praktek akuntansi syari'ah akan mengantarkan pelakunya secara riil teraktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Mengapa akuntansi syari'ah muncul ke permukaan, padahal akuntansi Barat telah mengakar dalam inti bisnis masyarakat? Ternyata, para perintis akuntansi, khususnya bidang ekonomi politik akuntansi, memiliki beberapa keraguan tentang pandangan akuntansi modern yang akan menunjukkan data akuntansi secara netral di antara pemakainya. Mereka menganggap hubungan antara akuntansi dan masyarakat adalah penting. Mereka mempertanyakan peranan akuntansi untuk menghubungkan masalah-masalah sosial dengan masalah organisasi dan individual. Sebab perhatian terhadap akuntansi dalam masyarakat tidak sama di mana-mana kendatipun di antara

masyarakat (negara-negara) yang menganut konsep itu seluruhnya.¹⁰¹

Teori akuntansi harus mengkaji akuntansi di masyarakat dimana ia dipraktekkan. Hal ini berarti bahwa sikap ini mungkin merupakan suatu cara untuk melahirkan aturan-aturan akuntansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Gambling, oleh karena tidak adanya aturan akuntansi, maka akuntansi Barat tidak membahas mengenai aturan apa pun yang berkaitan dengan masalah organisasi (perusahaan), yang berhubungan dengan masyarakat dan individu. Aturan semacam itu bisa disebut sebagai suatu bahasan dalam teori akuntansi sekarang. Di pihak lain persyaratan masyarakat mengenai akuntansi secara kuantitatif meningkat juga.

Berkaitan dengan persoalan perubahan teori akuntansi, maka akuntansi akan berubah ke paradigma baru yang sejauh ini belum jelas lagi. Dalam konteks demikian, Takatera dalam pengantarnya menyajikan dua strategi pengkajian hakikat akuntansi sebagai berikut.¹⁰²

1. Jika studi akuntansi deskriptif berkembang dalam suasana terisolasi dari strategi intelektual untuk mengubah akuntansi sekarang, hal ini akan membenarkan akuntansi yang dulu dan sekarang bukan menginterpretasikannya. Sebaliknya jika studi akuntansi normatif dikembangkan dalam suasana terisolir tanpa memperdulikan masyarakat dan masalah organisasi di mana akuntansi dipraktekkan, maka hal ini akan berakibat kegagalan perobaan sebab tidak akan berakibat kegagalan percobaan sebab tidak akan diterima oleh masyarakat kendatipun jika ini dapat menjelaskan 'akuntansi untuk apa yang tidak boleh'. Kemudian adalah penting menggabungkan studi akuntansi deskriptif dengan studi akuntansi normatif untuk memberikan pemahaman baru tentang apa akuntansi dulu, apa akuntansi sekarang dan menciptakan apa akuntansi di masa yang akan datang.

¹⁰¹Trevor E. Gambling, "Toward a General Theory of Accounting," *International Journal of Accounting Education and Research*, Vol. 7, No. 1 (Fall 1971), Hal. 141.

¹⁰²Sadao Takatera, *Posobility of Accounting (Kanosei no Kaikeigaku)*, (Tokyo: Sanrei-shobo), 1988, Hal. i.

2. Jika akuntansi yang dimaksud adalah akuntansi "*What Should be*" sebagai kelanjutan dari akuntansi "*What it is*", dengan jalan yang tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan dapat membentuk akuntansi "*What it is*" walaupun kita dapat menawarkan interpretasi baru, terhadap apa akuntansi "*What it was*" dan apa akuntansi sekarang (*What it is*) ... Strategi untuk membuat isu sekarang jelas harus berhadapan dengan citra akuntansi yang akan datang, yaitu menciptakan akuntansi "*What Should be.*" Sebagai ganti dari "*what it is*" : di bidang yang kita hentikan keberadaannya.

Akuntansi syari'ah tidak menolak pendapat bahwa akuntansi menyesuaikan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Tetapi Akuntansi Syari'ah menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, dan juga masalah akuntansi. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian syari'ah. Dalam konteks itu harus diterima bahwa akuntansi Islam (syari'ah) memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa teori akuntansi syari'ah dipelajari sebagai suatu sistem akuntansi dan pada saat yang sama ditafsirkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manajemen, ekonomi, hukum, politik, dan agama.

E. Praktek Akuntansi Syari'ah

Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Aspek akuntansi badan usaha memang selalu menarik untuk dijadikan kajian dan bahan diskusi, apalagi bila badan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri seperti halnya lembaga keuangan Islam. Menariknya akuntansi untuk dibahas, tentu karena adanya beberapa alasan. *Pertama* : akuntansi selama ini dikenal sebagai alat

komunikasi, atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. *Kedua*, akuntansi sering diperdebatkan apakah ia netral atau tidak. *Ketiga*, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan [politik, ekonomi, budaya] dimana ia dikembangkan; dan *Keempat*, akuntansi mempunyai peran sangat penting, karena apa yang dihasilkannya, bisa menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah keputusan penting dan menentukan.

Dengan pertimbangan faktor-faktor di atas, maka manakala lembaga keuangan Islam ramai dibicarakan, timbul pertanyaan seperti, bagaimana dengan akuntansi yang diterapkan oleh lembaga keuangan Islam? Apakah lembaga keuangan Islam boleh memakai akuntansi yang sekarang dikenal, atau harus menerapkan praktik akuntansi yang berbeda? Jika demikian, bagaimana bentuk akuntansi yang lebih Islami, atau dapat diterima syari'ah? Sejauh mana akuntansi syari'ah berbeda dengan praktik akuntansi yang sekarang ada?

Pada tatanan teknis operasional, akuntansi syari'ah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang bekepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana keputusan ekonomi yang sekiranya tidak menyimpang dari syari'ah Islam atau dapat diterima oleh Islam. Untuk itu, dalam pembahasan teori maupun praktek ekonomi [termasuk di dalamnya bidang manajemen atau akuntansi, misalnya] hendaknya dibahas dari sudut Islam, bukan sekedar dari sudut agama. Dalam kaitan ini, Qardhawi menyarankan, agar : “kita tidak membahas ekonomi dari sudut agama, akan tetapi [membahas] ekonomi dari sudut Islam”.¹⁰³ Mengapa demikian? Sebab Islam adalah lebih

¹⁰³Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 17.

integral dari sekedar agama. Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syari'ah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara.

Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa tidaklah mengagetkan, apabila ahli fiqh dan ahli ushul fiqh menjadikan agama sebagai salah satu dari lima hal yang bersifat *dlurari* dalam syari'ah Islam. Kelima hal tersebut adalah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagian ulama menambahkan dengan “kehormatan”. Jadi, agama hanyalah salah satu dari hal-hal pokok yang dipelihara dan dijaga oleh syari'ah Islam.

Selain dari pada itu, kita mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam. Menurut Qardhawi ditegaskan :

... bagian ibadah Islam yang pokok itu, adalah satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam. Itulah ibadah zakat, ... Dalam bagian dosa besar yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat kuat, kita menemukan dosa besar agama, yang tergolong “tulang belikat” sistem ekonomi bagi sebagian besar umat manusia, baik dahulu maupun sekarang. Itulah riba dimana Rasulullah SAW telah melaknati para pemakannya, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya.¹⁰⁴

Dengan demikian jelas, bahwa upaya kita menemukan format teori maupun praktek ekonomi [manajemen dan akuntansi Islam] harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Kemudian diturunkan sampai pada bagian yang lebih bersifat operasional seperti bagaimana pengaturan zakat, bagaimana persoalan riba, dan sebagainya. Hal-hal demikian inilah yang merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang/aspek kehidupan yang Islami, sesuai dengan syari'ah Islam.

Sebagai turunan dari uraian di atas, barangkali uraian tentang keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syari'ah adalah bercirikan sebagai berikut :

¹⁰⁴ *Ibid*

1. menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi,
2. memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya, perilaku etis,
3. bersikap adil terhadap semua pihak,
4. menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik, dan
5. mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.¹⁰⁵

Berdasarkan landasan dan ciri-ciri tersebut di atas, maka diharapkan akuntansi syari'ah akan mempunyai bentuk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Sebab melalui ciri-ciri tersebut tercermin sesuatu yang sarat akan pertanggungjawaban, nilai-nilai sosial dan jelas. Mengapa harus demikian? Sebab disadari bahwa pada tatanan yang lebih teknis, yaitu dalam bentuk laporan keuangan, akuntansi syari'ah masih mencari bentuk. Di dalam tesis ini, bentuk konkrit akuntansi syari'ah secara utuh belum dapat ditampilkan, sebab untuk sampai pada tataran praktek dan bentuk laporan keuangan yang utuh memerlukan dukungan teori yang lengkap dan kuat.

Di samping itu, usaha membentuk model akuntansi syari'ah bukan suatu langkah "tambal sulam" yang dilakukan untuk memperbaiki akuntansi konvensional. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan dengan pijakan filosofis yang sangat mendasar. Di balik itu, pemikiran filosofis tidak akan banyak memberikan perubahan, bila tidak dilanjutkan pada pemikiran teoritis dan teknis.

Memang harus diakui, tidak banyak pemikir yang memiliki kepedulian mengembangkan akuntansi berdasarkan nilai-nilai Islam. Beberapa pemikir yang dapat dicontohkan di sini misalnya : Gambling dan Karim (1991); Baydoun dan Willet (1994). Pemikiran mereka tentang akuntansi yang bernuansakan Islam telah memberikan warna baru dalam perkembangan akuntansi berlandaskan Islam. Mereka mencoba melakukan

¹⁰⁵Iwan Triyuwono, *Op.Cit.*, 1997, Hal. 19.

koreksi terhadap pendekatan-pendekatan yang digunakan bagi pengembangan akuntansi konvensional.

Menurut penilaian Gambling dan Karim, bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk membangun akuntansi [kebanyakan] adalah dengan pendekatan seperti : *empirical-inductive approach* dan *empirical-deductive approach*. Di samping itu, Gambling dan Karim mengkritik terhadap metode dan pengukuran akuntansi, serta klasifikasi aktiva. Kritikan dan penilaian Gambling dan Karim tersebut akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan bahwa untuk pengukuran zakat dari harta dan aset yang dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan, harus digunakan pendekatan lain.¹⁰⁶

F. Akuntansi Syari'ah : Akuntansi Berkiaskan (metafora) Zakat

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, akuntansi syari'ah tercermin dalam kiasan atau metafora "amanah". Metafora amanah dapat diturunkan menjadi metafora "zakat", atau dengan kata lain, realitas organisasi akuntansi syari'ah adalah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (*profit-oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stakeholders-oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*).¹⁰⁷ Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha

¹⁰⁶Pengukuran zakat akan diuraikan pada sub bab Penilaian-penilaian Perhitungan (Pengukuran) Zakat dalam Akuntansi.

¹⁰⁷Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah", **Kertas Kerja**, Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Surakarta, 24 Februari 1997. Hal. 13.

untuk mencapai “angka”¹⁰⁸ pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Dilihat dari nilai praktis akuntansi, akuntansi syari’ah dengan metafora amanah dan berorientasikan zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi (bisnis) yang bermetaforakan amanah biasanya memiliki nilai praktis yang bersifat *humanis, emansipatoris, transendental*¹⁰⁹ dan *teleologikal*.¹¹⁰ Nilai praktis ini, menunjukkan sifat amanah bagi para pelaku dan penggunanya. Menurut tradisi Islam, sebagaimana yang pernah diuraikan di muka, sifat amanah dapat diturunkan menjadi ciri khas zakat. Dengan demikian, zakat merupakan tujuan akhir dari setiap unit bisnis Islami (syari’ah).

Nilai praktis akuntansi syari’ah yang berorientasi zakat tersebut, menimbulkan konsekuensi ontologis, bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari. Dengan istilah lain, dapat terbangunnya *ontologi tauhid*. Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan

¹⁰⁸Pengertian angka dan zakat di sini tidak perlu diartikan secara sempit, karena *zakat-oriented* itu sendiri adalah metafora yang mempunyai makna dan konsekuensi yang luas dan komprehensif.

¹⁰⁹Kuntowidjojo, **Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi**, Bandung : Penerbit Mizan,

¹¹⁰Triuwono, **Ibid**, hal. 13.

seseorang pada kuasa Ilahi. Melalui kesadaran diri ini, seseorang akan selalu merasa kehadiran Tuhan dalam dimensi waktu dan tempat di mana berada.

Jadi, dengan akuntansi syari'ah, realitas sosial yang dikonstruksi mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi; yang semuanya dilakukan dengan *meta-perspective*, yaitu perspektif *khalifat-ullah fil ardh*, suatu cara pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggungjawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah SWT. Dalam skala mikro, realitas sosial dapat diidentikan dengan realitas organisasi, yaitu realitas yang diciptakan dalam organisasi bisnis, sehingga terbentuk kondisi seperti yang dicitakan dalam ontologi tauhid tadi. Bila realitas organisasi yang demikian tercipta, maka sangat mungkin bahwa realitas tersebut akan menebarkan rahmat, yang tidak saja bagi mereka yang secara aktif terlibat dalam operasi organisasi, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan alam sekitarnya.

Gambaran ideal tersebut di atas dapat diwujudkan bila organisasi [bisnis] dikiaskan sebagai *zakat*. Penggunaan kiasan semacam ini adalah sangat penting, karena dengan cara ini seseorang akan merancang organisasi. Sebagaimana diketahui, bahwa banyak metafora-metafora organisasi yang telah dikenal, diantaranya : *cybernetic system, population ecology, political system, theater, culture* dan lain-lainnya.¹¹¹ Kesemua metafora ini berdiri di atas paradigma positivistik. Penggunaan masing-masing metafora tersebut mempunyai implikasi sendiri-sendiri terhadap realitas kehidupan manusia. Penggunaan metafora amanah dan zakat dalam bentuk yang lebih operasional merupakan salah satu

¹¹¹Triuwono, *Ibid*, hal. 16.

alternatif untuk menciptakan realitas organisasi yang terikat pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi.

Dengan demikian, bila metafora zakat (realitas organisasi bermetaforakan zakat) secara sadar diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sebuah perusahaan atau dalam keseluruhan sistem bisnis, maka di dalamnya akan tercipta apa yang dinamakan dengan realitas organisasi dengan jaringan kuasa Ilahi. Realitas organisasi demikian inilah yang harus direfleksikan secara “obyektif” oleh akuntansi. Oleh karena, dengan “obyektivitas”, akuntansi tidak akan membiarkan atau mendistorsikan realitas organisasi yang bermetaforakan zakat ke dalam bentuk realitas lainnya.

Sifat “obyektivitas” ini sangat penting dalam bangunan akuntansi syari’ah. Melalui sifat obyektivitas dapat mengarahkan pada pijakan kuat terhadap dasar epistemologinya. Oleh karenanya, dasar epistemologi yang kuat adalah sikap terbuka terhadap teori-teori yang lain dalam melakukan proses pemikiran. Hal ini berarti, bahwa upaya dekonstruksi teori akuntansi, diperlukan adanya keterbukaan dalam menerima teori-teori lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Dengan kata lain, “... epistemologi ini tidak perlu menolak secara total teori-teori akuntansi dari perspektif lainnya, melainkan harus secara rasional memanfaatkannya sebagai pelengkap bagi teori akuntansi [syari’ah] yang lebih komprehensif dan berwawasan tauhid.”¹¹²

Sikap terbuka merupakan salah satu konsep epistemologi Islam yang pada dasarnya menerima dan mengakui adanya kemajemukan. Kemajemukan yang dimaksud adalah kemajemukan dalam integralistik. Sebagaimana dipertegas oleh pernyataan Dhaouadi, bahwa :

¹¹²Bashir, *Towards an Islamic Theory of Knowledge*, Part One. Arabia. April 74-75.

Islam tidak menerima dualisme, tetapi mengakui adanya pertemuan dan kesatuan dalam kemajemukan itu. Menurut pandangan Islam, memisahkan jasad dari ruh adalah tindakan melawan hakikat sesuatu, karena hal ini melanggar prinsip Islam yang sangat fundamental, yaitu tauhid.¹¹³

Pernyataan di atas menunjukkan, Islam menolak adanya dikhotomi antara dua hal yang bersifat berlawanan, tetapi sebaliknya Islam menerima bahwa dua hal (atau lebih) yang berlawanan (atau berbeda) itu mestinya saling melengkapi. Misalnya, jasad tidak dapat meniadakan ruh dan ruh tidak dapat meniadakan jasad. Akal tidak dapat meniadakan kalbu dan kalbu tidak dapat meniadakan akal; keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Hal demikian, menurut Poernomosidi Hadjisarosa dikatakan sebagai “dua hal yang karakteristik”.¹¹⁴ Dua hal yang karakteristik ini akan selalu melekat dalam bangunan akuntansi, yaitu : akuntansi tidak akan pernah melepaskan antara sisi aktiva dan pasiva. Hal ini dikenal dengan *double entry bookkeeping*.

Dua hal yang karakteristik, akan selalu ada dalam tradisi Islam. Ayat-ayat dalam kitab suci, tidak dapat dipisahkan antara ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyyah*. Agama dan ilmu pengetahuan (*science*) juga merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan pemahaman terhadap agama.

Apabila kerangka epistemologi sebagaimana dikemukakan di atas diterapkan dalam rangka membangun teori akuntansi syari’ah, maka produk teori akuntansi syari’ah yang dihasilkan akan memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan teori akuntansi

¹¹³Dhaouadi, Mahmoud. 1993. “Reflection into the spirit of the Islamic Corpus of Knowledge and the Rise of the New Science”. *The American Journal of Islamic School Science* 10 (2): 153 – 64.

¹¹⁴Poernomosidi Hadjisaroso, **Pendekatan Sistem : Butir-butir mengenali Suatu Hal secara Benar dan Utuh**, Yogyakarta : STIE Mitra Indonesia, 1997, hal. 5.

“konvensional”. Sebab, dengan begitu teori akuntansi syari’ah tidak hanya berdiri di atas azas *etis-epistemologi* yang universal, yaitu keadilan Ilahi, namun juga memiliki sifat yang *transendental* dan *teleological*. Hal ini berarti, bahwa teori tersebut tidak hanya memberikan perhatian pada kepentingan *profan* (bisnis) manusia, tetapi juga untuk kepentingan ukhrawi, yang diaktualisasikan dalam kesadaran diri untuk hidup harmoni dengan jaringan-jaringan kuasa Ilahi.

G. Bentuk Akuntansi Zakat

Sebagaimana disampaikan di muka, realitas metafora akuntansi syari’ah adalah akuntansi zakat. Ada beberapa alasan sehingga diusulkannya metafora zakat tersebut, yaitu : (1) zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang memiliki bersifat *humanis*, *emansipatoris*, *transendental* dan *teleologikal*, yang mengarahkan para pelakunya memiliki orientasi sosial dan pertanggungjawaban yang tinggi terhadap lingkungan dan kuasa Ilahi; (2) belum jelasnya definisi akuntansi Islam dikalangan masyarakat ilmuwan atau masyarakat awam; dan (3) akuntansi zakat menyangkut nilai Islam sejak awal Islam ada, sebab zakat adalah suatu lembaga yang dimulai saat agama Islam itu muncul.

Untuk membahas akuntansi zakat ini, perlu ditelusuri beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan akuntansi zakat. *Pertama* : Karakteristik Zakat; *Kedua* : Batasan-batasan (*nishab*) zakat; *Ketiga* : Penilaian Persediaan dalam Menghitung Zakat;

1. Karakteristik Zakat

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syari'at. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakatnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekalian rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat, karena ia mensucikan jiwa dan masyarakat.¹¹⁵

Zakat membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Sebab manusia ketika ia mengeluarkan zakat dengan merelakan hartanya, tatkala itulah ia menang atas nafsunya ... menang atas kikir dan bakhilnya. Ketika itu ia mensucikan dan membersihkan jiwanya.¹¹⁶ Lebih lanjut dikatakan oleh al-'Assal dan Karim, bahwa :

Zakat juga membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling mendendam dan mendengki, dari kegoncangan dan fitnah. Sebab manakala masyarakat seluruhnya menjamin dan saling bantu-membantu menutupi hajat kaum melarat dan mereka sangat berkebutuhan, ketika itulah mereka mengikis habis merajalelanya huru-hara dan kegoncangan yang terwujud dari rasa dendam kaum melarat terhadap mereka yang kaya raya.¹¹⁷

Zakat, sebenarnya telah ada sejak jaman Rasulullah SAW. ketika masih tinggal di Mekah. Akan tetapi sejak tahun kedua Hijrah zakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW sendiri telah mengutus wali-wali ke daerah-daerah

¹¹⁵Firman Allah mengatakan : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka.*

¹¹⁶Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, **Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya**, Terjemahan : Abu Ahmadi dan Onshori Umar Sitanggal, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hal. 110.

untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya yang telah berkewajiban, untuk dibagikan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya, kewajiban ini dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar r.a. bertekad memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat.

Gambaran ini, menunjukkan bahwa kewajiban zakat merupakan kewajiban karakteristik yang harus dipenuhi atau ditunaikan setiap muslim yang telah mencapai nishab atas harta benda yang mereka miliki. Semua hali fiqh juga menetapkan, kalau ada seseorang mati, sedang ia belum menunaikan zakat, maka zakat itu menjadi hutang yang menempel pada hartanya. Hutang ini mesti didahulukan pelunasannya terlebih dahulu dari sekalian hutang-hutang yang lain.¹¹⁸

Dengan demikian, zakat memiliki sifat khusus, yaitu :

- a) Zakat merupakan salah satu rukun Islam
- b) Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dalam al-Qur'an.
- c) Tarif zakat sudah ditetapkan dari hadits dan tarif ini berbeda menurut atau sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi.
- d) Zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal ini merupakan dasar agama dari Islam. Walaupun perusahaan bersama memiliki badan hukum yang independen sendiri dari pemegang saham, badan ini terkena zakat.¹¹⁹
- e) Utang tidak masuk perhitungan zakat, zakat dikenakan atas aktiva bersih.
- f) Kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah tertentu (nisab) yang diatur hadits. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan, dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya.

¹¹⁷Ibid

¹¹⁸ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, **Op.Cit**, hal. 112

¹¹⁹Hideki Sato, **Understanding Zakat**. Niigata. Institute of Middle Eastern Studies, International University of Japan, 1987.

g) Harta yang dikenakan zakatnya, dikenakan jika melebihi satu tahun.

2. Batasan-batasan (*Nishab*) Zakat

Sebagai suatu kewajiban yang khas dalam agama Islam, zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang dikeluarkan. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Harta dalam Islam dapat menggolongkan pemiliknya ke dalam golongan orang-orang kaya menurut pengertian zakat, manakala telah memenuhi dua syarat, yaitu :

Pertama : Harta itu telah sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan nisab. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar emas. Adapun untuk hasil-hasil pertanian, jumhur fuqaha (kebanyakan ahli hukum Islam) berpendapat bahwa setiap tetumbuhan bumi yang ada zakatnya, tidak ada nizamnya yang tertentu.

Kedua : Pemilik harta tetap memiliki senisab ini dalam masa satu tahun penuh, selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian.¹²⁰

Macam dan jenis harta yang wajib dizakati menurut syari'at Islam telah ditetapkan dalam hadist Nabi SAW., harta tersebut meliputi empat macam, yaitu :

- a) Binatang ternak
- b) Emas dan perak
- c) Barang dagangan
- d) Hasil bercocok tanam dan buah-buahan.

Jika dikaitkan dengan perusahaan maka jenis dan macam barang atau harta tersebut dapat dikiasikan dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Tentu saja ini

¹²⁰ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op.Cit*, hal. 112

perlu dilakukan pemikiran atau ijtihat yang tepat atas harta atau barang yang harus dikeluarkan zakatnya oleh suatu perusahaan tertentu.

Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat.

Menurut Atiya dikatakan, bahwa :¹²¹

- a. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para ahli fiqh mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
- b. Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Asset ini harus diberlakukan lebih satu tahun.
- c. Aturan mengenai independensi. Pengaturan ini berkaitan dengan standar yang diuraikan di atas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk.
- d. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
- e. Yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut ketentuan (hadits), sehingga orang yang tidak cukup dari nisabnya maka tidak berkewajiban di tagih.
- f. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat.
- g. Kekayaan dari asset. Setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta atau asset yang dimiliki oleh

¹²¹M.K. 'Atiya, **Accounting of the Company and the Bank for the Islamic Organisation** (*muhasabah sharikat wamusarif al-nizam al-islam*), Alexandria : Dar al-Jamiat al-Misliya, 1984, h. 210-211.

seseorang atau perusahaan, kemudian seseorang atau perusahaan itu mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme akuntansinya akhirnya dapat diformulasikan.

3. Penilaian-penilaian Perhitungan Zakat dalam Akuntansi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan sesuai dengan prosedur perhitungan zakat kita dapat melihat seluruh konsep akuntansi. Konsep-konsep yang dapat diketahui dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan masalah akuntansi adalah : modal, laba, pengukuran biaya, penilaian aktiva, periode akuntansi (periode pelaporan).

Pengeluaran kewajiban atas zakat sangat tergantung pada keadaan kapan harta ini mencapai nisab. Dengan demikian, suatu aset akan dikeluarkan zakatnya apabila aset tersebut telah mencapai nisabnya. Keadaan ini akan berkaitan dengan harga pasar barang atau biasa disebut dengan *net-realizable value* (nilai realisasi bersih). Jika keadaan ini terwujud maka suatu perusahaan mencapai tingkatan *zakat ability* (kemampuan zakat). Keadaan *zakat ability* adalah kemampuan dari aktiva untuk berkembang yang dibuktikan dari kemampuan asset dijual tanpa melihat apakah sudah dijual atau belum.¹²²

Di dalam tradisi Islam, perusahaan dipandang sebagai suatu yang dibenarkan dan pada saat yang sama perusahaan tersebut harus melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan adalah kewajiban mengeluarkan zakat.

¹²²A.A. Al-Askher, *The Islamic Bussines Enterprise*, London : Routledge, 1987, h. 50.

Sehubungan dengan hal ini, dalil-dalil apa yang akan mempengaruhi keputusan pengeluaran kewajiban perusahaan.

Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah zakat dalam perusahaan, yang akhirnya berpengaruh pada keputusan akuntansi. Sebagaimana disampaikan Sahata, bahwa ada dua pendapat yang berbeda menyangkut pembayaran zakat dalam kontrak mudharabah, yaitu : satu pendapat menyatakan bahwa zakat adalah sejenis biaya dan pendapat yang lain menganggap zakat adalah bagian dari laba.¹²³ Sehubungan dengan hal dua pendapat tersebut, beberapa Imam Islam seperti Imam Malik, Imam Nawawi menyatakan :

Pendapatan pertama, yang menyatakan zakat sebagai biaya :

- a) Imam Malik berkata : Setelah mengurangi biaya dan zakat jika saham berjumlah sampai nisab, mereka membagi laba menurut perjanjian mereka.
- b) Ibn Waham berkata : setelah zakat dan pengeluaran dua dari kita membaginya.
- c) Imam Nawawi berkata : setelah mengurangi biaya dan hak Tuhan (zakat) laba harus dibagi.
- d) Ibnu Harhu berkata : zakat harus dianggap biaya.

Pendapat ke dua menganggap zakat sebagai bagian laba, diantaranya dikatakan oleh :

- a) Dasuki berkata : jika pekerja setuju, pemilik modal dapat mengambil zakat. Jika tidak, pekerja harus membayar zakat setelah satu tahun.
- b) Ibnu Qudama berkata : misalkan 1000 dirham sebagai modal dan mereka sepakat laba dibagi 50 : 50, jika modal menjadi 3000 dirham setelah satu tahun, sebagai pemodal dikenakan zakat atas 2000 dirham karena laba terjadi setelah satu tahun dari modal awal. Bagi pekerja sahamnya adalah 1000 dirham yang

¹²³S.I. Shahata, **Reorganization and Accounting of Zakat for Contemporary Application**, Cairo : al-Zahraa al-a'lam a-arabi, 1988, h. 153-156.

dikenakan zakat setelah satu tahun. Selanjutnya dikatakan : sebab tidak perlu membayar zakat sebelum menerima utang, dia (pekerja) tidak harus membayar zakat sebelum pembagian laba.

- c) Abu Hitab mengatakan : pekerja tidak berurusan dengan zakat sebelum kepadanya dibayar bagiannya dari laba sebab dia tidak punya apa-apa. Setelah satu tahun baru ia membayar zakat.

Berdasarkan ketentuan penilaian tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat dibayar oleh seorang muslim sebagai suatu kewajiban. Ada dua persoalan yang muncul berkaitan dengan pendapat-pendapat di atas. *Pertama* : Apakah perusahaan harus mengeluarkan zakat? *Kedua* : Bagaimanakah perlakuan zakat dalam akuntansi?

Jawaban atas persoalan pertama, ada dua kesimpulan. Kesimpulan *pertama*, yaitu jika zakat perusahaan dianggap sebagai biaya, maka zakat harus ditempatkan sebagai *social cost*. Jika demikian, maka zakat tidak terletak sebagai hasil kegiatan perusahaan, atau zakat terletak pada pemikiran harta. Dengan demikian, perusahaan harus memberikan sumbangan pada dunia Islam, sebab perusahaan adalah sebagai perusahaan yang memiliki kekayaan. Dalam tradisi Islam, kekayaan pada dasarnya adalah juga milik Tuhan dan masing-masing mendapatkannya.¹²⁴ Perusahaan adalah salah satu lembaga yang diizinkan untuk memiliki harta Tuhan yang disamakan seperti orang. Karenanya pemilikan dan penggunaan kekayaan pada dasarnya bebas tetapi ada peraturan. Batas peraturan itu berbeda menurut pembagiannya, dan dari sudut pandang zakat, yang disebut dengan *zakat ability*.

¹²⁴Takuma Abe, **A Company Study of Islamic Ownership**, I.M.E.S. Working Paper Series, No. 10, Niigata : The Institute of Middle Eastern Studies, International University of Japan, 1987, h. 25.

Kesimpulan *kedua*, jika zakat dianggap sebagai pembagian laba, jumlah zakat dihitung setelah pembagian laba kepada pemilik. Dalam masalah ini masing-masing pemegang saham memiliki “nishab” masing-masing jika perusahaan membayar zakat kepada masing-masing pemegang saham, perusahaan harus menanyakan kepada masing-masing pesero mengenai nishabnya. Perusahaan hanya semata-mata pengumpul pesero. Di pihak lain, perusahaan harus selalu mencatat posisi masing-masing pesero yang masing-masing berbeda dengan yang lain.

Persoalan Kedua adalah berkaitan dengan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap dana zakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka sarang yang diajarkan dalam buku *100 Question & 100 Answers on Islamic Bank* menyatakan :

Dana zakat harus dibuat di setiap Bank. Di negara dimana pemerintah bertugas mengumpulkan zakat (amil), Bank Islam dapat berperan sebagai organisasi teknis yang membantu pemerintah. Jika pemerintah tidak mengatur zakat, maka tergantung pada Bank Islam untuk menganjurkan orang Islam memenuhi kewajibannya. Dia mengumpulkan zakat, dicatat dan diurusnya dengan cara yang benar.¹²⁵

Di negara kita (Indonesia) hal ini telah terjadi, yaitu beberapa Bank Islam (Syari'ah) yang beroperasi telah mengembangkan produk pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan al-Qardul Hasan. Kasus ini menandakan bahwa mekanisme pengelolaan dana zakat diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik. Tentu saja harus didukung dengan pelaksanaan sistem akuntansi yang baik pula. Hal inilah yang

¹²⁵100 Question and 100 Answers on Islamic Banks, ed. By International association of Islamic Banks, 1987, h. 41.

merupakan upaya pelaksanaan pencatatan zakat secara benar, sebagaimana yang dipesankan dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Berkaitan dengan pengukuran zakat, Gambling dan Karim, menyatakan bahwa “untuk kepentingan zakat, pengukuran yang lebih relevan digunakan adalah *current cost accounting*, atau, *net realizable value*, atau *continously contemporary accounting (CoCoA)* yang dikemukakan Chambers (1966), dan tidak menggunakan *historical cost accounting*.”¹²⁶ Dengan demikian, apabila *historical cost accounting* ditinggalkan, maka konsekuensinya adalah penilaian persediaan dengan metode *cost or market whichever is lower (COMWIL)* tidak relevan lagi.

Sehubungan dengan masalah pengklasifikasian aktiva, Gambling dan Karim menyatakan, bahwa “pengklasifikasian aktiva menjadi aktiva lancar (*current assets*) dan aktiva tidak lancar (*non current assets*) mempunyai arti yang berbeda dalam pandangan syari’ah Islam (1991 : 93). Dari kaca mata syari’ah tentunya pengklasifikasian aktiva tersebut digunakan untuk mengidentifikasi aktiva yang terkena zakat (*zakatable assets*). Sementara dari kaca mata non Islam aktiva adalah sesuatu yang tidak dikenai zakat. Dengan demikian, pandangan akuntansi konvensional dengan akuntansi syari’ah jelas berbeda.

Gambling dan Karim (1991) juga menyatakan, bahwa zakat dikenakan terhadap aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan, yaitu modal kerja bersih (*net working capital*) termasuk kas, dan bukan pada aktiva yang dibeli untuk digunakan dalam operasi,

¹²⁶ *Ibid*, Hal. 20.

yaitu aktiva tetap (*fixed assets*).¹²⁷ Dari pernyataan ini jelas, bahwa konsep pengakuan dan penilaian aktiva didasarkan pada harga pasar (*market value*). Sebab dalam perhitungan zakat, nilai yang dianggap memenuhi persyaratan syari'ah adalah harga pasar.

Sementara itu, Baydoun dan Willet (1994) mencoba melakukan kajian tentang alat ukur akuntansi yang relevan dengan akuntansi syari'ah, mereka berpendapat bahwa : *current value (cost) accounting* adalah alat ukur yang lebih tepat digunakan dalam pandangan syari'ah.¹²⁸ Pandangannya ini didasarkan pada analisis, bahwa laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan kalkulasi nilai pasar yang berdasarkan pada biaya aktivitas yang berada di luar *database* perusahaan. Mengapa demikian? Sebab nilai pasar sekarang (*current market value*) sebuah aktiva tidak selalu berasal dari transaksi biaya historik (*historical cost*) tunggal dari perusahaan yang memiliki aktiva, tetapi aktiva tersebut didasarkan pada rata-rata nilai dari suatu set transaksi yang terjadi jika perusahaan membeli atau menjual aktiva itu sekarang.

Dengan demikian metode *current value accounting* pada dasarnya adalah perluasan pertanggungjawaban (*accountability*) perusahaan pada dimensi sosial. Sebagaimana Baydoun dan Willet mengatakan bahwa : "nilai yang ditambahkan perusahaan pada perekonomian dilakukan melalui (interaksi) tenaga kerja (pada masa lalu dan sekarang) dan nilai ini harus didistribusikan secara adil sesuai dengan yang ditetapkan dalam syari'ah."¹²⁹

¹²⁷ *Ibid*, Hal. 20.

¹²⁸ Nabil Baydoun dan Roger Willett. *Islamic Accounting Theory*. (The AAANZ Annual Conference), 1994, Hal. 235.

¹²⁹ *Ibid*, Hal. 382.

Dari kajiannya itu, kemudian mereka mendesain laporan keuangan yang memuat unsur-unsur : *cash-flow statement*, *current value balance sheet*, dan *value added statement*. *Value Added Statement* inilah yang kalau dalam akuntansi konvensional disebut Laporan Laba Rugi. Akan tetapi dari keduanya terdapat perbedaan. *Value Added Statement* lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Konsep *Value Added Statement* ini ditangkap oleh Baswier (1996) dengan pengembangan model pada tabel berikut :

LAPORAN NILAI TAMBAH PERUSAHAAN XXX

OUT-PUT		NILAI TAMBAH	
Penjualan Bersih (out-put)	XXX	Biaya Administrasi (Kecuali Upah)	XXX
Biaya Bahan Baku (out-put)	(XXX)	Biaya Penjualan (Kecuali Upah)	XXX
		Biaya Pabrik (Kecuali Upah)	XXX
		Upah dan Bonus	XXX
		Pajak	XXX
		Deviden	XXX
		Zakat *)	XXX
Jumlah	XXX	Jumlah	XXX

*)Tambahan dari penulis dari konsep yang diajukan oleh Baswier

Tabel 2 : Laporan Nilai Tambah Perusahaan XXX

Dari tabel tersebut menunjukkan transparansi pada masing-masing transaksi secara jelas bagi pemilik perusahaan atau kepada para buruh/pekerja. Di samping itu, tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa perusahaan tidak lagi hanya mengejar laba setinggi-tingginya. Akan tetapi laporan nilai tambah akan mengarahkan pada berbagai bentuk *income*. Beberapa konsep *income* tersebut menurut Hendriksen (1982) adalah seperti : *enterprise net income*, *net income to investors*, *net income to stockholders* dan *net income to residual*

equity holders.¹³⁰

Di pihak lain dari tabel di atas terlihat juga adanya upaya pengurangan terjadinya konflik antara pemilik perusahaan dengan buruh. Sebab upah disajikan sebagai kelompok tersendiri, para buruh akan dapat mengetahui bagiannya dengan jelas, baik ketika dibandingkan dengan jumlah nilai tambah, maupun dengan pajak dan deviden. Dari sudut transparansi, laporan nilai tambah adalah jelas transparan bagi pemilik modal maupun para buruh. Akan tetapi apakah setelah adanya transparansi dapat dijadikan tolok ukur bagi model laporan keuangan (akuntansi) yang Islami? Secara sepintas, nampaknya dapat dijadikan embrio bagi pembentukan model akuntansi syari'ah. Akan tetapi, pasti masih banyak hal-hal yang dikembangkan menuju bentuk akuntansi yang *kaffuh*. Misalnya, bagaimana menempatkan pos zakat, bagaimana pemenuhan aspek pertanggungjawaban (*accountability*), bagaimana kepedulian aspek sosial dan alam (lingkungan). Mengingat akuntansi syari'ah harus mencerminkan atau merefleksikan akuntansi yang *rahmatan lil 'alamiin*? Untuk menjawab permasalahan tersebut, bagian berikut akan menguraikan kajian akuntansi dilihat dari sisi orientasi sosial dan akuntansi pertanggungjawaban.

H. Akuntansi Berorientasi Sosial

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamiin*. Artinya ajaran Islam akan dapat diterapkan atau dipakai siapa saja, dan dimana saja. *Rahmatan lil 'alamiin* adalah sebuah konsep yang mengandalkan pada konsep keadilan. Keadilan merupakan isi kandungan yang tidak dapat dihilangkan dari keyakinan Islam. Sehingga kondisi ideal masyarakat Islam tidak akan dapat tercapai apabila keadilan tidak ditegakkan. Islam ingin menjinakkan

¹³⁰Iwan Triyuwono, *Loc. Cit.*, 1997, Hal. 21.

semua perilaku dzalim dari masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah perilaku dzalim masyarakat bisnis. Perilaku dzalim adalah perilaku-perilaku dalam bentuk diskriminasi, ketidakadilan, eksploitasi, tekanan dan perilaku sewenang-wenang yang dengan dengan perilaku ini dapat merugikan orang lain.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah kapan suatu keadilan dalam suatu masyarakat terwujud? Keadilan masyarakat merupakan keadilan ideal, dimana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dalam berbagai bidang. Tidaklah mungkin untuk mendapatkan masyarakat Islam yang ideal sementara keadilan tidak ditegakkan.

Berdasarkan paparan di atas, satu hal yang tidak dapat dihindari dari keyakinan Islam bahwa manusia merupakan khalifah (wakil) Tuhan, dan manusia harus mengatur hidup sesuai dengan status mereka. Pengarahan-pengarahan yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam adalah dalam rangka membantu merealisasikan tujuan ini. Para ulama sangat percaya bahwa kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup yang berat merupakan tujuan dasar syaria'ah. Pandangan ini, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi merupakan penekanan pada penciptaan kelayakan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan keadilan sosial-ekonomi.

Dari sinilah diperlukan suatu penanganan dan pendekatan serta studi yang berorientasi sosial, sehingga seluruh fungsi perusahaan harus berlandaskan pada nuansa Islami. Sebagai contoh misalnya pada bidang akuntansi. Hal penting untuk dicatat, bahwa perbedaan dalam struktur sosial mempengaruhi pengembangan bidang dalam suatu masyarakat tertentu. Demikian pula pengaruhnya pada bidang akuntansi. Dengan kata

lain, akuntansi adalah refleksi budaya. Demikian pula akuntansi Islam (syari'ah) pada dasarnya adalah refleksi budaya Islam.

Pembicaraan mengenai akuntansi Islam haruslah dipahami sebagai sebuah alat yang memiliki orientasi sosial. Mengapa demikian? Sebab akuntansi Islam tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Hal ini tidak sama dengan perbedaan antara akuntansi deskriptif dengan akuntansi normatif. Akuntansi deskriptif ini bertujuan untuk menawarkan akuntansi yang cocok dengan tujuan tertentu. Jika tujuan berbeda, maka pasti norma juga berbeda.

Akuntansi Islam memiliki satu tujuan yaitu akuntansi harus mematuhi prinsip Islam. Akuntansi Islam muncul sebagai turunan dari prinsip-prinsip Islam. Dalam kaitan ini, semua akuntansi Islam dapat disebut normatif. Tetapi, benar juga jika disebut bahwa di mata masyarakat (Islam), perbedaan yang menarik antara positif-normatif atau deskriptif/preskriptif atau dikotomi mendasar antara fakta-nilai yang merupakan sifat yang dianut, merupakan suatu jenis pengetahuan yang saat ini terjebak dalam suasana kendala metodologi dalam studi akuntansi khususnya tentang Akuntansi Islam. Hukum Islam atau syari'ah, berlaku bagi setiap muslim dan membentuk aturan dasar bagi semua lembaga keuangan syari'ah (Islam), termasuk perbankan syari'ah. Syari'ah diterapkan untuk mewujudkan masyarakat ideal, sehingga lembaga keuangannya dan akuntansi memiliki kesamaan pembenarannya sendiri. Tentu saja ada perbedaan pendapat terhadap suatu fenomena ekonomi. Argumen mengenai sifat-sifat zakat misalnya. Tidak peduli

apakah perusahaan menghemat uang atau pemerintah mengumpulkan zakat, tetapi masalahnya adalah menentukan apakah yang terbaik untuk memahami Islam.

Secara jelas akuntansi Islam yang diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah adalah upaya penerapan akuntansi yang menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, dan juga masalah akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian dari syari'ah. Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syari'ah memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok-kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat. Di sinilah letak posisi sosial dari akuntansi Islam.

Akuntansi berorientasi sosial adalah sebuah akuntansi yang menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat.¹³¹ Dengan demikian, pengungkapan perusahaan tentang dampak sosialnya terhadap masyarakat sebagai suatu kewajiban. Jika ihwalnya adalah berkaitan dengan masalah kewajiban sosial, maka cara baku untuk pengembangan akuntansi yang dapat diterima oleh seluruh umat – sesuai dengan sifat *rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam – adalah dengan cara memperluas konsep dasar sistem zakat.

Mengapa harus memperluas konsep dasar sistem zakat? Sebab sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa zakat sebagai suatu institusi yang memiliki perspektif sosial harus dikenakan kepada seluruh aktiva perusahaan maupun perorangan. Walaupun meski harus dilihat lebih dahulu apakah zakat dikenakan kepada aktiva lancar atau tidak lancar. Mengingat zakat merupakan pengeluaran yang harus dibayarkan setelah mencapai *nishab*. Nishab terjadi apabila harta yang dimiliki seseorang atau perusahaan itu

¹³¹Trevor Gambling dan R. A. A. Karim, *Loc. Cit.* 1986, Hal. 214.

bertambah dan bertambah, sehingga yang bersangkutan akan dikenai pengeluaran zakat apakah sebanyak 2,5 %, 5 % atau 10 %, tergantung pada jenis aktiva yang menghasilkan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Dengan kata lain, zakat dalam akuntansi dikenakan pada aktiva lancar.

Oleh karena orientasi sosial akuntansi syari'ah adalah dibebankan kepada perluasan konsep zakat, maka kias (metafora) organisasi akuntansi harus dirujuk pada orientasi zakat, bukan lagi pada orientasi laba atau *stakeholder oriented*.¹³² Inilah yang lebih lanjut dikatakan oleh Triyuwono sebagai organisasi bermetaforakan "amanah". Orientasi zakat mengandung pengertian luas dan komprehensif. Sebab zakat bukan sekedar dinyatakan dalam bentuk angka-angka prosentase, akan tetapi melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan. Yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang di dapat perusahaan.

Lebih tegas lagi dapat dikatakan, bahwa penggunaan kiasan (metafora) zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. Menurut Triyuwono ada lima makna realitas organisasi tersebut, yaitu :¹³³

- a. Ada transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat.
- b. Karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan [akuntansi] harus tunduk pada aturan main (*rules of game*) yang ditetapkan dalam syari'ah.
- c. Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik/sosial.
- d. Zakat mengandung nilai emansipatoris.
- e. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang bersifat duniawi dan ukhrowi.

¹³²Iwan Triyuwono, *Loc. Cit.* 1997, Hal. 13.

¹³³*Ibid.* Hal. 13-14.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pemikiran di atas jelas menunjukkan orientasi sosial yang jelas dari zakat. Pada saat zakat ditempatkan sebagai metafora organisasi atau zakat sebagai inti organisasi akuntansi. Sebagaimana makna pertama : ada transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Hal ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara.

Oleh karena zakat menjadi tujuan akhir, maka segala bentuk operasi perusahaan [akuntansi] harus tunduk pada aturan main (*rules of game*) yang ditetapkan dalam syari'ah. Sebagai contoh : kapan seseorang atau perusahaan mengeluarkan zakat sebagai orientasi sosial perusahaan; berapa persen zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan; dan siapa saja yang harus diberi zakat. Kesemuanya ini dijalankan mengikuti aturan-aturan main yang ada dalam syari'ah Islam. Penyimpangan terhadap aturan atau hukum syari'ah menjadikan tidak sahnya tujuan zakat.

Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik/sosial. Artinya, bahwa seseorang mengeluarkan zakat berarti ia telah mementingkan lebih dahulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Karakter egoistik mencerminkan bahwa seseorang atau perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai Syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik atau sosial mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin

dalam zakat itu sendiri.

Zakat mengandung nilai emansipatoris. Hal ini berarti, bahwa zakat sebagai lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Akhirnya, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang bersifat duniawi dan ukhrowi. Hal ini berarti, bahwa zakat sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia, karena segala bentuk kegiatan *profan* selalu berkait erat dengan kehidupan manusia dihadapan Allah kelak di akhirat.

Dengan demikian jelas, bahwa kiasan (metafora) akuntansi syari'ah harus dibangun dengan memperhatikan makna zakat, sebagai suatu orientasi sosial. Sebab orientasi ini akan berkaitan erat dengan tujuan akhir kinerja akuntansi. Tujuan akhir kinerja akuntansi adalah pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban tentang kondisi aktiva, pasiva, dan modal yang dimiliki oleh seseorang maupun perusahaan.

Implikasi dari pemikiran di atas menunjukkan, bahwa semua perangkat organisasi yang akan disusun harus benar-benar merefleksikan zakat sebagai suatu kias (metafora). Hal ini menunjukkan adanya bentuk transformasi. Transformasi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, *stockholders*, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga perangkat informasi. Perangkat informasi yang ada dalam perusahaan inilah yang biasanya berbentuk akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan.

Kecuali itu harus diingat, bahwa bentuk organisasi digambarkan di atas bukanlah sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap kias (metafora) dan orientasi

akuntansi syari'ah. Akan tetapi, faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap bentuk akuntansi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa akuntansi merupakan keutuhan (entitas) informasi yang tidak bebas nilai, tetapi merupakan keutuhan (entitas) informasi yang sarat nilai.


I. Akuntansi Pertanggungjawaban

Satu hal penting yang dapat dikaji dari ayat 282 surat al-Baqarah adalah adanya perintah dari Allah kepada kita untuk menjaga : Keadilan dan Kebenaran di dalam melakukan setiap transaksi. Lebih dalam perintah ini menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dalam suatu transaksi diperlukan saksi.

Di samping itu, kalau kita kembali kepada pembahasan bab II, bahwa manusia diciptakan Allah di muka bumi ini memiliki fungsi dan peran ganda, yaitu : fungsi *khalifah* dan *abdullah* (wakil dan hamba). Di dalam menjalankan fungsi dan peran ini tentu saja pemberi peran akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut. Oleh karena itu, di dalam akuntansi kehidupan manusia, maka manusia sebagai khalifah dan abdullah tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses akuntansi. Dengan kata lain, manusia akan selalu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amalnya dihadapan Sang pemberi amanah, yaitu Allah SWT.

Gambaran di atas harus dijadikan pijakan dalam pengembangan format akuntansi syari'ah, yang berdimensikan pertanggungjawaban (*accountability*). Dimensi pertang-

gungjawaban dalam akuntansi syaria'ah adalah memiliki cakupan yang luas. Jadi pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban atas uang (finansial) yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi pertanggungjawaban ini harus mampu meningkatkan tanggungjawab secara horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada transendensi aktivitas (finansial, dsb-nya) kepada Dzat yang memberikan tanggungjawab. Secara rinci, pertanggungjawaban akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan tersebut Hadjisarosa mengidentifikasi sebagai berikut :

- 
- a. kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan
 - b. pelanggan
 - c. pemilik modal
 - d. karyawan
 - e. rekanan
 - f. pemerintah
 - g. masyarakat, dan
 - h. pelestarian lingkungan.¹³⁴

Kedatipun telah terdapat delapan kepentingan yang harus diperhatikan dalam melakukan pertanggungjawaban atas kondisi dan informasi akuntansi, namun delapan hal tersebut hanyalah baru sebatas pada dimensi horizontal. Timbul pertanyaan, dimanakah letak dimensi vertikalnya? Jawabanya adalah ada pada dimensi zakat. Zakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban hamba yang melakukan perbuatan/aktivitas bisnis yang dapat diaudit kemudian dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat pemberi modal. Dimensi inilah yang merupakan dimensi paling tinggi.

Perihal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban secara vertikal secara syari'ah diatur oleh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Persoalan berikutnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan *accountability* yang berkaitan dengan dimensi horizontal. Kiranya pandangan Lee Parker dapat dijadikan rujukan atau petunjuk bagi peningkatan *accountability*, sebagai berikut :

- a. Mengintegrasikan antara data keuangan dan nonkeuangan
- b. Penilaian terhadap hasil yang bersifat keuangan dan nonkeuangan dengan membandingkannya dengan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Memperluas ruang lingkup tanggung jawab mencakup masyarakat/lingkungan
- d. Laporan menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan pemerintah dan standar akuntansi.¹³⁵

Dalam kerangka inilah, maka para akuntan dihadapkan pada kemajuan masa depan, yang penuh dengan ketidakpastian, ketidak beresan. Ketika kondisi ini terjadi, maka para akuntan harus menghormati nilai, norma dan etika Teologis. Sehingga mereka mampu menampilkan dirinya sebagai akuntan yang dapat dipercaya, jujur, bertanggungjawab, dan sebagainya. Dengan demikian, akuntansi masa depan mestinya bukan hanya berorientasi pada pengambilan keputusan (*decision making oriented*) akan tetapi harus berorientasi pada pertanggungjawaban (*accountability oriented*).

Sesuai dengan kata kunci pembicaraan ini, yaitu pertanggungjawaban, maka akuntansi pertanggungjawaban merupakan ciri khas akuntansi syari'ah. Sebab akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang memberikan informasi yang adil dan benar. Dengan demikian akuntansi syari'ah (Islam) yang memiliki unsur pengertian ekonomian,

¹³⁴Poernomosidi Hadjisarosa, *Loc.Cit.* 1997, Hal. 48-49.

¹³⁵Lee D.Parker, *Here's to An Accountable Future.* (Australia : International Accounting Conference), November 14-16, 1994. Hal. 163.

politik, dan agama memiliki kemungkinan besar untuk menunjukkan kunci ke arah akuntansi Pasca Newton.¹³⁶

Berdasarkan pembahasan ini, maka secara nyata menunjukkan bahwa akuntansi syaria'ah (Islam) dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan paradigma baru dalam akuntansi. Namun perlu ketegasan, bahwa tidak perlu lagi untuk membedakan antara Akuntansi normatif dan deskriptif dalam akuntansi Islam. Sebab di dalam Islam keduanya akan berjalan. Tidak mungkin ditemukan deskripsi jika tidak ada norma. Norma adalah acuan dalam pengembangan deskripsi. Jadi keduanya ibarat koin mata uang, yang memiliki sisi berbeda namun nilainya sama



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³⁶Toshikabu Hayashi, *On Islamic Accounting*, (Tokyo : Institute of Middle Eastern Studies, International University of Japan), 1995, Hal. 163.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tataran praktis akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi syari'ah dapat menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan sekaligus menyajikan laporan pertanggungjawaban yang bersifat *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teologikal*. Oleh karena itu, konsep dasar akuntansi syari'ah adalah bersifat *zakat* dan *amanah oriented*.
2. Perkembangan lebih lanjut akuntansi bukan sekedar dianggap sebagai ilmu (*science*) dan teknologi universal yang bebas nilai. Akan tetapi, akuntansi adalah produk sejarah yang merefleksikan budaya di tempat akuntansi dilaksanakan. Dengan kata lain, akuntansi syari'ah adalah ilmu dan teknologi universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, baik sosial, ekonomi, politik, peraturan perundangan, kultur, persepsi dan nilai [masyarakat] tempat akuntansi syari'ah diterapkan.
3. Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan cara "tambal sulam" terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai al-Qur'an yang diturunkan ke dalam

pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Oleh karena itu, sepaꝛa substantif akuntansi syari'ah bersifat *humanis, emansipatoris, transendental dan teologikal*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dalam tesis ini, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Semua perangkat organisasi atau perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam harus benar-benar merefleksikan zakat sebagai suatu kiasan (*metafora*). Hal inilah merupakan transformasi yang akan berpengaruh terhadap perilaku manajemen, *stockholders*, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya serta perangkat informasi, yaitu akuntansi.
2. Oleh karena akuntansi syari'ah lebih cenderung bersifat *zakat dan amanah oriented* maka pengukurannya tidak lagi menggunakan metode *historical cost accounting* atau *cost or market whichever is lower (COMWIL)*. Akan tetapi pengukuran dan penilaian persediaan harus menggunakan *Net Realizable Value*. Alasannya, karena konsep penilaian dalam akuntansi syari'ah menggambarkan kenyataan (*real*) modal pada saat perhitungan zakat. Dengan kata, dasar perhitungan zakat harus berdasarkan harga pasar dari aset yang dapat dijual termasuk persediaan. Dalam pencatatannya, akuntansi syari'ah menggunakan dasar *cash basis*.
3. Dalam mendesain laporan keuangan dari akuntansi syari'ah harus memuat unsur-unsur : *cash-flow statement, current value balance sheet, dan value added statement*. *Value Added Statement* inilah yang kalau dalam akuntansi konvensional disebut Laporan Laba Rugi. Akan tetapi dari keduanya terdapat perbedaan. *Value Added Statement* lebih

menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan

Mengingat luasnya kajian akuntansi syari'ah mulai dari tataran filosofis sampai dengan tataran praktis, maka penelitian ini tidak dapat mengungkap aspek-aspek akuntansi syari'ah, seperti : aspek implementasi nilai keadilan dan kebenaran dalam akuntansi, model dan format akuntansi syari'ah. Oleh karena itu, saran yang diberikan untuk penelitian lanjutan, diantaranya adalah :

1. Kajian terhadap aspek-aspek akuntansi syari'ah yang tersirat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, seperti : aspek keadilan, kebenaran.
2. Kajian terhadap model dan format akuntansi syari'ah untuk bidang-bidang bisnis Islami.
3. Kajian terhadap metode pengukuran dan pencatatan akuntansi yang lebih tepat untuk akuntansi syari'ah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar, 1996, An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks, The Case of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia, **Ph D Thesis**, The University of Wollongong, 1996,
- , 1996. "[Teknologi] Akuntansi Konvensional dalam Perspektif Islam". **Kertas Kerja**. Disampaikan pada seminar Hari Kembangkitan Teknologi Nasional I. Yogyakarta : tanggal 29 Agustus 1996.
- Ahmad, Khurshid. 1997. **Economic Development in An Islamic Framework**. London : The Islamic Foundation.
- Alvesson, M. 1987. **Organization Theory and Technocrative Consciousness : Rationality, Ideology and Quality of Work**. New York : De Gruyter.
- Andreski, S. (ed.). 1983. **Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion**. London : George Allen.
- Antonio, M. Syafi'i, 1996, "Faktor-faktor Determinasi Pembangunan Ekonomi Menurut Islam", **Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam**, Syari'ah Banking Institute, tanggal 5 Januari 1996, di Yogyakarta.
- Arif, Muhammad. 1985. "Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics : The Beginning of a Scientific Revolution", **The American Journal of Islamic Social Science**, Vol. 2 No. 1, pp. 98.
- Asdi, Endang Daruni dan A. Husnan Aksa. 1982. **Filsuf-filsuf Dunia dalam Gambar**. Yogyakarta : Karya Kencana.
- As-Sadr, M. Baqir. 1987. **Islamic Economic**. Translated : Toshio Kuroda (*Isuramu Keizaron*). Neigata : The Institute of Middle Easter Studies, International University of Japan.
- Atiya, M.K.. 1984. **Accounting of the Company and the Bank for the Islamic Organization (Muhasaba Sharikat wa Musarif al-Mizan al-Islami)**. Alexandria : Daral-Jamiat al-Misliya.
- Baswir, Revrison, 1996, "Akuntansi dan Ideologi", **Kertas Kerja pada Seminar Nasional Harteknas**, Yogyakarta tanggal 27 Desember 1996,
- Baydoun, Nabil dan Roger Willett. 1994. **Islamic Accounting Theory**. The AAANZ Annual Conference.

- Belkaoui, Ahmed. 1993. **The Coming Crisis in Accounting**. New York : Greenwood Press, Inc.
- Canning, John B.. 1929. **The Economics of Accountancy : A Critical Analysis of Accounting Theory**. New York : Ronald Press.
- Chapra, M. Umer. 1979. **The Islamic Welfare and It's Role in the Economy**. London : The Islamic Foundation.
- , 1992, **Islam and The Economic Challenge**, United Kingdom : The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Chastain, Clark E., 1973, "Accounting and Society : A Behavioral View," **International Journal of Accounting, Education and Research**, Vol. 8, No. 2 (Spring 1973), pp. 1.
- Chatfield, Michael. 1977. **A History of Accounting Thought : Continuity and Change**. New Jersey : Prentice-Hal. Englewood Cliffs.
- Cooper, D.J. dan T.M. Hopper. 1987. "Critical Studies in Accounting", **Accounting Organization and Society**. New York : Prentice-Hall International, Inc., pp. 411.
- Dumairy, 1997, "Sistem Ekonomi Islami", **Kertas Kerja**, Prasaran Seminar Ekonomi Islam dalam rangka Pembukaan dan Kuliah Perdana STIS Yogyakarta, tanggal 9 Agustus 1997, Ambarukmo Hotel Yogyakarta.
- Edward, John R.. 1989. **A History of Financial Accounting**. London : Routledge.
- El-Askher, A.A.. 1987. **The Islamic Business Enterprise**. London : Routledge
- Gambling, Trevor E., 1971, "Toward a General Theory of Accounting," **International Journal of Accounting Education and Research**, Vol. 7, No. 1 (Fall 1971), pp. 15.
- , 1974, **Societal Accounting**, London : George Allen & Unwin
- , and R.A.A. Karim, 1986, 'Islam and Social Accounting', **Journal of Business Finance & Accounting**, No. 13 (1) (Spring, 1986), pp. 39.
- , 1991. **Business and Accounting Ethics in Islam**. Mansel.
- Gaffikin, M.J.R. 1989. **Accounting Methodology and The Work of R.J. Chambers**. New York : Garland Publishing, Inc.

- Gilling, D.M., 1976, "Accounting and Social Change," **International Journal of Accounting, Education and Research**, Vol. 1, No.2 (Spring 1976), pp. 56.
- Hamka. 1992. **Tafsir Al-Azhar**. Jakarta : Pt. Bulan Bintang.
- Hadjisarosa, Poernomosidi, 1997, "Nasakah Ringkas mengenai : Mengenal Ekonomi Syari'ah dengan Menempuh Pendekatan Sistem (Bagian Pertama) dalam rangka Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah yang Semestinya Berlangsung di Indonesia (Bagian Kedua)", **Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah**, Yogyakarta, tanggal 18 - 21 Agustus 1997,
- Harahap, Sofyan Syafri, 1992, **Akuntansi, Pengawasan, dan Manajemen dalam Perspektif Islam**, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Trisaksi Jakarta
- , 1997, **Akuntansi Islam**, Jakarta : Bumi Aksara
- Hayashi, Toshikabu, 1995, **On Islamic Accounting**, Tokyo : Institute of Middle Eastern Studies, International University of Japan
- Kam, Vernon. 1990. **Accounting Theory**. 2nd Edition. New York : John Wiley and Sons.
- Kuntowidjojo. 1991. **Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi**. Bandung : Mizan.
- Kuroda, Miyoko. 1988. "A Balance of Deeds in Islam", **Maydan**. Vol. 14. Niigata : The Institute of Middle Eastern Studies, International University of Japan, pp. 7.
- Kurosawa, Kiyoshi. 1973. **Accounting and Society**. Tokyo : Choukeizai-Sha.
- Laszlo, Ervin. Tt. **Introduction to System Philosophy**. New York : Sciece Publishers, Inc.
- Laughlin, R.C.. 1987. Accounting System in Organization Theory : A Case for Critical Theory, **Accounting, Organization and Society**, pp. 235.
- , T. Hopper & P. Miller. 1989. "Contextual Studies of Accounting and Auditing : An Introduction", **Accounting, Auditing and Accountability. Journal**, pp. 4.
- Littleton, A.C., 1934, "Socialized Accounts," **The Accounting Review**, Vol. 8 (March 1934),
- and V.K. Zimmerman. 1962. **Accounting Theory : Continuity and Change**. New jersey : Prentice-Hall.
- Lodh, Sudhir C. 1996. Critical Studies in Accounting Research, Rationality and Habermas : A Methodological Reflection. **Paper** to be Presented at the Fourth CPA Conference. New York City, 26-28 April 1996.

- MacIntosh, N.B. 1988. "Deconstructionism and Critical Accounting". **Paper** Presented at The Second Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference at the University of Manchester (July).
- Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir. 1997. **Amanah dalam Manajemen**. Terjemahan Rahmad Abbas. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Mannan, MA., 1995. **Teori dan Praktek Ekonomi Islam**, Terjemahan : M. Nastangin. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Muhamad, 1998, **Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah : Petunjuk teoritis dan Praktis bagi Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah, BMI, BPRS & BMT**, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 1998.
- Neimark, M. and Tinker. 1986. **The Social Construction of Management Control System**. New York : Prentice-Hall.
- Parker, Lee D. 1994. **Here's to An Accountable Future**. Australia : International Accounting Conference, November 14-16, 1994.
- Qardhawi, Yusuf., 1997, **Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam**, terjemahan : Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta : Robbani Press.
- Rahardjo, M. Dawam, 1997, **Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci**, Jakarta : Paramadina.
- Runes, Dagobert D.. tt.. **Dictionary of Philosophy**. New Jersey : Littlefield, Adams & Co.
- Saefuddin, AM., 1997, "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", **Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah**, Yogyakarta, tanggal 18 - 21 Agustus 1997,
- Sasono, Adi, dkk., 1988. **Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)**, Jakarta : Gema Insani Press.
- Shahata, Shauqi Ismail, 1987, **Financial Accounting from the Islamic Point of View**, Cairo : Alzahra al-A'lam al-A'rabi.
- , 1988. **Reorganization and Accounting of Zakat for Contemporary Application**. Cairo : al-Zahraa al-A'lam a-Arabi.

- Shopiaan, Ainur R.. (ed.). 1997. **Etika Ekonomi Politik : Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam**. Surabaya : Risalah Gusti.
- Syafi'ie, Imam. 1998. "Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik). **Desertasi**. Yogyakarta : PPS. IAIN Sunan Kalijaga.
- Tadjoedin, Achmad Ramzy, dkk., 1992, **Berbagai Aspek Ekonomi Islam**, Yogyakarta : P3EI FE UII bekerja sama dengan Tiara Wacana.
- Takatera, Sadao, 1988, **Posobility of Accounting (Kanosei no Kaikeigaku)**, Tokyo: Sanrei-shobo
- , 1984, **Accounting, Paradox (Kaikeigaku Paradokkusu)**, Tokyo : Dobunka,
- Taymiya, Ibn. 1982. **Public Duties in Islam : The Institution of the Hisba**. London : Islamic Foundation.
- Tricker, R.I.. 1978. **Reaserch in Accounting**. Arthur Young Lecture No. 1. University Glasgow Press.
- Triyuwono, Iwan., 1996, "Organisasi, Akuntansi, dan Spiritualisme Islam", **Makalah Stadium General Mahasiswa Syari'ah Banking Institute Yoyakarta**, tanggal 28 September 1996,
- , 1997, "Akuntansi Syari'ah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah", **Kerta Kerja**, Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Surakarta, 24 Februari 1997.
- , and M.J.R. Gaffikin, 1996, "Shari'ate Accounting : An Ethical Construction of Accounting Knowledge" **The Fourth Critical Perspectives on Accounting Symposium**, 26-28 April 1996, New York City,
- Voll, John Robert. 1997. **Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern**. Terjemahan : Ajat Sudrajat. Yogyakarta : Titihan Ilahi Press.